

**ANALISIS DAMPAK KEPENDUDUKAN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

NOVEMBER

2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR GAMBAR		iv
BAB I. PENDAHULUAN		1
1.1. Latar Belakang		1
1.2. Permasalahan		5
1.3. Maksud dan Tujuan		5
1.4. Ruang Lingkup		5
1.5. Metode		5
1.6. Kerangka Konsep		6
BAB II. GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN		
2.1. Gambaran Umum Wilayah		9
2.2. Aspek Demografi		9
BAB III. PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KEBUMEN		16
BAB III. PERMASALAHAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN		19
3.1. Permasalahan Kependudukan		19
3.2. Pengendalian Penduduk		26
3.3. Kemiskinan		43
3.4. Pertumbuhan ekonomi		49
3.5. Indeks Pembangunan Manusia		53
BAB IV. REKOMENDASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN		101

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Penduduk Kabupaten Kebumen Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021	7
Tabel II.2 Angka Beban Ketergantungan	14
Tabel III.1 Angka Ketergantungan	25
Tabel III.2 Perkembangan Capaian Kinerja Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	31
Tabel III.3. Pencanaan Kampung KB Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	32
Tabel III.4 Rincian Lokasi Kampung KB Kabupaten Kebumen	33
Tabel III.5 Korelasi Angka Ketergantungan dan Pendapatan Per Kapita	41
Tabel III.6 Korelasi Usia Produktif dan Tingkat Kesempatan Kerja	43
Tabel III.7 Perkembangan Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2021	46
Tabel III.8 Korelasi Angka Ketergantungan dan Kemiskinan	48
Tabel III.9 Korelasi Usia Produktif dan Kemiskinan	49
Tabel III.10 Peranan PDRB Kabupaten Kebumen Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2021 (%)	50
Tabel III.11 Korelasi Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi	53
Tabel III.12 Kinerja IPM Kabupaten Kebumen	56
Tabel III.13 Korelasi Angka Ketergantungan dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen	58
Tabel III.14 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2016-2020	64
Tabel III.15 Rasio Jumlah Lembaga PAUD per Siswa Jenjang PAUD Tahun 2016-2020	64
Tabel III.16 Perkembangan APK Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020	65
Tabel III.17 Perkembangan APM Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020	66
Tabel III.18 Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2016-2020	67
Tabel III.19 Angka Putus Sekolah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	68
Tabel III.20 Rasio Guru Per Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	69

Tabel III.21 Rasio Guru per Kelas rata-rata Terhadap Jumlah Murid Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	70
Tabel III.22 Rasio Ketersediaan Sekolah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	71
Tabel III.23 Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	72
Tabel III.24 Persentase Kelulusan Siswa Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	73
Tabel III.25 Persentase Guru dengan Kualifikasi S1/D4 Kabupaten Kebumen Tahun 2016 2020	75
Tabel III.26 Capaian Indikator Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	75
Tabel III.27 Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	78
Tabel III.28 Rasio Dokter dan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	79
Tabel III.29 Rasio Posyandu dan Balita Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	80
Tabel III.30 Rasio Puskesmas dan Klinik Per Satuan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	81
Tabel III.31 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2016- 2020	82
Tabel III.32 Capaian Pelayanan RSUD Kabupaten Kebumen Tahun 2020	83
Tabel III.33 Capaian Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2016– 2021	96
Tabel III.34 Korelasi Jumlah penduduk dan Tingkat Pengangguran Terbuka	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Hubungan Antara Penduduk dan Pembangunan	7
Gambar I.2 Hubungan Antara Kebijakan Kependudukan dan Dampak Kependudukan	8
Gambar I.3 Penjabaran Masing – Masing Komponen	8
Gambar I.4 Penjabaran Masing – Masing Komponen	8
Gambar II.1 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2021	10
Gambar II.2 Penduduk Menurut Jenis Kelamin	11
Gambar II.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2021.....	11
Gambar II.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur	13
Gambar III.1 Kasus HIV Baru Menurut Kelompok Umur	17
Gambar III.2 Sex Rasio Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2021	20
Gambar III.3. Perkembangan jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen	22
Gambar III.4. Perkembangan Jumlah Penduduk Produktif di Kabupaten Kebumen	23
Gambar III.5 Perkembangan Penduduk Usia Non Produktif	24
Gambar III.6 Perkembangan Angka Ketergantungan	25
Gambar III.7 perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka	26
Gambar III.8 Perkembangan Jumlah Penduduk Usia Muda (15-24 Tahun)	27
Gambar III.9 Perkembangan Pasangan Usia Subur di Kabupaten Kebumen	28
Gambar III.10 Persentase KB Aktif	29
Gambar III.11 Perkembangan Jumlah Penduduk Produktif	29
Gambar III.12 Persentase Tingkat Kesejahtera Keluarga Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2022	30
Gambar III.13 Kecenderungan Ageing Population (Kebumen Dalam Angka 2021)	38
Gambar III.14 Perkembangan Usia Harapan Hidup	38
Gambar III.15 Perkembangan Harapan Sekolah	39
Gambar III.16 Perkembangan Lama Sekolah	40
Gambar III.17 Pendapatan Per Kapita Per Tahun	41
Gambar III.18 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	42
Gambar III.19 Target dan Realisasi Penurunan Penduduk Miskin	45
Gambar III.20 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kebumen	46
Gambar III.21 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin	47
Gambar III.22 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi	50
Gambar III.23 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia	54

Gambar III.24 Perbandingan IPM Kebumen dengan Jawa Tengah dan Nasional	55
Gambar III.25 Usia Harapan Hidup Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2021	58
Gambar III.26 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – 2021	60
Gambar III.27 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – 2021	61
Gambar III.28 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional	62
Gambar III.29 Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	65
Gambar III.30 Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Kabupaten Kebumen Tahun 2015 – 2020	77
Gambar III.31 Perkembangan Penderita Covid-19	83
Gambar III.32 Perkembangan Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 Per Oktober 2022	84
Gambar III.33 Peta Zonasi Covid-19 Kabupaten Kebumen 2021	85
Gambar III.34 Pemetaan Kondisi Epidemiologi (Covid-19) Tingkat Kecamatan Kabupaten Kebumen	86
Gambar III.35 Pemetaan Kondisi Epidemiologi (Covid-19) Tingkat Desa Kabupaten Kebumen	87

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Kebumen, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan ini mencakup berbagai aspek, termasuk pertumbuhan populasi, perkembangan ekonomi, dan perubahan sosial. Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pemerintah daerah telah merumuskan berbagai kebijakan dan program pembangunan.

Salah satu aspek yang tidak dapat diabaikan dalam perencanaan pembangunan adalah kependudukan. Populasi yang terus bertambah di Kabupaten Kebumen memiliki dampak yang signifikan pada berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan infrastruktur. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kebijakan kependudukan saat ini terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah.

Selain itu, Kabupaten Kebumen juga menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah kependudukan. Adanya peraturan yang mungkin tidak selaras atau bahkan bertentangan dengan tujuan pembangunan daerah dapat menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan yang efektif.

Dalam konteks ini, permasalahan-permasalahan terkait peraturan perundang-undangan yang ada juga akan dianalisis dalam laporan ini. Hal ini penting untuk memahami hambatan dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam upaya mengintegrasikan kebijakan kependudukan dengan perencanaan pembangunan.

Contoh empiris mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam upaya mengintegrasikan kebijakan kependudukan dengan perencanaan pembangunan dapat berupa situasi berikut:

1. Hambatan dalam Alokasi Anggaran: Pemerintah daerah mungkin menghadapi kendala dalam mengalokasikan anggaran yang mencukupi untuk program-program yang terkait dengan kebijakan kependudukan, seperti program kesehatan reproduksi, pendidikan keluarga berencana, atau pemantauan pertumbuhan

populasi. Anggaran yang terbatas atau kurangnya prioritas terhadap kebijakan kependudukan dapat menghambat implementasi program-program ini dengan efektif.

2. Peraturan yang Bertentangan: Beberapa peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah, mungkin memiliki konflik atau ketidakselarasan dengan tujuan kebijakan kependudukan. Misalnya, ada peraturan yang membatasi akses keluarga berencana atau penggunaan alat kontrasepsi tertentu, yang mungkin bertentangan dengan upaya untuk mengendalikan pertumbuhan populasi. Misalnya, Pasal 481 RKUHP melarang pemberian informasi mengenai alat kontrasepsi tanpa hak, yang sebenarnya mirip dengan Pasal 534 KUHP. Pasal ini membatasi pemberian informasi hanya kepada petugas yang berwenang, mengabaikan peran masyarakat sipil dan penyuluhan kesehatan reproduksi. Hal ini tidak sesuai dengan UU Kesehatan, PP Kesehatan Reproduksi, dan UU Perkembangan Kependudukan dan Keluarga. Pasal ini menghambat partisipasi masyarakat dalam penyuluhan kesehatan reproduksi dan program-program terkait.
3. Tingkat Kesadaran dan Penerimaan Masyarakat: Kendala lain yang sering dihadapi adalah tingkat kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan kependudukan. Jika masyarakat tidak sepenuhnya memahami manfaat dari program-program ini atau jika terdapat resistensi budaya terhadap isu-isu kependudukan, implementasi program dapat terhambat.
4. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Terlatih: Pemerintah daerah mungkin mengalami kendala dalam mencari dan mempertahankan tenaga kerja yang terlatih untuk mengelola program-program kependudukan. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang ini dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dan program.
5. Kurangnya Data dan Riset Lokal: Kurangnya data yang akurat dan riset yang relevan di tingkat lokal juga bisa menjadi kendala. Informasi yang tepat tentang profil demografis daerah, tren pertumbuhan, dan kebutuhan penduduk sangat penting untuk perencanaan yang efektif.

Selain itu, laporan ini juga akan menyajikan rekomendasi-rekomendasi yang dapat membantu mengatasi permasalahan yang ditemui. Rekomendasi ini akan dirancang dengan tujuan untuk memperbaiki integrasi kebijakan kependudukan dengan

perencanaan pembangunan, sehingga Kabupaten Kebumen dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, analisis dalam laporan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara kebijakan kependudukan dan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kebumen. Selain itu, rekomendasi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemangku kebijakan dalam meningkatkan integrasi kebijakan kependudukan dengan perencanaan pembangunan, sehingga pembangunan daerah dapat berlangsung secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Laporan ini juga bertujuan untuk menganalisis integrasi kebijakan kependudukan dengan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kebumen. Dengan demikian, akan dipahami sejauh mana kebijakan kependudukan saat ini mencerminkan kebutuhan dan potensi wilayah, serta sejauh mana implementasinya telah mendukung tujuan pembangunan daerah yang lebih luas.

Pentingnya analisis ini tidak hanya terkait dengan efisiensi penggunaan sumber daya dan alokasi anggaran, tetapi juga dengan aspek kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Kebumen. Dengan memahami bagaimana kebijakan kependudukan dapat lebih terintegrasi dengan perencanaan pembangunan, pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Untuk mendukung analisis mengenai integrasi kebijakan kependudukan dengan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kebumen, kami merujuk pada data kuantitatif yang relevan. Data ini mencakup beberapa aspek yang penting untuk pemahaman konteks kebijakan dan perencanaan di tingkat daerah:

1. **Pertumbuhan Populasi:** Data pertumbuhan populasi selama beberapa tahun terakhir akan menggambarkan sejauh mana kabupaten ini menghadapi tekanan demografis dan bagaimana hal tersebut memengaruhi kebutuhan pembangunan. Data ini akan membantu menjelaskan mengapa kebijakan kependudukan menjadi penting.
2. **Angka Kelahiran dan Kematian:** Informasi mengenai angka kelahiran dan kematian juga relevan dalam konteks ini. Hal ini karena angka-angka ini mempengaruhi kebijakan

kesehatan dan pendidikan, yang keduanya merupakan bagian penting dari perencanaan pembangunan.

3. Peraturan dan Kebijakan yang Relevan: Data tentang peraturan dan kebijakan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan terkait kependudukan, akan membantu dalam mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin timbul dalam integrasi kebijakan.

Data kuantitatif ini digunakan sebagai dasar untuk menganalisis sejauh mana kebijakan kependudukan telah terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kebumen. Selain itu, data ini juga akan membantu mengidentifikasi potensi perbaikan dan rekomendasi yang tepat untuk memastikan integrasi yang lebih baik di masa depan.

1.2. Permasalahan

1. Bagaimana kebijakan kependudukan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kebumen?
2. Permasalahan-permasalahan apa saja yang ditemui berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada?
3. Rekomendasi apakah yang diperlukan dalam mengintegrasikan kebijakan kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan daerah

1.3 Tujuan Analisis

Tujuan analisis dampak kependudukan adalah untuk memahami konsekuensi pertumbuhan dan perubahan populasi pada berbagai aspek sosial, ekonomi, dan kebijakan di suatu wilayah atau daerah tertentu. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari analisis dampak kependudukan:

1. Mengidentifikasi Tren Pertumbuhan Penduduk: Analisis ini membantu dalam memantau dan memahami tren pertumbuhan penduduk, termasuk angka kelahiran, angka kematian, dan migrasi. Ini membantu dalam perencanaan jangka panjang.
2. Evaluasi Struktur Demografi: Mengidentifikasi komposisi usia, jenis kelamin, dan distribusi geografis penduduk. Ini membantu dalam memahami profil demografis

penduduk dan mengidentifikasi kelompok yang mungkin memerlukan perhatian khusus.

3. Dampak Terhadap Pendidikan: Menganalisis bagaimana pertumbuhan penduduk memengaruhi sektor pendidikan, termasuk kebutuhan akan fasilitas pendidikan, guru, dan tingkat partisipasi pendidikan.
4. Dampak Terhadap Kesehatan: Menilai dampak pertumbuhan penduduk pada sistem kesehatan, termasuk akses ke fasilitas kesehatan, sumber daya medis, dan kesejahteraan kesehatan penduduk.
5. Dampak Ekonomi: Menganalisis bagaimana pertumbuhan penduduk mempengaruhi sektor ekonomi, lapangan kerja, pengangguran, dan kemiskinan. Hal ini juga melibatkan penilaian terhadap kontribusi ekonomi dari berbagai kelompok usia.
6. Rekomendasi Kebijakan: Tujuan analisis dampak kependudukan juga meliputi memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengelola dampak dan memanfaatkan peluang yang muncul.

Tujuan dari analisis dampak kependudukan adalah untuk memberikan wawasan yang mendalam dan informasi yang dibutuhkan bagi pengambil kebijakan, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membuat keputusan yang tepat dalam menghadapi perubahan dalam jumlah penduduk dan struktur demografi.

1.5. Metode

Kajian ini dilakukan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Alasan dilakukan kajian dampak kependudukan di Kabupaten Kebumen ini adalah (1) Kabupaten Kebumen merupakan daerah yang tidak mencapai tahap bonus demografi karena *ageing population* justru terjadi dimana usia non-produktif lebih banyak daripada usia produktif dan (2) Kabupaten Kebumen memiliki 26 kecamatan, 11 kelurahan dan 449 desa. Jumlah tersebut memungkinkan untuk melakukan pola demografi atau kependudukan dan juga variasi masalahnya.

Kajian ini didesain dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Adapun desainnya adalah *explanatory sequential method*, yaitu memposisikan metode kuantitatif

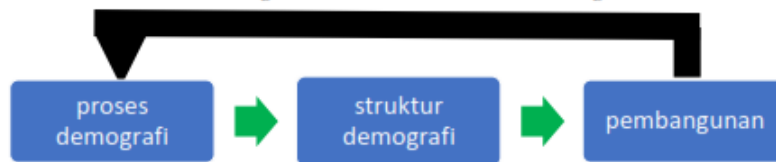
sebagai metode pokok yang dilakukan pada tahap pertama, kemudian disusul dengan kajian kualitatif untuk memperdalam isu-isu yang muncul dari hasil analisis pada tahap pertama. Metode kualitatif juga digunakan untuk penyusunan solusi strategis. Untuk metode kuantitatif digunakan metode analisis statistik dan untuk kualitatif akan digunakan fenomenologi.

Kajian dilakukan dengan melakukan analisis data sekunder. Data yang digunakan berasal BPS Kebumen, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen, Dinas Kesehatan, di antaranya hasil proyeksi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, indikator fertilitas (TFR) indikator mortalitas/kesehatan, indikator migrasi, indikator kualitas penduduk, indikator kemiskinan (angka kemiskinan, dan angka pengangguran terbuka), dan indikator kesejahteraan (Indeks Pembangunan Manusia).

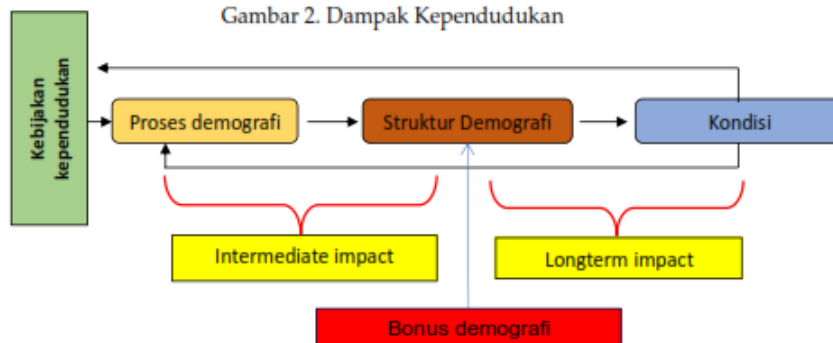
1.6. Kerangka Konsep

Kerangka konsep yang digunakan dalam kajian ini berdasar pada konsep hubungan antara penduduk dan pembangunan (Gambar 1). Gambar 1 menjelaskan hubungan antara penduduk dan pembangunan bersifat timbal balik (*reciprocal*). Di satu pihak proses demografi (kelahiran, kematian dan migrasi) akan mempengaruhi struktur demografi. Perubahan struktur demografi akan mempengaruhi variabel pembangunan (sosial, ekonomi, politik, lingkungan). Sementara itu, di pihak lain, perubahan yang terjadi pada variabel pembangunan akan mempengaruhi proses demografi.

Gambar 1. Hubungan antara Penduduk dan Pembangunan



Gambar 2. Dampak Kependudukan

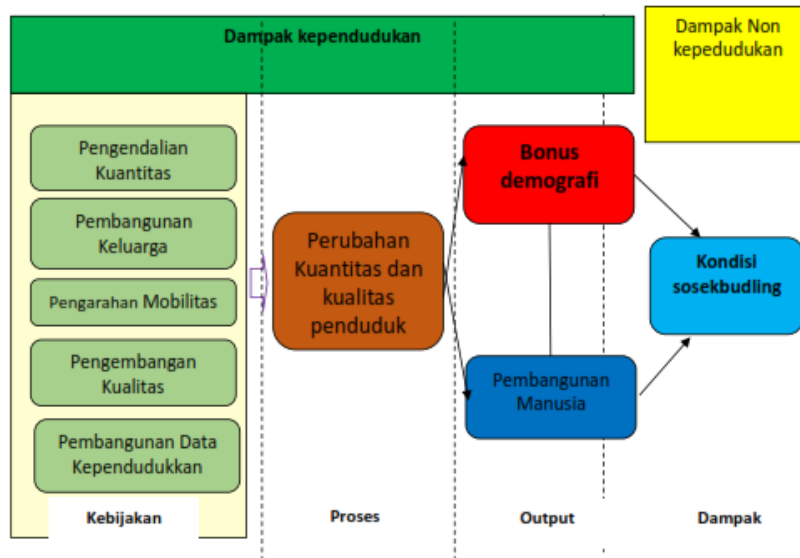


Sumber : Sumini & Sukamdi (2019:5).

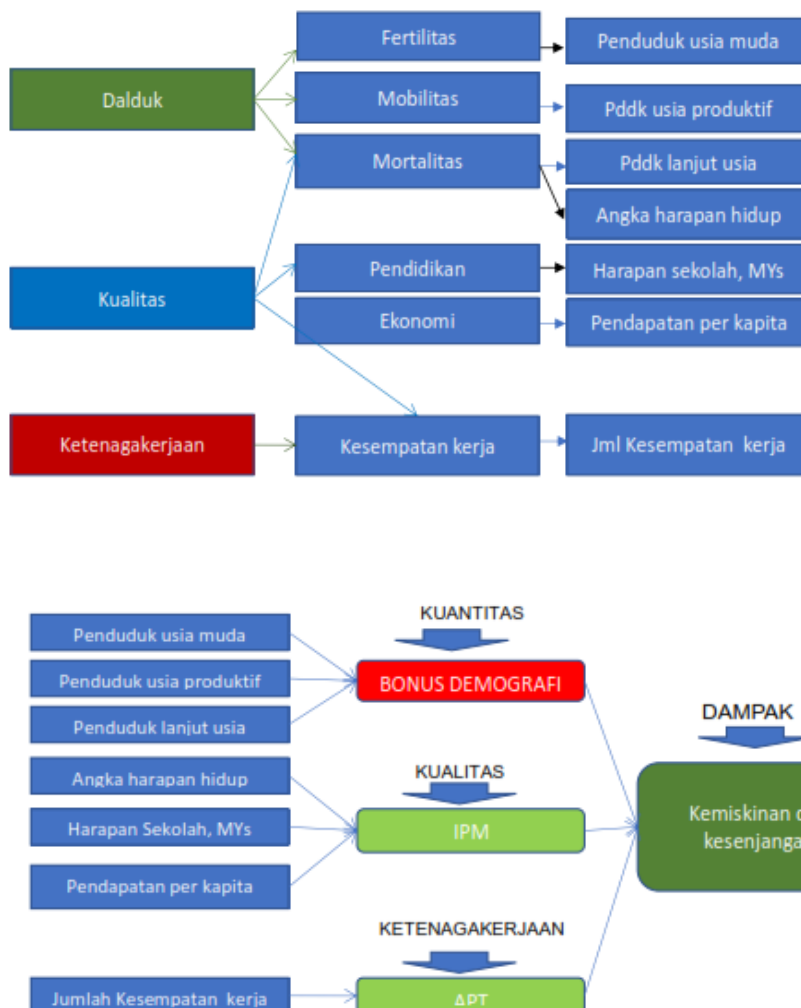
Analisis dampak kependudukan yang digunakan dalam kajian ini menggunakan asumsi bahwa dampak kependudukan memberikan pengaruh terhadap kondisi sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Gambar tersebut menunjukkan bahwa perubahan proses demografi terjadi sebagai akibat dari kebijakan kependudukan. Sementara itu, perubahan variabel pembangunan menjadi input bagi penyusunan dan implementasi kebijakan kependudukan. Kajian ini lebih fokus pada kebijakan pengendalian penduduk, meskipun tidak dapat dipungkiri, bahwa sebenarnya hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari jenis kebijakan penduduk yang lain.

Dalam penerapannya, kerangka di atas dapat dijabarkan lebih detail dan disesuaikan dengan rujukan normatif jenis kebijakan kependudukan di Indonesia, seperti terlihat pada Gambar 3. Kebijakan kependudukan dijabarkan ke dalam lima jenis kebijakan, seperti yang tercantum dalam *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK), yaitu pengendalian kuantitas penduduk, pembangunan keluarga, pengarahannya mobilitas, pengembangan kualitas, dan pembangunan data kependudukan. Kebijakan tersebut akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas penduduk. Untuk kuantitas, perubahannya tercermin pada pencapaian bonus demografi, sementara pengembangan kualitas akan terlihat pada perubahan pembangunan manusia. Dalam rangka memahami pemanfaatan bonus demografi, selain dua aspek tersebut juga akan dikaji tentang output dari kebijakan ketenagakerjaan (lihat Gambar 4).

Gambar 3. Hubungan antara kebijakan kependudukan dan dampak kependudukan



Gambar 4. Penjabaran masing-masing komponen



Sumber : Sumini & Sukamdi (2019:7).

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN

2.1. Gambaran Umum Wilayah

Kabupaten Kebumen terletak antara 109°33'-109°50' Bujur Timur dan 7°27'-7°50' Lintang Selatan. Luas Kabupaten Kebumen sebesar 128.111,50 ha atau 1.281,115 km² atau 3,91% dari luas Provinsi Jawa Tengah yang merupakan daerah pantai dan perbukitan, dan sebagian besar merupakan dataran rendah.

Letak Kabupaten Kebumen berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara di sebelah utara, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo di sebelah Timur, Samudera Hindia di sebelah selatan, dan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap di sebelah barat. Secara administratif Kabupaten Kebumen terdiri dari 26 Kecamatan, 449 desa dan 11 kelurahan dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 1.930 dan 7.127 Rukun Tetangga (RT).

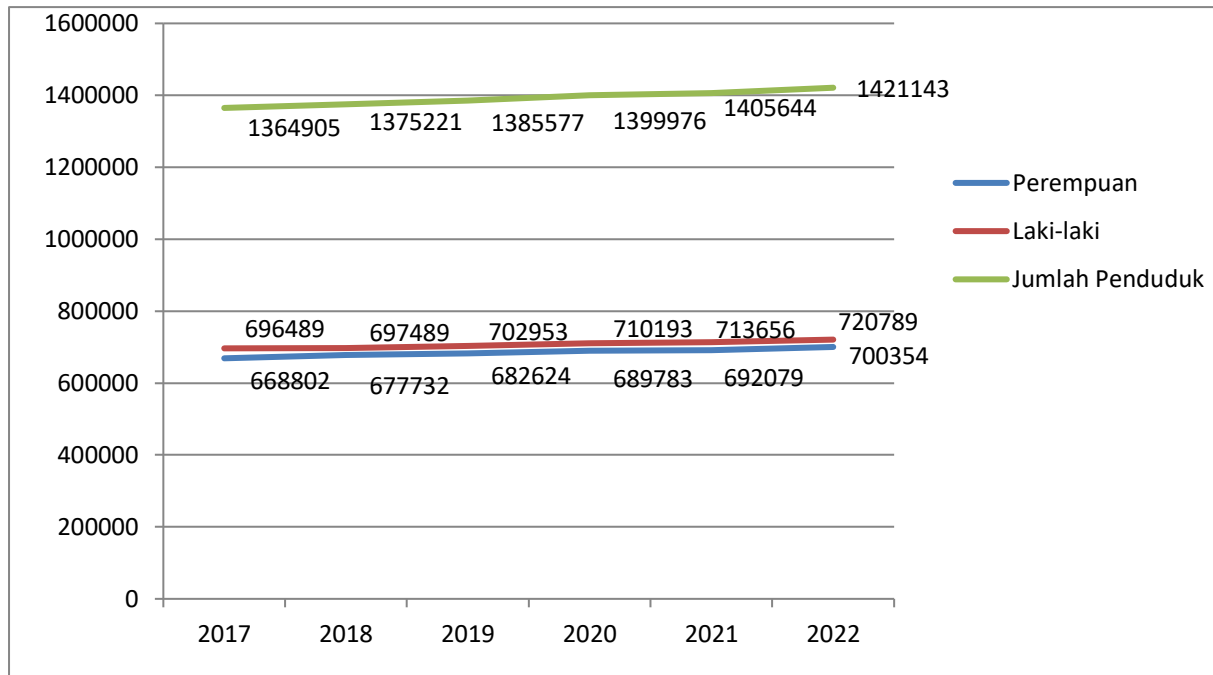
Kecamatan terluas adalah Kecamatan Karanggayam dengan total luas 109,29 km² atau 8,53% dan Kecamatan Sempor dengan luas 100,15 km² atau 7,82% dari keseluruhan luas Kabupaten Kebumen. Keduanya berada di bagian utara Kabupaten Kebumen. Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Gombong, yaitu 19,48 km² atau setara dengan 1,52% dari keseluruhan luas Kabupaten Kebumen.

2.2. Aspek Demografi

Secara internal jumlah penduduk yang tinggi tersebar secara tidak merata antar kecamatan. Konsentrasi penduduk yang rendah sangat sulit untuk menarik tumbuhnya aktivitas ekonomi. Seiring dengan pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dapat diproyeksikan berdampak terhadap semakin terkonsentrasinya distribusi kepadatan penduduk hanya di pusat pertumbuhan dan aktivitas ekonomi sosial sehingga ketimpangan pertumbuhan ekonomi tidak terelakan.

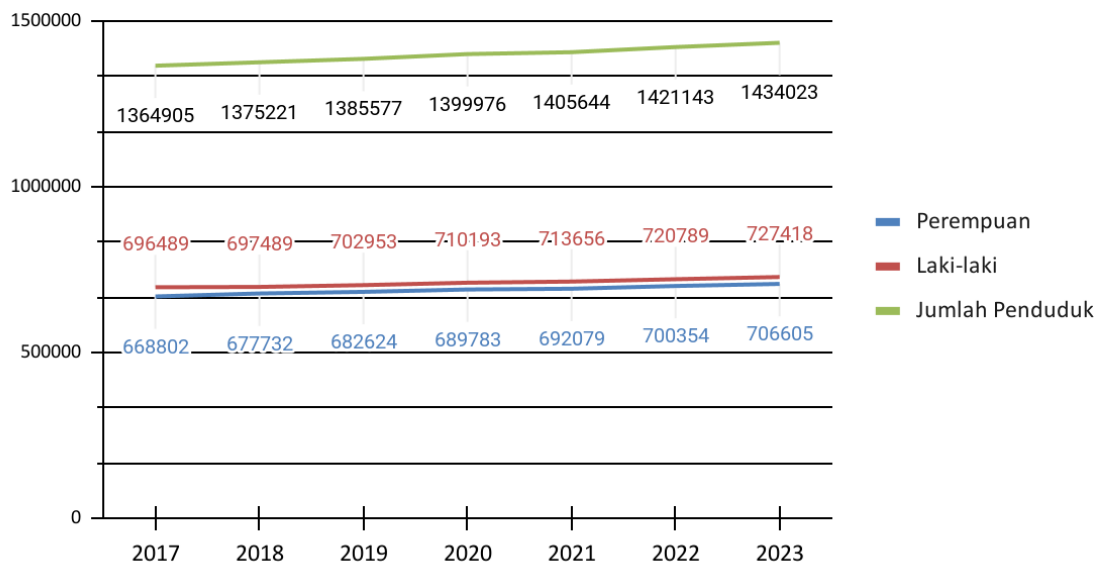
Gambar 2.1

Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2022



Sumber: Disdukcapil Kab. Kebumen, 2021

Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2023



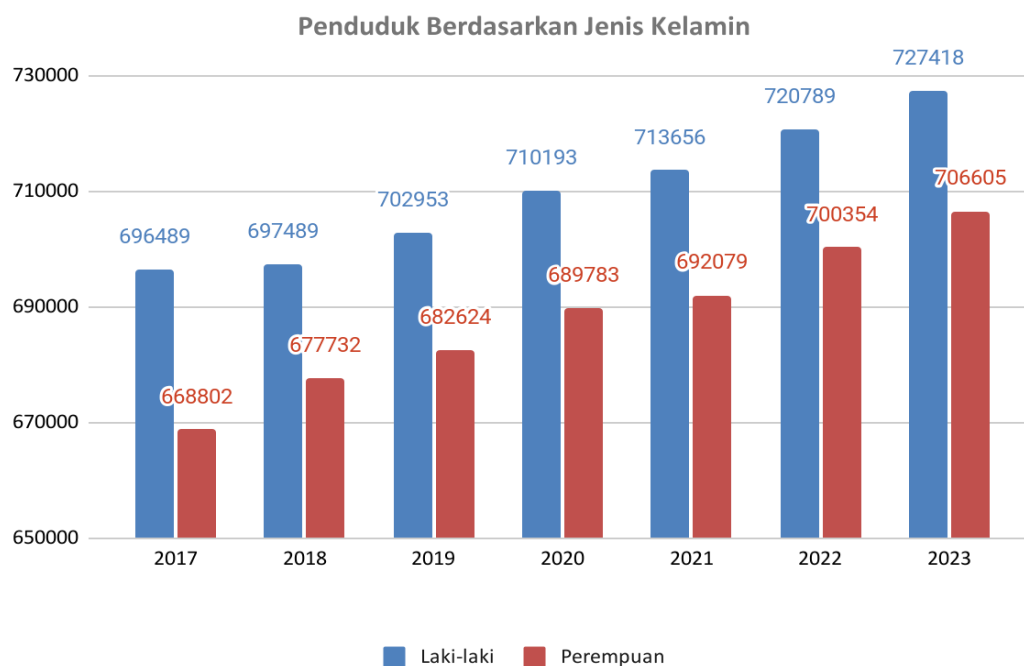
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, 2023

Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 tercatat sebanyak 1.434.023 jiwa, dengan laju tumbuh sebesar 0,90% dari tahun 2022. Dari aspek gender,

jumlah laki-laki (50,73%) masih lebih banyak daripada perempuan (49,27%). Jumlah laki-laki lebih besar sebanyak 2,87% daripada perempuan. Jumlah rumah tangga sebanyak 415.142 rumah tangga, sehingga rata-rata jumlah jiwa per rumah tangga sebesar 3 jiwa dan kepadatan penduduk Kabupaten Kebumen sebesar 1.119,35 jiwa/km². Jumlah penduduk yang paling padat ditempati Kecamatan Kebumen dengan jumlah penduduk tahun 2023 sebesar 136.446 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk 0,81%. Jumlah penduduk yang paling kecil di Kecamatan Padureso dengan jumlah penduduk 17.457 jiwa dengan pertumbuhan penduduk 0,98%.

Gambar II.2

Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018-2013

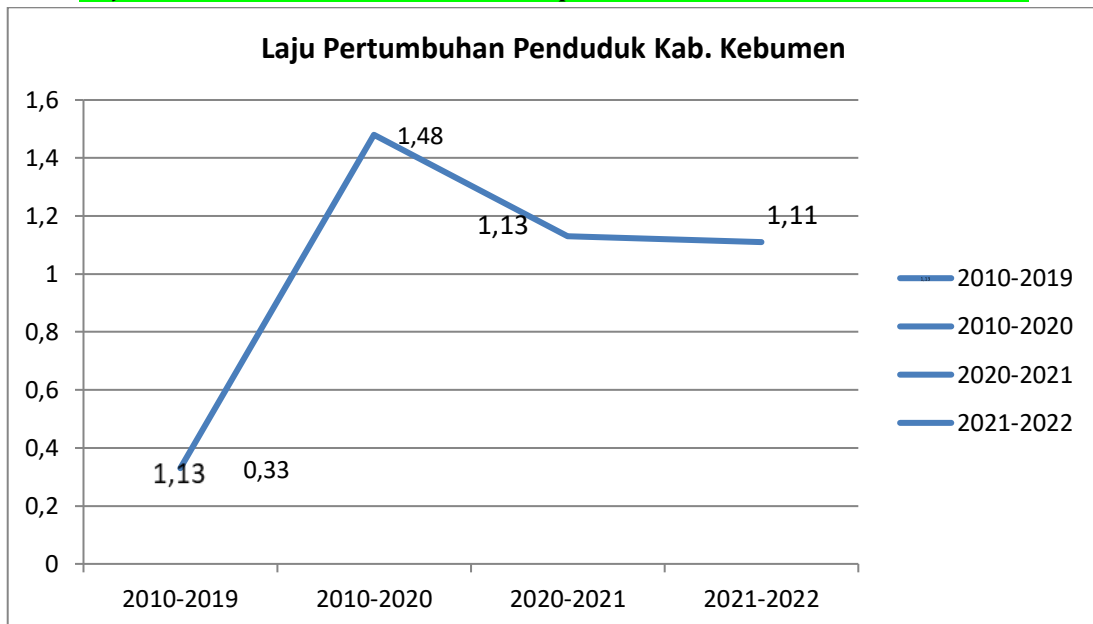


Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, 2023

Dilihat dari jenis kelamin, pada tahun 2023 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 727.418 jiwa dan perempuan sebanyak 706.605 jiwa. Selisih antara penduduk laki-laki dan perempuan adalah 20.813, yang berarti sex ratio sebesar 102,95, artinya tiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 103 penduduk laki-laki. Dengan demikian, komposisi penduduk perempuan 2,95 persen lebih sedikit dibanding penduduk laki-laki.

Gambar II.31

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2022



Sumber : BPS Jawa Tengah



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2023

Tabel II.1

Penduduk Kabupaten Kebumen menurut Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Kecamatan		Jumlah Penduduk Sekarang		Jumlah Penduduk TahunSebelum		Angka Pertumbuhan Penduduk
	Kode	Nama	N	%	N	%	
1	33.05.01	Ayah	68.007	4,74%	67.371	4,74%	0,94%
2	33.05.02	Buayan	69.528	4,85%	68.727	4,84%	1,15%
3	33.05.03	Puring	66.857	4,66%	66.112	4,65%	1,11%
4	33.05.04	Petanahan	63.433	4,42%	62.689	4,41%	1,17%
5	33.05.05	Klirong	67.129	4,68%	66.341	4,67%	1,17%
6	33.05.06	Buluspesantren	61.890	4,32%	61.236	4,31%	1,06%
7	33.05.07	Ambal	66.327	4,63%	65.603	4,62%	1,09%
8	33.05.08	Mirit	56.283	3,92%	55.663	3,92%	1,10%
9	33.05.09	Prembun	30.160	2,10%	29.808	2,10%	1,17%
10	33.05.10	Kutowinangun	50.189	3,50%	49.827	3,51%	0,72%
11	33.05.11	Alian	70.726	4,93%	70.093	4,93%	0,90%
12	33.05.12	Kebumen	136.446	9,51%	135.338	9,52%	0,81%
13	33.05.13	Pejagoan	57.627	4,02%	56.980	4,01%	1,12%
14	33.05.14	Sruweng	64.246	4,48%	63.861	4,49%	0,60%
15	33.05.15	Adimulyo	39.053	2,72%	38.800	2,73%	0,65%
16	33.05.16	Kuwarsan	53.252	3,71%	52.765	3,71%	0,91%

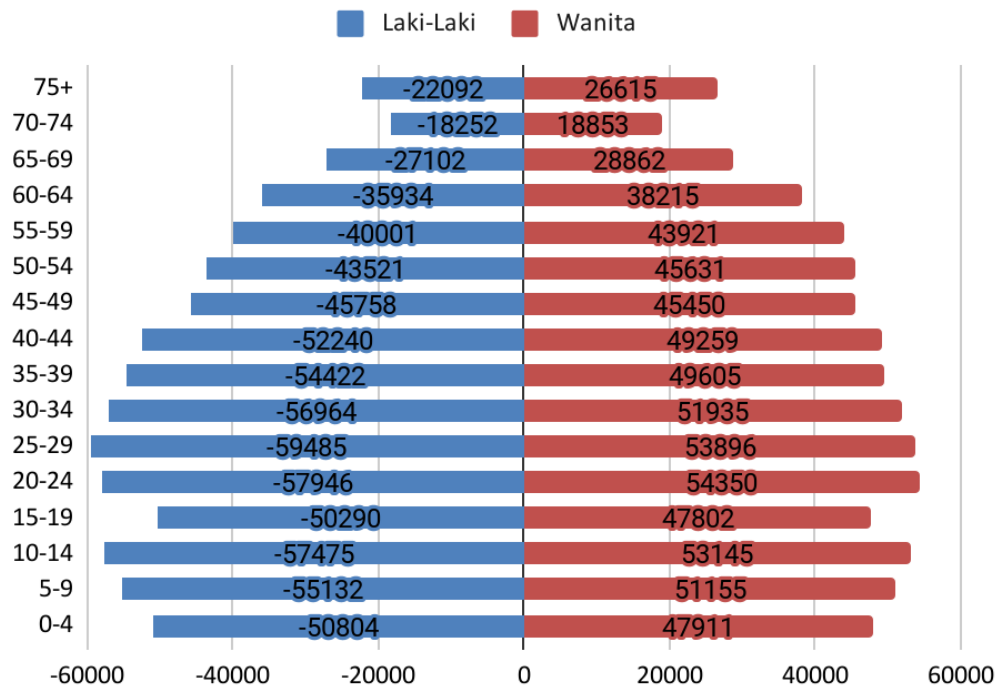
17	33.05.17	Rowokele	53.832	3,75%	53.413	3,76%	0,78%
18	33.05.18	Sempor	72.871	5,08%	72.509	5,10%	0,50%
19	33.05.19	Gombong	50.707	3,54%	50.474	3,55%	0,46%
20	33.05.20	Karanganyar	38.560	2,69%	38.427	2,70%	0,34%
21	33.05.21	Karanggayam	62.700	4,37%	62.205	4,38%	0,79%
22	33.05.22	Sadang	24.068	1,68%	23.928	1,68%	0,58%
23	33.05.23	Bonorowo	22.691	1,58%	22.503	1,58%	0,83%
24	33.05.24	Padureso	17.457	1,22%	17.286	1,22%	0,98%
25	33.05.25	Poncowarno	19.624	1,37%	19.418	1,37%	1,05%
26	33.05.26	Karangsambung	50.360	3,51%	49.766	3,50%	1,18%
Jumlah			1.434.023	100,00%	1.421.143	100,00%	0,90%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, 2023

Gambar II.4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Piramida Penduduk Kabupaten Kebumen 2023



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, 2023

Komposisi penduduk berdasarkan usia di Kabupaten Kebumen pada tahun 2022

didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) dengan jumlah sebesar 963.596 jiwa atau 68,34 persen, sedangkan jumlah penduduk tidak produktif (0-14 dan di atas 64 tahun) sebesar 446.355 jiwa atau 31,72 persen. Dari data tersebut maka rasio ketergantungannya pada 2021 adalah sebesar 46,32 persen dan angka ini menunjukkan sedikit peningkatan dibandingkan pada 2021 yaitu sebesar 45,38 persen (lihat Tabel II.2). Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 46-47 orang yang tidak produktif. Kabupaten Kebumen berpeluang mendapatkan bonus demografi karena angka ketergantungannya masih dibawah 50 persen. Namun demikian, kondisi kependudukan di Kabupaten Kebumen yang akan memasuki *ageing population* dapat menjadi kondisi yang menghambat peluang bonus demografi apabila proporsi penduduk usia tidak produktif di suatu daerah mengalami peningkatan secara progresif.

Komposisi penduduk berdasarkan usia di Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) dengan jumlah sebesar 976.625 jiwa atau 68,10 persen, sedangkan jumlah penduduk tidak produktif (0-14 dan di atas 64

tahun) sebesar 457.398 jiwa atau 31,90 persen. Dari data tersebut, rasio ketergantungannya pada 2023 adalah sebesar 46,83 persen, dan angka ini menunjukkan sedikit peningkatan dibandingkan pada 2022, yaitu sebesar 46,32 persen. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 46-47 orang yang tidak produktif. Kabupaten Kebumen berpeluang mendapatkan bonus demografi karena angka ketergantungannya masih di bawah 50 persen. Namun demikian, kondisi kependudukan di Kabupaten Kebumen yang akan memasuki ageing population dapat menjadi kondisi yang menghambat peluang bonus demografi apabila proporsi penduduk usia tidak produktif di suatu daerah mengalami peningkatan secara progresif.

Disamping itu ada beberapa kriteria terkait dengan bonus demografi, yaitu:

1. Pertumbuhan penduduk usia kerja harus disesuaikan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
2. Penduduk usia kerja bisa diserap oleh pasar kerja yang tersedia.
3. Tersedia lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja.

Apabila ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akan terjadi beban demografi yang bisa meningkatkan jumlah pengangguran.

Tabel II.2.

Angka Beban Ketergantungan

Jumlah Penduduk dan Angka Beban Tanggungan Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Produktif dan Nonproduktif Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
1	0-14 tahun	164.813	153.136	317.949
2	15-64 tahun	488.843	474.753	963.596
3	Lebih dari 65 tahun	61.628	66.778	128.406
Jumlah		715.284	694.667	1.409.951
Angka Beban Tanggungan		46,32	46,32	46,32

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen, 2022

Jumlah Penduduk dan Angka Beban Tanggungan Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Produktif dan Nonproduktif Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Usia	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki dan Perempuan
1	0-14 tahun	163.411	152.211	315.622
2	15-64 tahun	496.561	480.064	976.625
3	Lebih dari 65 tahun	67.446	74.330	141.776
Jumlah		727.418	706.605	1.434.023
Angka Beban Tanggungan		46,49	47,19	46,83

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, 2023

Angka ketergantungan di Kabupaten Kebumen tergolong tinggi karena masih diatas 41. Dari pengelompokan jenis kelamin, angka ketergantungannya juga masih relatif tinggi. Dengan demikian, tanggungan suatu kelompok usia produktif atas usia kelompok non-produktif masih cukup besar. Situasi ini berdampak besar terhadap kemajuan daerah. Semakin tinggi rasio beban ketergantungan terhadap penduduk yang tidak produktif, maka situasi ini akan menghambat akselerasi pembangunan. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi jangka panjang cenderung lebih rendah.

Penduduk merupakan subjek sekaligus objek dari pembangunan sesuai dengan konsep pembangunan berwawasan kependudukan. Pembangunan disesuaikan dengan potensi dan kondisi kependudukan di suatu daerah. Arah kebijakan pembangunan manusia berorientasi pada penyiapan SDM unggul selaras dengan kebijakan nasional menuju Indonesia Maju. SDM unggul yaitu SDM yang memiliki kompetensi, soft skill, dan berkarakter.

BAB III

PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KEBUMEN

Pelaksanaan kebijakan kependudukan di Kabupaten Kebumen hingga saat ini belum maksimal, terutama jika dilihat dari sisi kuantitas penduduk. Hal ini terlihat dari laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kebumen yang masih mencapai 1,48 % atau 190.512 jiwa selama periode 2010-2022, dimana pada tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Kebumen mencapai 1.159.926 dan pada tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Kebumen telah mencapai 1.421.143 jiwa bersumber dari Disdukcapil Kabupaten Kebumen. Selain itu angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR) masih berada lebih dari 2,35 % (naik 0,25 %) yang artinya belum diarahkan atau dikendalikan secara optimal. TFR di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016 berada pada kisaran 2,35 % menurut BPS Kabupaten Kebumen merupakan masalah strategis yang perlu ditindaklanjuti Bersama (<https://satudata.kebumenkab.go.id/index.php/web/detailcari/13131>).

Jika hal ini tidak dicermati secara seksama, dikhawatirkan tujuan kebijakan pembangunan kependudukan dari sisi kuantitatif untuk mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) tidak dapat dicapai, bahkan bukan hanya target yang telah dicanangkan tidak dapat dicapai, tetapi perubahan tersebut akan menimbulkan masalah baru, baik di bidang kependudukan maupun masalah pembangunan pada umumnya.

Pertumbuhan penduduk yang meningkat dapat merupakan salah satu hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan secara luas. Sebagai salah satu ilustrasi, perubahan jumlah penduduk akan mempengaruhi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sektor lainnya, misalnya penyediaan kebutuhan dasar manusia, yaitu sandang, pangan dan papan. Ketersediaan pangan yang tidak terpenuhi akibat dari peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkontrol menjadikan kekhawatiran yang sangat serius bagi kelangsungan hidup penduduk. Oleh karena itu, aspek kependudukan merupakan aspek penting dalam pembangunan dan tidak dapat diabaikan.

Terkait dengan isu ketahanan pangan, alih fungsi lahan pertanian di Kebumen, yang mencapai dua hektare per tahun, dan ini tentu memengaruhi kondisi lingkungan dan kehidupan sosial-ekonomi penduduk. Meski demikian, lahan hijau yang beralih fungsi masih dianggap berada dalam ambang batas wajar.

Namun demikian, alih fungsi lahan pertanian menjadi fungsi lainnya memberikan potensi dampak di berbagai bidang. Beberapa dampak yang bisa terjadi adalah sebagai berikut:

1. Dampak Terhadap Pertanian:

Alih fungsi lahan pertanian dalam jumlah signifikan dapat berdampak pada produksi pangan dan pertanian lokal. Hal ini mungkin mengarah pada penurunan produksi pangan lokal, yang dapat mempengaruhi ketersediaan makanan dan harga pangan di Kabupaten Kebumen. Analisis dapat mencakup perbandingan antara lahan pertanian yang hilang dan produksi pangan.

2. Dampak Terhadap Kebijakan Pertanian:

Perubahan dalam penggunaan lahan pertanian dapat memerlukan peninjauan kembali kebijakan pertanian yang ada. Diperlukan analisis untuk menentukan apakah kebijakan saat ini cukup fleksibel untuk mengatasi perubahan dalam penggunaan lahan dan apakah ada kebijakan yang mendukung diversifikasi ekonomi di sektor pertanian.

3. Dampak Terhadap Pekerjaan:

Alih fungsi lahan pertanian juga dapat mempengaruhi lapangan kerja di sektor pertanian. Pemantauan atas ketersediaan pekerjaan dalam sektor lain dan tingkat pengangguran dapat membantu mengidentifikasi dampak pada tingkat pengangguran dan stabilitas ekonomi.

4. Dampak Terhadap Lingkungan:

Meskipun luas lahan yang beralih fungsi masih dianggap dalam ambang batas wajar, tetap perlu memantau dampak lingkungan. Diperlukan analisis untuk memahami dampak terhadap keragaman hayati, kualitas udara, dan peningkatan risiko bencana seperti banjir dan longsor.

5. Dampak Terhadap Kualitas Hidup Penduduk:

Analisis harus mencakup dampak pada kualitas hidup penduduk secara umum. Pertimbangkan bagaimana perubahan dalam penggunaan lahan dapat memengaruhi

ketersediaan ruang terbuka hijau, akses ke sumber daya alam, dan kualitas lingkungan hidup.

Isu strategis lainnya yang terkait dengan perkembangan kuantitas penduduk di Kabupaten Kebumen adalah perubahan komposisi penduduk, khususnya menurut umur. Dengan tren perubahan komposisi penduduk menurut umur di masa lalu, diperkirakan Kabupaten Kebumen tidak mendapatkan *windows of opportunity*, sehingga jika pengelolaan kuantitas penduduk, khususnya fertilitas, dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka Kabupaten Kebumen perlu untuk mengakselerasi percepatan pencapaian tujuan pembangunan di Kebumen.

Tahap *windows of opportunity* ditandai dengan angka ketergantungan yang rendah yaitu di bawah 41%. Dalam perkembangan perubahan komposisi penduduk menurut umur kondisi tersebut ditandai dengan besarnya jumlah penduduk usia produktif, menurunnya jumlah penduduk usia anak-anak, dan meningkatnya jumlah penduduk lansia. Tahap ini merupakan kesempatan yang hanya datang sekali dan harus direspons dengan kebijakan yang memadai agar *opportunity* berubah menjadi bonus demografi. Jika tahap ini terjadi dan tidak ada intervensi yang tepat, maka kesempatan tersebut akan berubah menjadi bencana. Kondisi kependudukan di Kabupaten Kebumen dalam tahapan ini dinyatakan tidak mendapatkan bonus demografi justru memasuki masa "*ageing population*" dimana usia non produktif lebih banyak dari usia produktif, dengan jumlah penduduk tahun 2022 berdasarkan data dari BPS sebanyak 1.421.143 jiwa yang terdiri atas 720.789 jiwa penduduk laki-laki dan 700.354 jiwa penduduk perempuan. Sementara jumlah penduduk usia 60 tahun ke atas atau lanjut usia (lansia) di Kabupaten Kebumen sebanyak 123.101 orang. Jumlah ini jauh melebihi angka kelahiran di Kabupaten Kebumen, yakni rata-rata 20.000 per tahun.

Sedangkan cakupan pelayanan umum untuk penduduk lansia baru mencapai 35 persen atau 67.907 orang. Hal ini dikarenakan tingginya Angka Harapan Hidup (AHH) yakni mencapai 73,70 tahun, bertambah 0,59 tahun bila dibandingkan AHH tahun 2021 (73,11 tahun) (<https://kebumenkab.bps.go.id/indicator/26/111/1/indeks-pembangunan-manusia-metode-baru-.html>). Dengan demikian, usia harapan hidup penduduk Kabupaten Kebumen bertambah menjadi 7,08 bulan pada tahun 2022.

AHH adalah angka yang menunjukkan perkiraan usia seseorang yang dihitung sejak dilahirkan dan merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk

umumnya dan kesehatan pada khususnya. Kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Kebumen secara umum semakin membaik berdasarkan rata harapan hidup yang semakin panjang. AHH naik dari 72,67 pada tahun 2014, 72,77 pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 72,87 tahun pada tahun 2016. Namun demikian, pada tahun 2022 usia harapan hidup meningkat menjadi 73,70 tahun. Angka ini menunjukkan secara rata-rata penduduk yang dilahirkan di Kabupaten Kebumen dapat bertahan hidup hingga usia 73-74 tahun, meskipun jumlahnya lebih banyak daripada jumlah balita. Saat ini di Kabupaten Kebumen penduduk yang memasuki pra lansia (usia 45-59 tahun) sebanyak 247.639 (2022), turun 27,74 persen dibandingkan tahun sebelumnya (2021). Kenaikan AHH menunjukkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kebumen yang dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat, pelayanan kesehatan, serta genetika/keturunan. Upaya-upaya yang diperlukan dan terus dilakukan untuk meningkatkan AHH di antaranya pemugaran RTLH dan peningkatan sanitasi (pemenuhan kebutuhan air bersih, jamban sehat bagi keluarga), perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), peningkatan keterampilan tenaga kesehatan, dan pendampingan kesehatan ibu dan anak.

Selain itu, berdasarkan pemeriksaan terhadap puluhan ribu warga di 26 kecamatan di Kebumen, Tim Penanggulangan HIV/AIDS Kabupaten Kebumen sejak Januari sampai Oktober 2022 berhasil mengindikasikan ada 152 penderita baru HIV/AIDS. Berdasarkan proporsi kelompok umur sebesar 0,7 persen pada kelompok umur < 1 tahun dan 4-14 tahun. Sedangkan proporsi tertinggi pada kelompok umur 25-49 tahun sebesar 67,1 persen. Berikut proporsi kelompok umur kasus baru AIDS di kabupaten kebumen tahun 2022.

Gambar III.1.
Kasus HIV Baru menurut Kelompok Umur



Bila dilihat berdasarkan umur maka penderita HIV dapat menimpa umur dari usia dini hingga umur tua. Penderita HIV terbanyak yaitu umur 25-49 tahun sebesar 70,5 %. Persentase orang dengan risiko HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di Kabupaten Kebumen sebesar 100%.

Berdasarkan jenis kelamin, kasus baru AIDS pada laki-laki lebih tinggi yaitu 79,6% dari total kasus baru AIDS dan pada perempuan 20,4% dari total kasus baru AIDS. Kasus HIV AIDS merupakan fenomena gunung es, artinya kasus yang dilaporkan hanya sebagian. Artinya, kasus yang dilaporkan hanya sebagian kecil dari yang ada di masyarakat. Ada kemungkinan masih banyak kasus yang belum ditemukan karena orang-orang yang berperilaku risiko tinggi tidak semuanya mau memeriksakan diri sehingga status HIV-nya tidak bisa diketahui.

Diantara 76 orang penderita baru, 50 orang adalah laki-laki dan 26 orang adalah perempuan serta tercatat diantaranya 9 orang adalah ibu hamil. Bahkan berdasarkan data yang disampaikan oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Kebumen, angka penemuan kasus AIDS pada 2021 di Kebumen masih tertinggi di Jawa Tengah. Di tahun 2021 angka penemuan kasus HIV itu Kebumen nomor 3 se Jateng dengan **130 kasus**.

Kasus HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen bisa disebut sudah pada tahap mengkhawatirkan. Di tahun 2022 lalu, kasus HIV-Aids sudah mencapai 1.901. Dari sisi persebarannya malah lebih mengkhawatirkan lagi. Hal ini didasarkan pada data bahwa

dari 1.901 jumlah kasus HIV-Aids itu terdapat pelajar dan mahasiswa (<https://www.kebumenekspres.com/2023/03/puluhan-pelajar-kebumen-terpapar-hiv.html>).

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kebumen, sejak tahun 2003 hingga Oktober 2019, jumlah ibu rumah tangga dan warga usia produktif berada di rentang usia 30-34 tahun (279 orang), kemudian 25-29 tahun (227 orang_ dan 35-39 tahun (223 orang). Selain hal tersebut di atas, berdasarkan hasil penelitian melalui Riset Unggulan Daerah, angka HIV/AIDS juga dipengaruhi dari fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) yang diestimasikan sebanyak 2.000 orang dan sebagian besar terdiri dari siswa SMP-SMA. Hal ini dikarenakan cepatnya arus globalisasi yang cepat menyebar melalui perkembangan teknologi dalam bentuk sosial media yang mudah mempengaruhi remaja dalam lingkungan.

Belum adanya Grand Design Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Kebumen yang merupakan arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan guna tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa.

Guna mencapai hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maka memandang perlu untuk menyusun Analisa Dampak Kependudukan guna penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan serta *Roadmap* Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Kebumen.

BAB IV

PERMASALAHAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

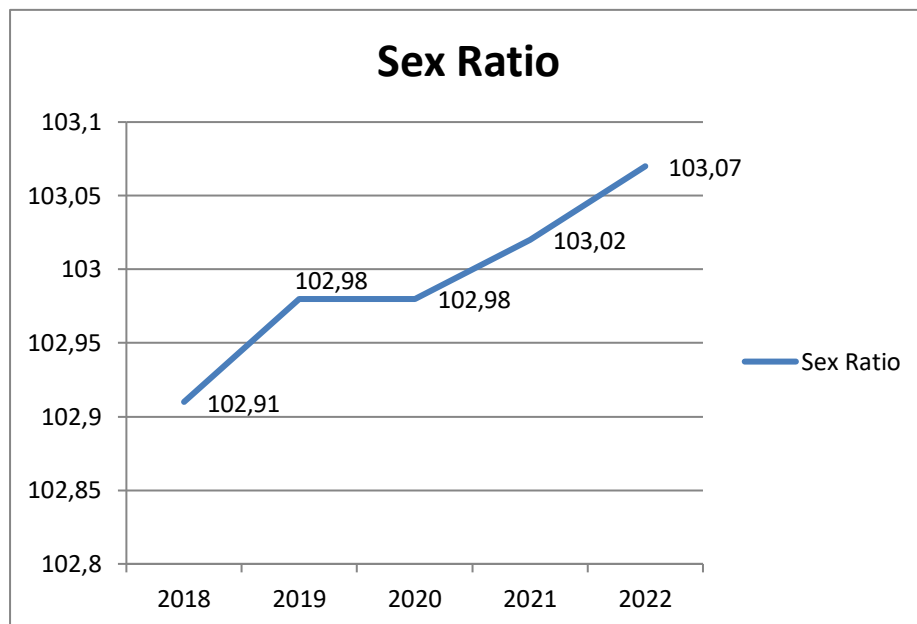
3.1. Permasalahan Kependudukan

Kabupaten Kebumen terdiri dari 26 Kecamatan yang terbagi dalam wilayah pegunungan, wilayah kota dan wilayah pesisir. Secara internal jumlah penduduk yang tinggi tersebar secara tidak merata antar kecamatan. Konsentrasi penduduk yang rendah sangat sulit untuk menarik tumbuhnya aktivitas ekonomi. Seiring dengan pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dapat diproyeksikan berdampak terhadap semakin terkonsentrasinya distribusi kepadatan penduduk hanya di pusat pertumbuhan dan aktivitas ekonomi sosial sehingga ketimpangan pertumbuhan ekonomi tidak terelakan. Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 tercatat sebanyak 1.421.143 jiwa, tumbuh sebesar 1,03 % dari tahun 2021. Jumlah rumah tangga sebanyak 325.963 rumah tangga, sehingga rata-rata jumlah jiwa per rumah tangga sebesar 4 jiwa dan kepadatan penduduk Kabupaten Kebumen turun sebesar 2,6 % dari 1.082 jiwa/km² pada 2020 menjadi 1.054 jiwa/km² pada tahun 2021. Jumlah penduduk yang paling padat ditempati Kecamatan Kebumen dengan jumlah penduduk tahun 2021 sebesar 124.090 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk 0,42% per tahun. Jumlah penduduk yang paling kecil di Kecamatan Padureso dengan jumlah penduduk 13.417 jiwa dengan pertumbuhan penduduk 0,14%. Sedangkan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kebumen tahun 2021-2022 sebesar 1,03%. Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 tercatat sebanyak 1.421.143 jiwa, tumbuh sebesar 1,03% dari tahun 2021. Jumlah rumah tangga sebanyak 32.177 rumah tangga (data BPS tahun 2021), sehingga rata-rata jumlah jiwa per rumah tangga sebesar 3 jiwa dan kepadatan penduduk Kabupaten Kebumen sebesar 1.054 jiwa/km².

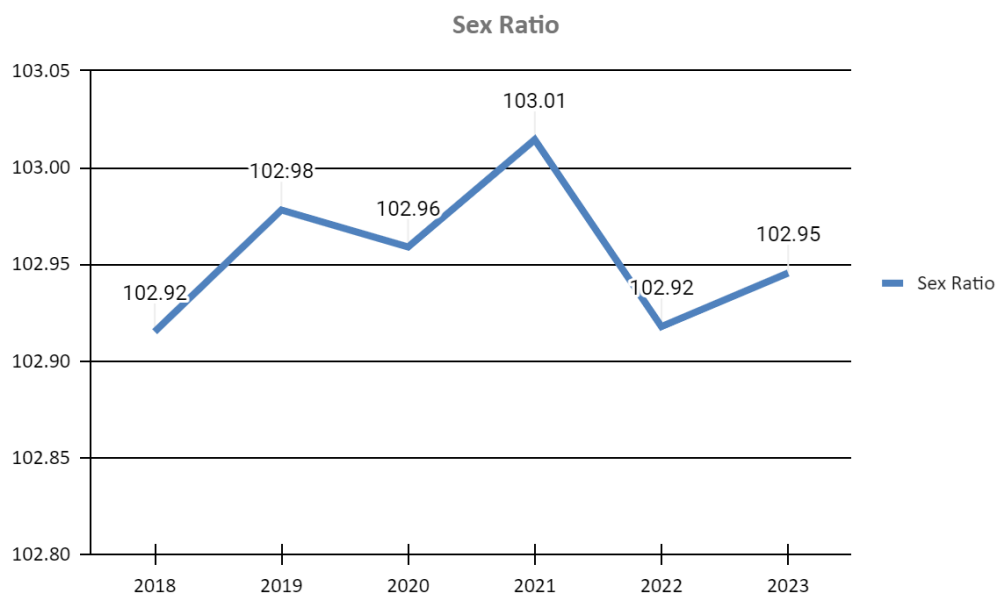
Dilihat dari jenis kelamin pada tahun 2020 data semester I jumlah penduduk laki-laki sebanyak 707.236 jiwa dan perempuan sebanyak 686.802 jiwa. Selisih antara penduduk laki-laki dan perempuan adalah 20.434 yang berarti *sex ratio* sebesar 102,98 artinya komposisi penduduk perempuan 1,47 persen lebih sedikit dibanding penduduk laki-laki. Pada tahun 2021 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 713.565 jiwa dan perempuan sebanyak 692.079 jiwa, sehingga angka *sex ratio*

sebesar 103,02 artinya komposisi penduduk perempuan 2,67 persen lebih sedikit dibanding penduduk laki-laki. Pada tahun 2022, jumlah penduduk laki-laki kembali meningkat menjadi 720.789 jiwa (50,72 %), sedangkan jumlah penduduk Perempuan sebanyak 700.354 jiwa (49,28 %). Dengan demikian, sex ratio pada tahun 2022 mencapai 103,07 artinya komposisi penduduk Perempuan 2,83 persen lebih sedikit dibandingkan penduduk laki-laki.

Gambar III.2
Sex Rasio Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2022



*Sumber : Diolah dari berbagai sumber, 2021**



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, 2023

Komposisi penduduk berdasarkan usia di Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) dengan jumlah sebesar 963.596 jiwa atau 68,34 persen, sedangkan jumlah penduduk tidak produktif (0-14 dan di atas 64 tahun) sebesar 446.355 jiwa atau 31,72 persen. Dari data tersebut maka rasio ketergantungannya pada 2021 adalah sebesar 46,32 persen dan angka ini menunjukkan sedikit peningkatan dibandingkan pada 2021 yaitu sebesar 45,38 persen (lihat Tabel II.2). Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 46-47 orang yang tidak produktif. Kabupaten Kebumen berpeluang mendapatkan bonus demografi karena angka ketergantungannya masih dibawah 50 persen. Namun demikian, kondisi kependudukan di Kabupaten Kebumen yang akan memasuki *ageing population* dapat menjadi kondisi yang menghambat peluang bonus demografi apabila proporsi penduduk usia tidak produktif di suatu daerah mengalami peningkatan secara progresif.

Dibandingkan 5 (lima) tahun sebelumnya, jumlah penduduk Kabupaten Kebumen pada 2022 mengalami peningkatan yang tidak besar yaitu 2,46 persen. Peningkatan penduduk ini banyak disumbang dari kelompok umur produktif (15-64 tahun). Meskipun demikian, ini tidak mengindikasikan kontribusi yang positif terhadap beban kependudukan. Karena dari hasil perhitungan angka ketergantungan justru menunjukkan bahwa kabupaten Kebumen tidak dapat menikmati bonus demografi karena angka ketergantungannya masih cukup tinggi. Dengan demikian, beban tanggungan yang harus dipikul oleh penduduk produktif masih cukup tinggi.

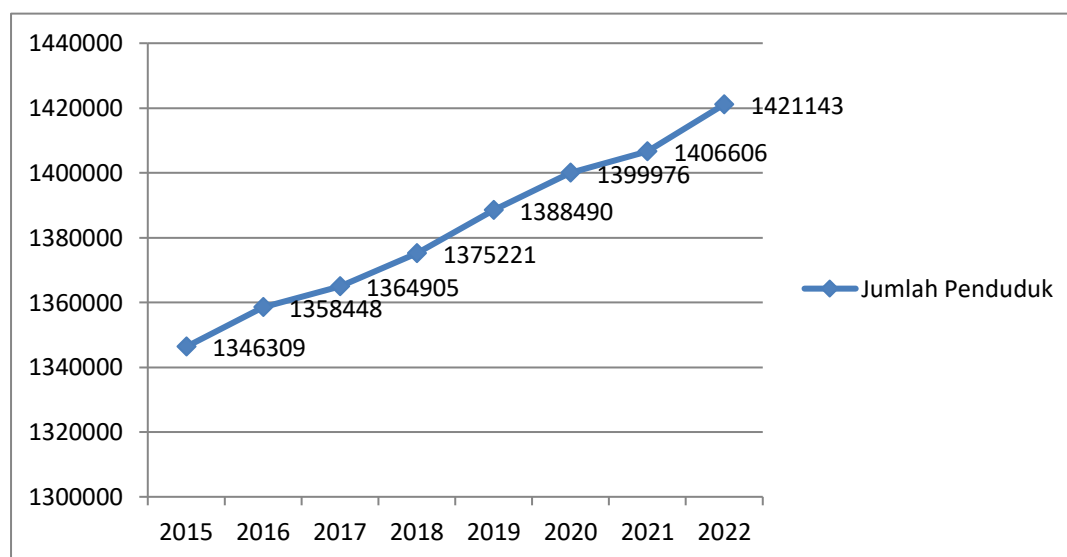
Ancaman tidak adanya peluang bonus demografi semakin besar di masa pandemi. Dampak pandemi yang belum tuntas tentu saja menjadi ancaman yang besar bagi penduduk khususnya penduduk usia produktif. Kesempatan kerja yang semakin kecil akibat kondisi ekonomi yang sulit karena dampak pandemi menyebabkan penduduk usia produktif banyak yang menjadi pengangguran.

Peningkatan pengangguran dikarenakan banyak perusahaan di dalam negeri mengurangi pegawai selama pandemi. Hasil survey BPS berjudul Dampak Covid-19 terhadap Pelaku Usaha Jilid 2 menunjukkan, sebanyak 11,63% perusahaan melakukan pengurangan jumlah karyawan yang bekerja (Jayani, 2020).

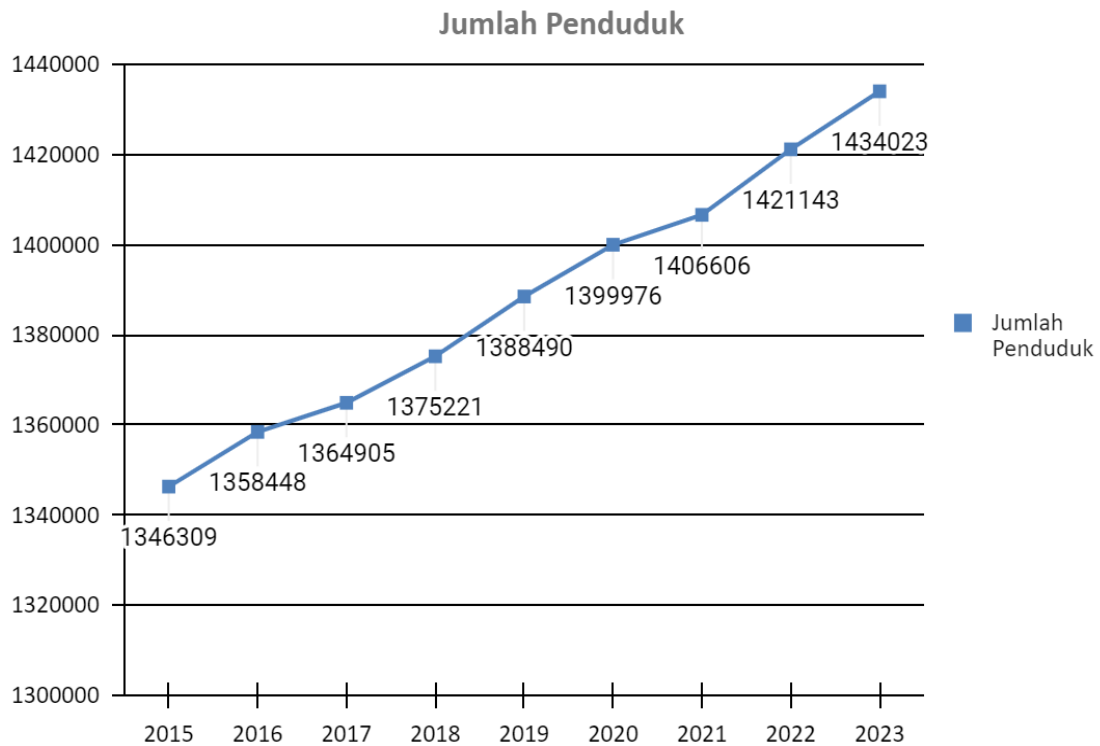
Ganjalan lain terhadap pemanfaatan bonus demografi, adalah pandemi membuat kualitas angkatan kerja terancam menurun. Satuan Tugas Penanggulangan Covid-19 mencatat, per 27 Januari 2021, mayoritas penduduk yang menderita Covid-19 di dalam negeri berusia 19-59 tahun. Persentase terbanyak di rentang usia 31-45 tahun dengan 30% dari total kasus nasional. Mereka yang menderita Covid-19 berpeluang mengidap Long Covid-19, sebuah sindrom yang menyebabkan penyintas tak bisa pulih sepenuhnya. Riset dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (Centers for Disease Control and Prevention) CDC Amerika Serikat pada Juli 2020 menjelaskan, penderita Long Covid-19 terjadi di semua usia, meskipun usia di atas 50 tahun mendominasi (Jayani, 2021).

Data Covid-19 di Kabupaten Kebumen pada 2022 menunjukkan ada 20.159 orang yang terkonfirmasi positif, 12 orang masih dalam perawatan, 18.830 orang sembuh, 1.290 meninggal, dan 2 orang suspek. Kondisi ini tentu saja dapat mengganggu kualitas kesehatan penduduk Kabupaten Kebumen apabila pandemi tidak dapat diatasi. Yang menggembirakan, total penduduk yang sudah divaksinasi pada 2022 telah mencapai 455.355 orang.

Gambar III.3.
Perkembangan jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen



Sumber : Disdukcapil Kabupaten Kebumen, 2021*



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, 2023

3.2. Angka ketergantungan

Untuk dapat memahami apa rasio ketergantungan, kita harus memahami terlebih dahulu 2 (dua) jenis masyarakat yang digunakan dalam perhitungannya. Kedua jenis masyarakat ini adalah masyarakat usia produktif dan usia non produktif.

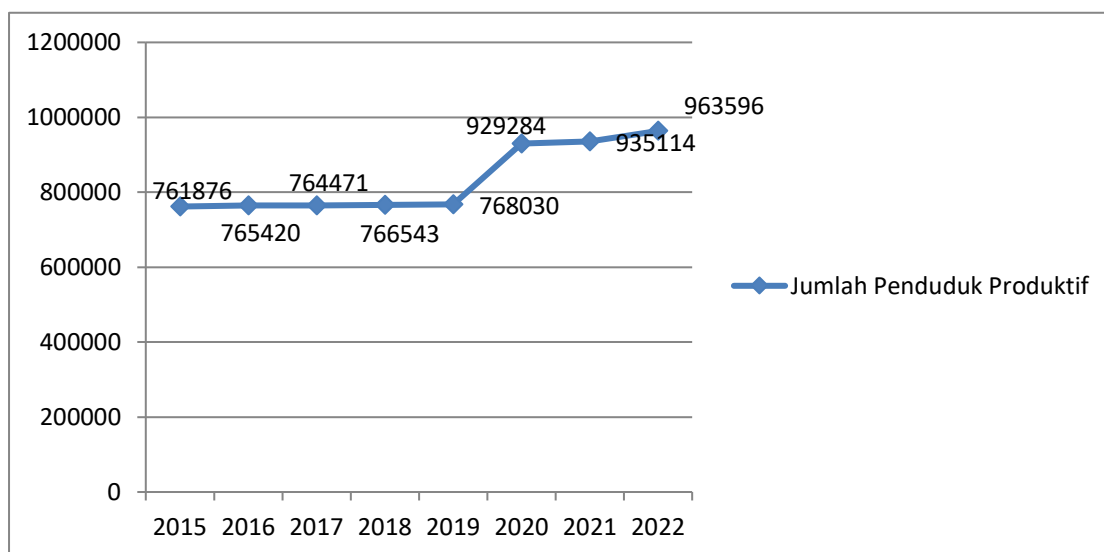
Produktif dan non produktif pada kasus ini tidak dilihat berdasarkan kontribusi orang ke dalam sistem ekonomi atau sistem sosial lainnya, namun berdasarkan kemampuannya untuk berkerja.

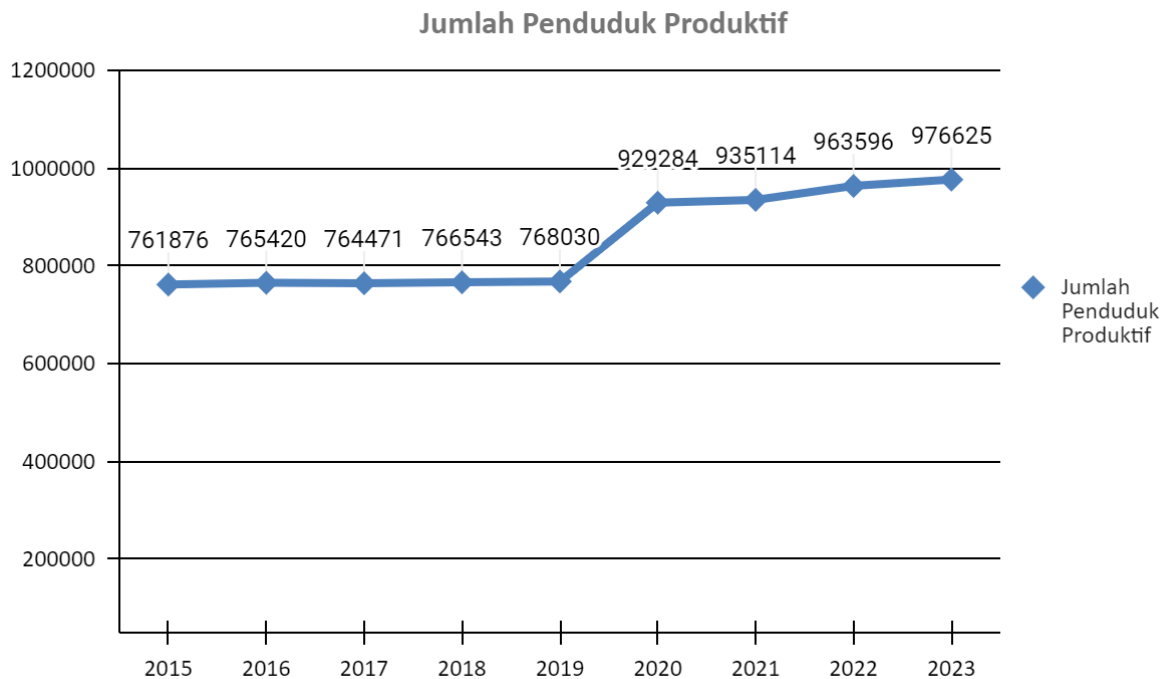
Golongan **masyarakat produktif** adalah masyarakat yang berada pada golongan umur **15-64 tahun**. Golongan umur ini dianggap dapat berkerja dan berkontribusi secara ekonomi maupun sosial kepada negara.

Data kependudukan di Kabupaten Kebumen menunjukkan bahwa jumlah penduduk produktif mengalami peningkatan. Bahkan pada tahun 2022, angka penduduk produktif sedikit meningkat sebesar 963.596 orang atau 2,96 persen dibandingkan pada tahun 2021 (935.114 orang). Meningkatnya jumlah penduduk produktif sangat penting bagi keberlangsungan pertumbuhan ekonomi sebuah daerah.

Gambar III.4.

Perkembangan Jumlah Penduduk Produktif di Kabupaten Kebumen





Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, 2023

Sementara itu, golongan masyarakat **non-produktif** adalah masyarakat yang berada pada golongan umur **0-14 tahun** dan **65 tahun keatas**. Golongan umur ini dianggap belum mampu atau sudah tidak mampu untuk bekerja, sehingga dianggap tidak dapat berkontribusi lagi kepada negara.

Jumlah Penduduk dan Angka Beban Tanggungan Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Produktif dan Nonproduktif Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
1	0-14 tahun	164.813	153.136	317.949
2	15-64 tahun	488.843	474.753	963.596
3	Lebih dari 65 tahun	61.628	66.778	128.406
Jumlah		715.284	694.667	1.409.951
Angka Beban Tanggungan		46,32	46,32	46,32

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen, 2022

Jumlah Penduduk dan Angka Beban Tanggungan Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Produktif dan Nonproduktif Kabupaten Kebumen Tahun 2023

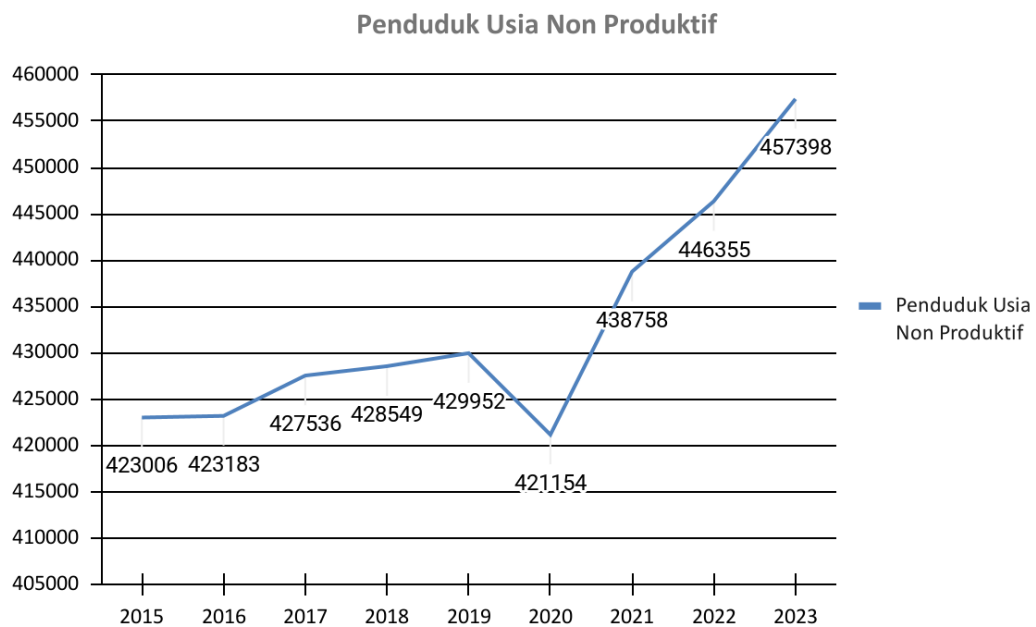
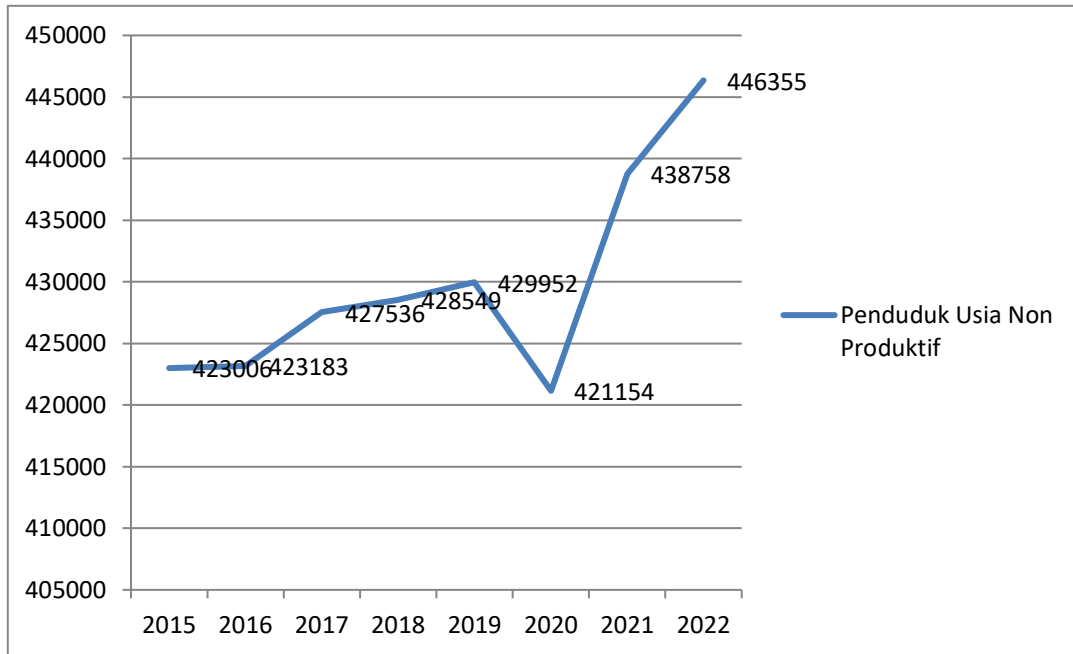
No	Usia	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki dan Perempuan
1	0-14 tahun	163.411	152.211	315.622
2	15-64 tahun	496.561	480.064	976.625
3	Lebih dari 65 tahun	67.446	74.330	141.776
Jumlah		727.418	706.605	1.434.023
Angka Beban Tanggungan		46,49	47,19	46,83

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, 2023

Data kependudukan di Kabupaten Kebumen menunjukkan bahwa golongan penduduk non produktif mengalami kenaikan pada tahun 2022. Dibandingkan tahun 2021, jumlah penduduk non produktif tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,45 persen, jauh lebih kecil daripada tahun 2021, sebesar 1,3 persen. Kondisi ini tentu saja menjadi indikator penting untuk kabupaten kebumen guna menekan angka ketergantungan penduduk.

Semakin meningkat jumlah penduduk non produktif maka akan meningkatkan beban ketergantungan dari penduduk produktif. Jika rasio ketergantungan terlalu tinggi, maka akan terjadi masalah ekonomi dimana pendapatan daerah tidak cukup untuk menyediakan semua fasilitas sosial.

Gambar III.5.
Perkembangan Penduduk Usia Non Produktif

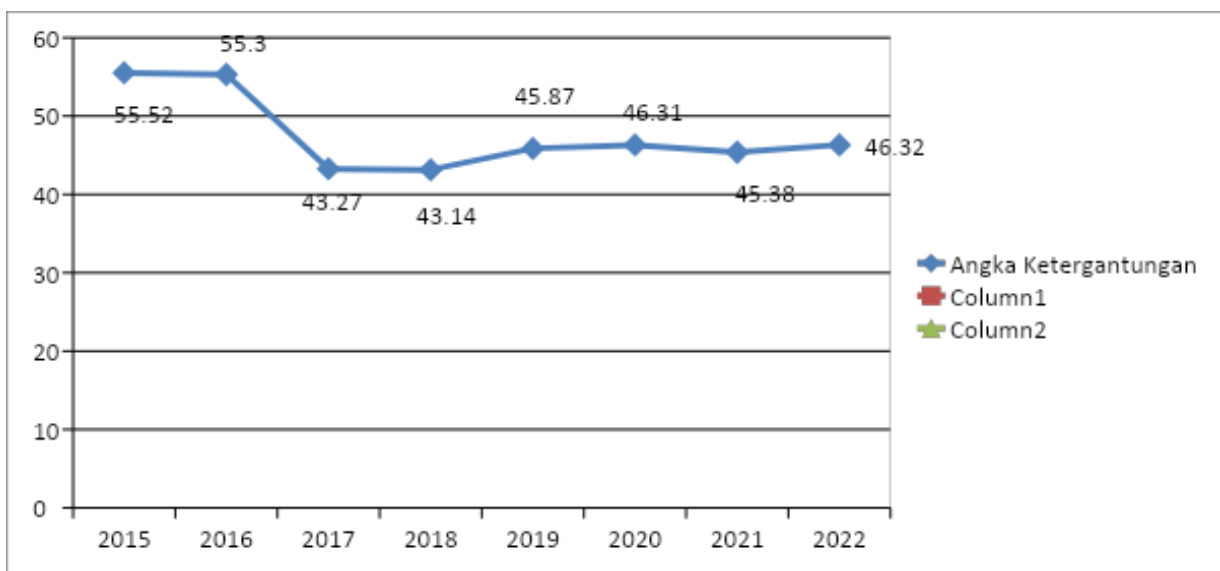


Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, 2023

Semakin rendah angka ketergantungan, semakin baik pula kondisi ekonomi suatu negara. Hal ini disebabkan oleh rendahnya masyarakat non produktif yang harus ditanggung secara ekonomi oleh masyarakat produktif.

Angka ketergantungan di Kabupaten Kebumen selama 7 tahun terakhir (2015-2022) menunjukkan kecenderungan menurun. Penurunan angka ketergantungan yang cukup besar terjadi pada tahun 2020. Namun demikian, rata-rata angka ketergantungan selama periode tersebut adalah 48,24. Ini berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 48-49 orang yang tidak produktif. Pada tahun 2022, angka ketergantungan kembali meningkat menjadi 46,32 dibandingkan tahun 2021 sebesar 45,38. Dengan demikian, beban penduduk produktif dalam menanggung penduduk yang tidak produktif semakin meningkat. Meski demikian, angka ketergantungan tersebut masih tergolong tinggi karena dari 100 penduduk produktif harus menanggung beban sebanyak 45-46 pendudukan usia yang belum dan tidak produktif.

Gambar III.6
Perkembangan Angka Ketergantungan



Sumber: Profil Kesehatan Kebumen (2015-2022)



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, 2023

Bonus demografi adalah kondisi dimana terdapat keberlimpahan masyarakat yang berada pada usia produktif. Tentu saja hal ini berhubungan dengan erat terhadap rasio ketergantungan. Bonus demografi akan menyebabkan rasio ketergantungan menurun sehingga negara memiliki lebih banyak dana dari para pekerja baik secara langsung via pajak atau secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi.

Jumlah pekerja yang lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak bekerja akan menyebabkan surplus dana sehingga negara dapat menggunakan uang tersebut untuk meningkatkan pembangunan, membuka lapangan kerja baru, berinvestasi di dalam negeri, atau bahkan berinvestasi di luar negeri.

Tabel III.1.
Angka Ketergantungan

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation

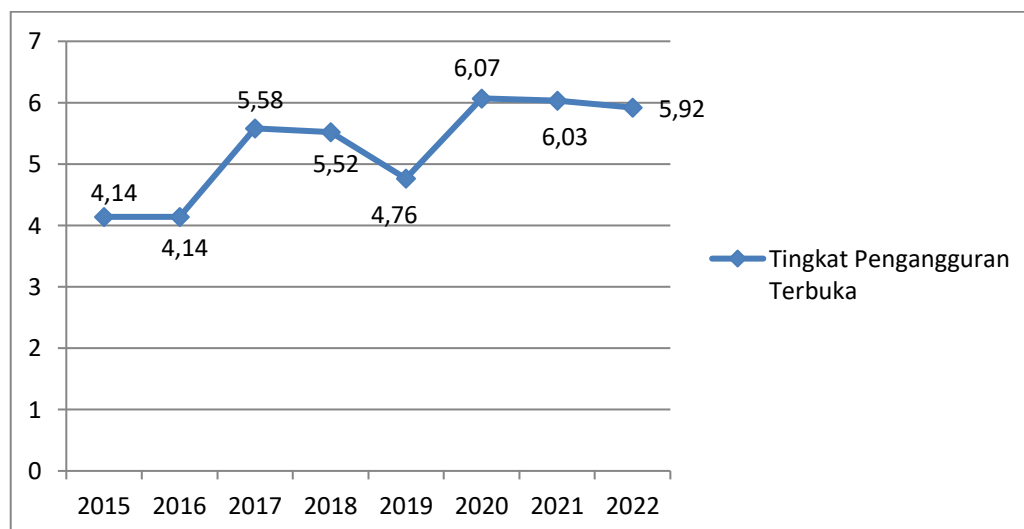
Angka Ketergantungan	8	43,14	55,52	47,64	5,70779
Valid N (listwise)	8				

Meskipun angka ketergantungan di Kabupaten Kebumen masih dibawah 50 persen, kondisi ini belum menunjukkan adanya bonus demografi. Melimpahnya pendudukan usia produktif ternyata tidak diikuti dengan kesempatan lapangan pekerjaan. Di Kabupaten Kebumen, data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka sejak 2015 hingga 2021 mengalami peningkatan.

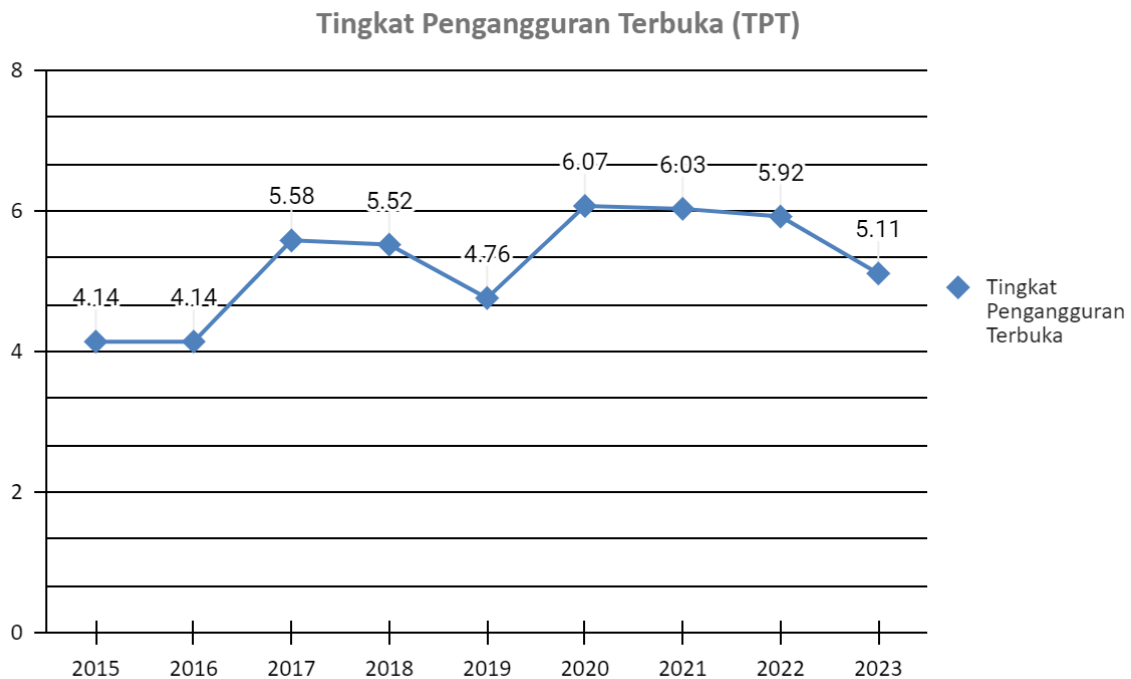
Terlepas dari dampak pandemi Covid-19, kondisi pengangguran di Kabupaten Kebumen masih cukup tinggi. Bila dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) rata-rata kabupaten/kota di Jawa Tengah yang mencapai 5,95 % pada tahun 2021, situasi tingkat pengangguran di Kabupaten Kebumen masih sedikit lebih tinggi yaitu 6,07 %. Pada masa pandemi, tingkat pengangguran terbuka sedikit menurun (6,03%) meskipun masih dibawah angka provinsi (5,95%).

Gambar III.7.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka



Sumber: Jateng dalam Angka



Sumber: Provinsi Jawa Tengah dalam Angka, 2024

Pada tahun 2022, TPT menurun menjadi 5,92 persen. Namun demikian, penurunan TPT tidak berdampak positif terhadap penurunan pengangguran. Justru yang terjadi angkatan pengangguran meningkat menjadi 38,969 jiwa pada tahun 2022 atau naik sekitar 4,03 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat disonansi antara TFT dan angka pengangguran yang menciptakan kontradiksi. Beberapa faktor yang mungkin dapat mempengaruhi fenomena ini:

1. Ketidaksesuaian Kualifikasi:

Peningkatan angka pengangguran mungkin terjadi jika meskipun tingkat pengangguran terbuka menurun, sebagian besar pekerja yang menganggur tidak memiliki kualifikasi atau keahlian yang sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Ini menunjukkan bahwa meskipun pekerjaan tersedia, ada ketidaksesuaian antara kualifikasi pencari kerja dan kebutuhan industri.

2. Pertumbuhan Penduduk:

Penambahan angkatan kerja baru akibat pertumbuhan penduduk bisa menjadi faktor yang menyebabkan peningkatan angka pengangguran meskipun tingkat pengangguran terbuka turun. Jika pertumbuhan angkatan kerja melebihi pertumbuhan lapangan kerja, hal ini dapat menyebabkan peningkatan angka pengangguran.

3. Fluktuasi Musiman:

Fenomena ini juga bisa disebabkan oleh fluktuasi musiman di sektor-sektor tertentu. Tingkat pengangguran mungkin turun selama musim tertentu karena peningkatan permintaan tenaga kerja, tetapi kemudian naik saat musim tersebut berakhir.

4. Penyelenggaraan Program Pekerjaan:

Ketika program pekerjaan sementara atau insentif kerja diluncurkan oleh pemerintah atau lembaga lain, ini dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka untuk sementara waktu. Namun, ketika program ini berakhir, jumlah pengangguran mungkin meningkat kembali.

5. Alih Tenaga Kerja:

Ketika sektor tertentu mengalami perkembangan ekonomi yang signifikan, pekerjaan yang tersedia mungkin memerlukan kualifikasi atau keahlian yang berbeda. Ini dapat menyebabkan pengangguran jika pekerja yang kehilangan pekerjaan di sektor yang menurun tidak memiliki keterampilan yang sesuai untuk bekerja di sektor yang berkembang.

6. Penurunan Partisipasi di Pasar Tenaga Kerja:

Ada juga kemungkinan bahwa beberapa orang yang sebelumnya terdaftar sebagai pencari kerja mungkin telah keluar dari pasar tenaga kerja, sehingga tidak lagi dihitung dalam angka pengangguran terbuka.

3.2. Pengendalian Penduduk

3.2.1. Angka Kelahiran

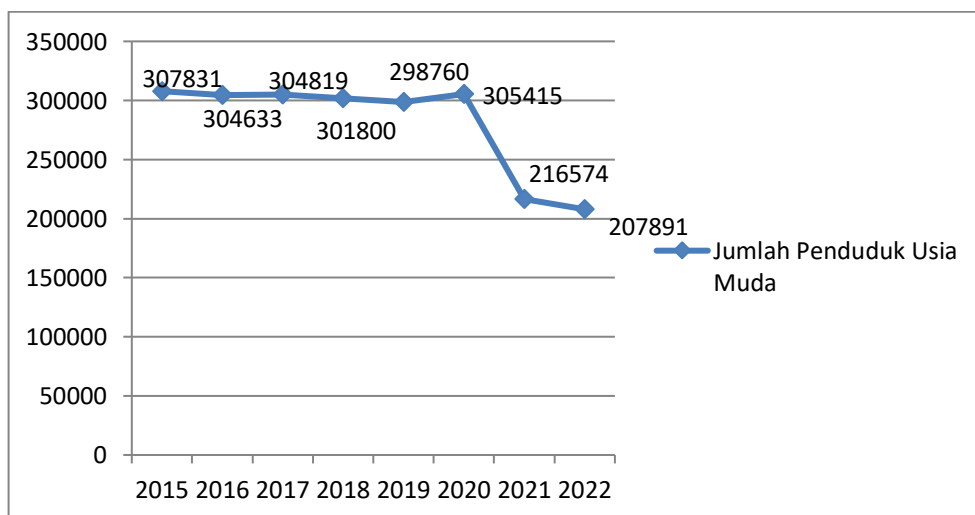
Pelaksanaan kebijakan kependudukan di Kabupaten Kebumen hingga saat ini belum maksimal, terutama jika dilihat dari sisi kuantitas penduduk. Hal ini terlihat dari laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kebumen yang masih mencapai 2,87% atau 33.386 jiwa selama periode 2010-2018, dimana pada tahun 2016 jumlah penduduk Kabupaten Kebumen mencapai 1.161.706 dan pada tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Kebumen telah mencapai 1.421.143 jiwa bersumber dari Dinas Dukcapil Kabupaten Kebumen.

Namun demikian, data menunjukkan bahwa ada trend negatif untuk jumlah penduduk usia muda. Selama periode 2015-2019, jumlah penduduk usia muda mengalami penurunan. Tetapi pada tahun 2021, jumlah penduduk usia muda menurun

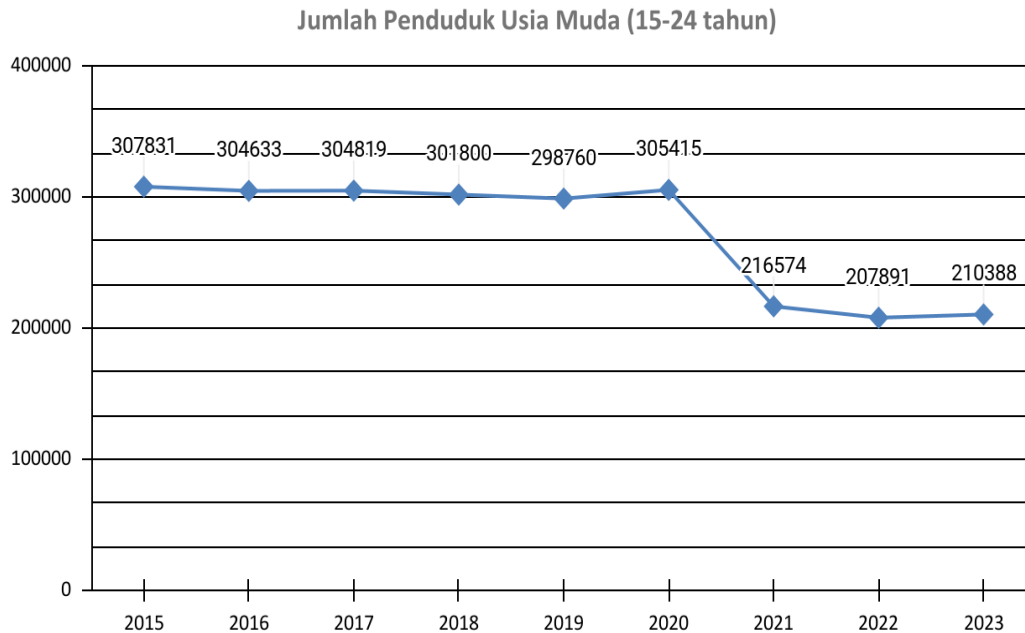
hingga 41 persen dan kembali turun hingga 31,94 persen dibandingkan tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa beban ketergantungan akan semakin menurun pada tahun 2021.

Gambar III.8.

Perkembangan Jumlah penduduk Usia Muda (15-24 tahun)



Sumber: Kebumen dalam Angka (2015-2022)



Sumber: Kebumen dalam Angka (2015-2023)

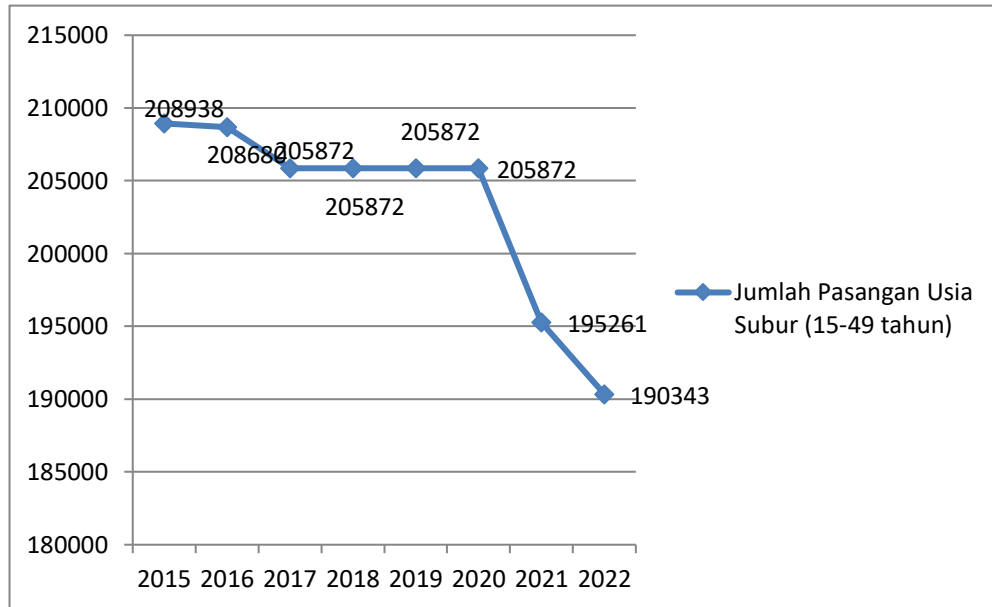
Namun demikian, angka kelahiran total atau *Total Fertility Rate* (TFR) masih berada lebih dari 2,1% yang artinya belum diarahkan atau dikendalikan secara optimal. Dengan kata lain, TFR sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB yang rendah di Kabupaten Kebumen.

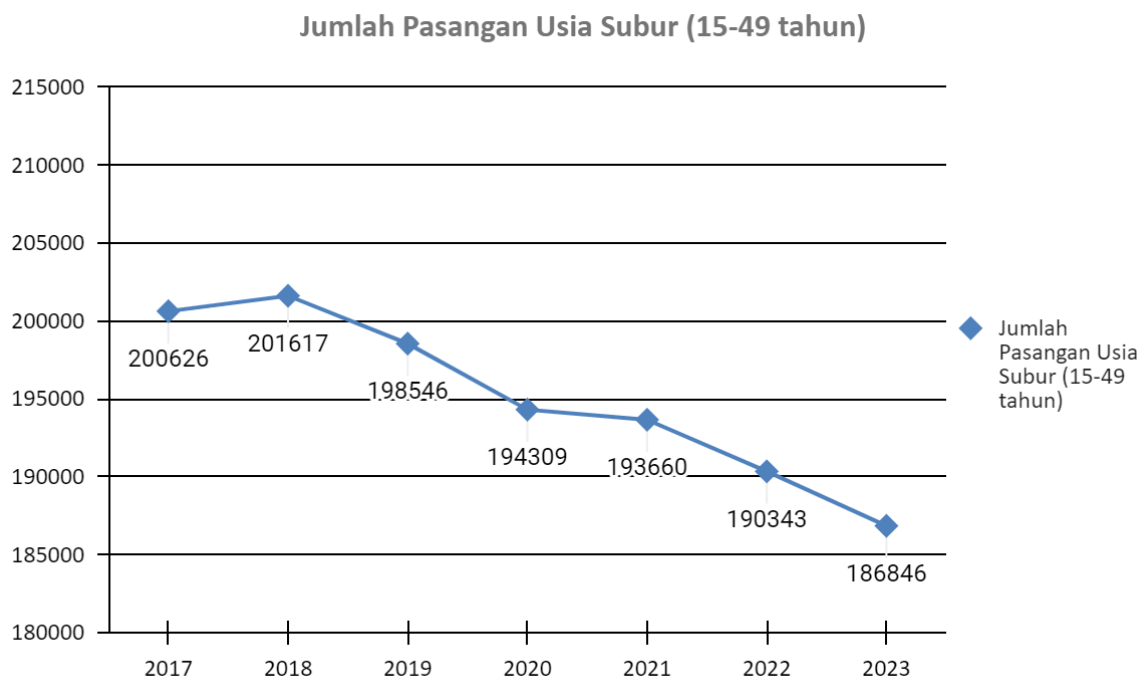
Jika hal ini tidak di cermati secara seksama, dikhawatirkan tujuan kebijakan pembangunan kependudukan dari sisi kuantitatif untuk mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) tidak dapat dicapai, bahkan bukan hanya target yang telah dicanangkan tidak dapat dicapai, tetapi perubahan tersebut akan menimbulkan masalah baru, baik di bidang kependudukan maupun masalah pembangunan pada umumnya.

Data terkait dengan angka kelahiran adalah jumlah pasangan usia subur. Menurut BKKBN (2013), Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri (berstatus kawin) yang istrinya berumur 15 sampai dengan 49 tahun dimana pasangan (laki-laki dan perempuan) sudah cukup matang dalam segala hal terlebih organ reproduksinya sudah berfungsi dengan baik. Selama periode 2015-2019, perkembangan pasangan usia subur di Kabupaten Kebumen terus mengalami penurunan. Jumlah PUS pada 2021 terus mengalami penurunan menjadi 195.261 pasangan atau turun 5,4 % dibandingkan pada 2020. Pada tahun 2022, jumlah PUS semakin menurun menjadi 190.343 pasangan.

Gambar III.9.

Perkembangan Pasangan Usia Subur di Kabupaten Kebumen

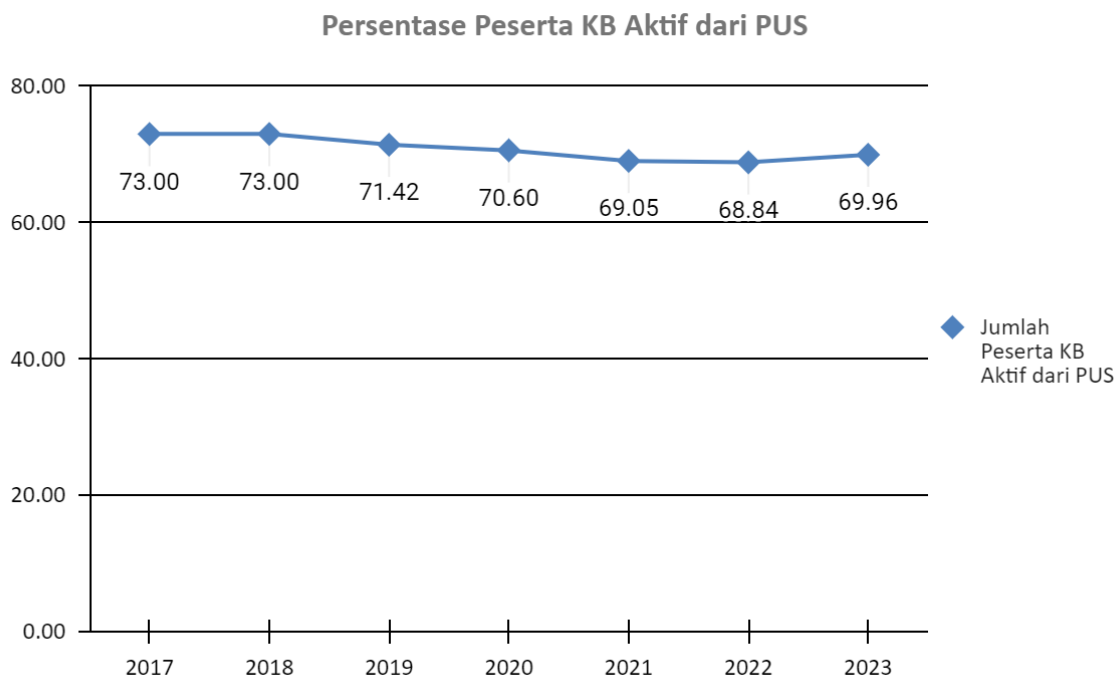
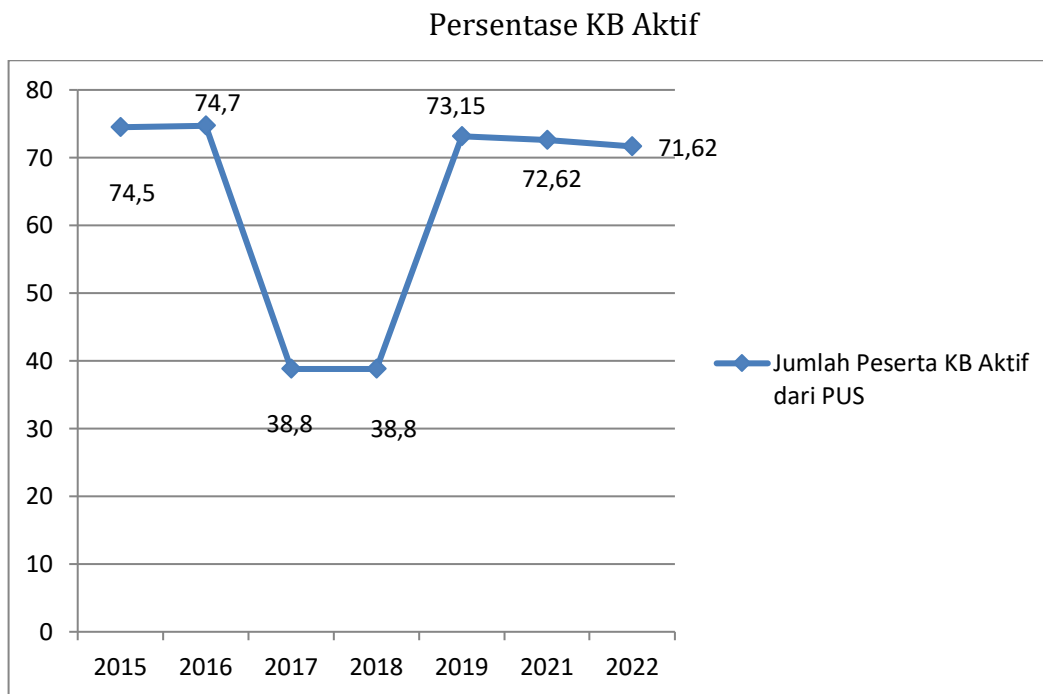




Sumber: BPS Kab. Kebumen (2015-2023)

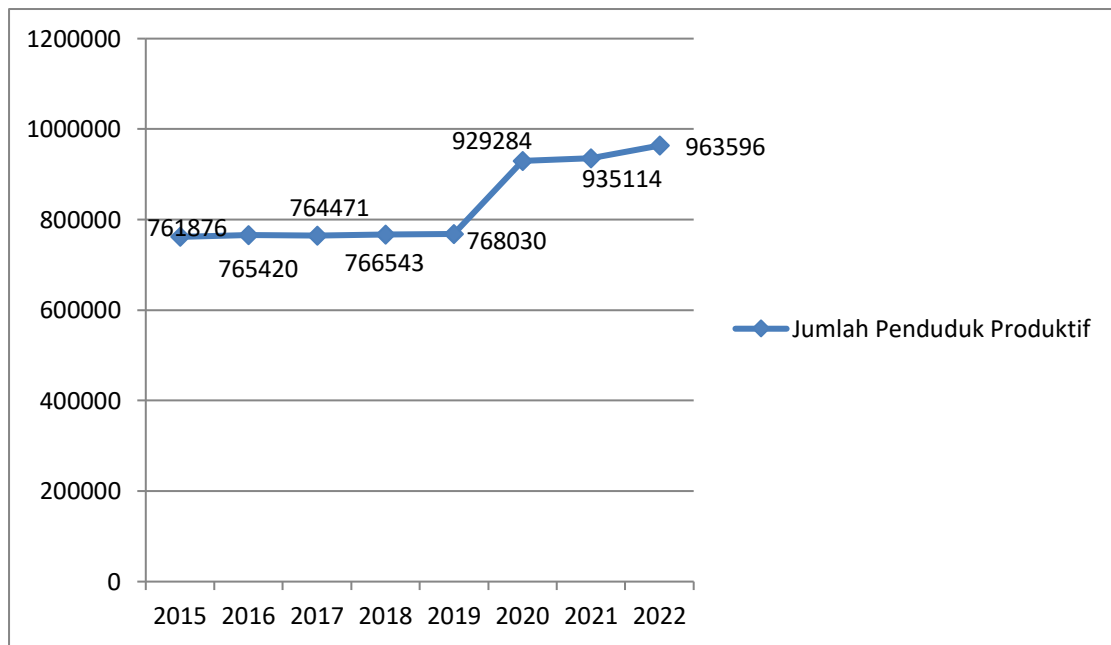
Menariknya, partisipasi pasangan usia subur yang menjadi peserta KB Aktif mengalami penurunan menjadi 72,62 persen dibandingkan pada 2019 (73,15 persen) atau turun sebesar 0,54 persen. Pada tahun 2022, peserta aktif KB menurun lagi menjadi 71,62 persen. Kondisi ini sangat menggembirakan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang sempat mengalami penurunan hingga 38,8 persen dalam kepesertaan KB Aktif. Dengan partisipasi PUS dalam program KB aktif menunjukkan bahwa implementasi program KB di Kabupaten Kebumen cukup berhasil khususnya dalam hal kepesertaan program KB.

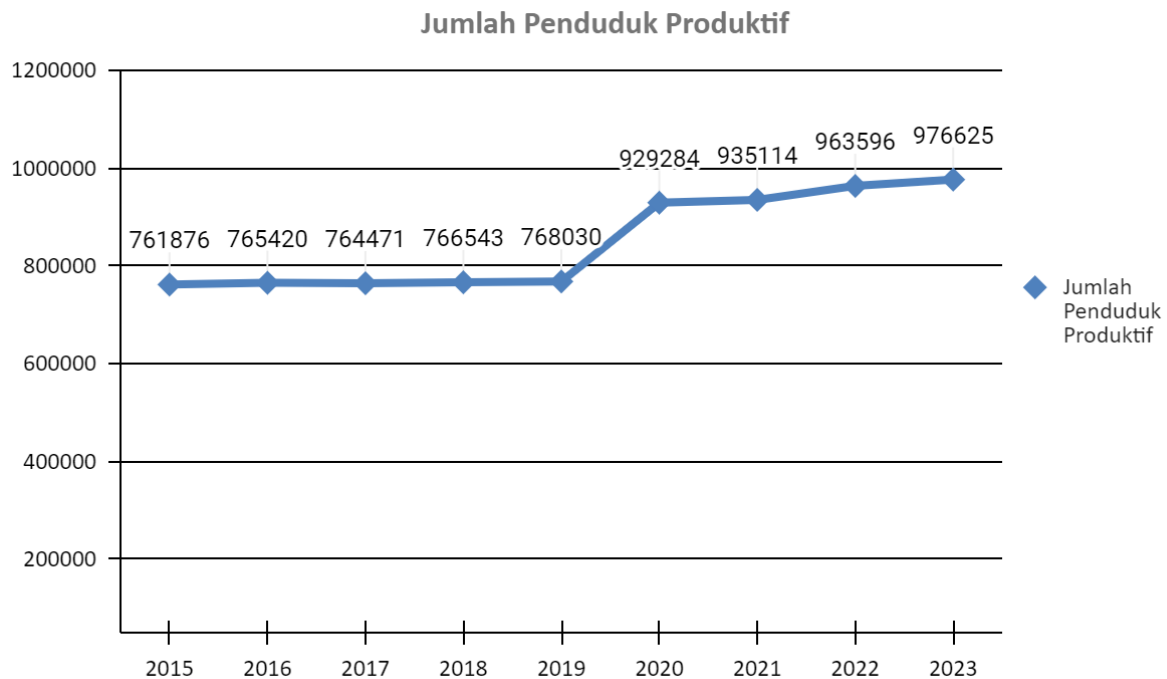
Gambar III.10.



Sumber: Satu Data Kebumen (2017-2023)

Gambar III.11.
Perkembangan Jumlah Penduduk Produktif





Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, 2023

Selama periode 2019-2022, perkembangan jumlah penduduk produktif terus mengalami peningkatan. Dengan perkembangan positif ini, kekuatan penduduk dapat dimanfaatkan untuk pengembangan tenaga kerja dan pembangunan ekonomi.

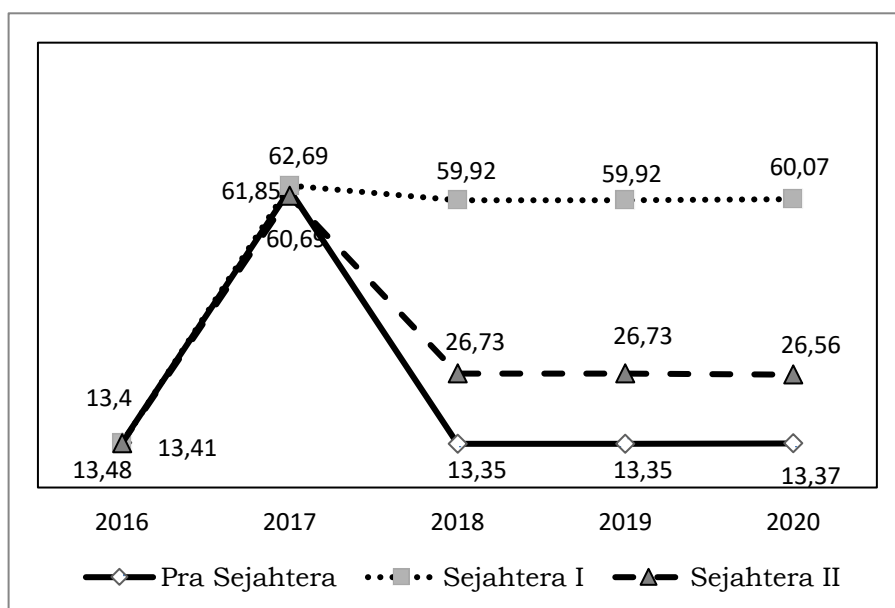
3.2.2. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tingkat Kesejahteraan Keluarga

Selama 4 tahun terakhir tingkat kesejahteraan keluarga di Kabupaten Kebumen menunjukkan tren peningkatan. Hal itu terlihat dari persentase keluarga Sejahtera II yang meningkat dari 13,4% pada tahun 2016 menjadi 26,73% pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 26,56% pada tahun 2020. Peningkatan jumlah keluarga kategori sejahtera I juga mengalami peningkatan dari 59,92% pada tahun 2019 menjadi 60,07% pada tahun 2020. Peningkatan kesejahteraan juga dapat dilihat dari penurunan persentase Keluarga Pra Sejahtera dari 13,48% di tahun 2016 menjadi 13,37% di tahun 2019 dan menjadi 13,37% pada tahun 2020. Persentase tingkat kesejahteraan keluarga di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020 selengkapnya dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar III.12

Persentase Tingkat Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2022



Sumber: Dinas Sosial dan PPKB Kabupaten Kebumen, 2020

Kinerja Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Kebumen mengalami penurunan selama kurun waktu tahun 2016-2020. Hal ini dapat dilihat dari rasio akseptor KB dari 74,28 pada 2016 menurun menjadi 70,60 di tahun 2020. Perlu peningkatan pelaksanaan program KB agar pengendalian penduduk lebih optimal dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen. Perkembangan Capaian Kinerja Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 selengkapnya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel III.2

Perkembangan Capaian Kinerja Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

URAIAN KINERJA	2016	2017	2018	2019	2020	2022
Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,7	2,7	3	2,08	2,3	2,3
Jumlah Pasangan Usia Subur	208.841	206.543	199.509	198.315	194.309	190.343

URAIAN KINERJA	2016	2017	2018	2019	2020	2022
Jumlah Pasangan Usia Subur ber-KB	155.134	154.502	142.389	141.441	137.183	136.323
Jumlah Pasangan Usia Subur tidak ber-KB	53.707	52.041	51.360	56.874	57.126	54.019
Rasio Akseptor KB	74,28	74,80	71,37	71,00	70,60	71,62

Sumber: Dinsos PPKB Kabupaten Kebumen, 2020

Pengendalian Penduduk

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga merupakan dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana yang mengamanatkan masalah kependudukan tidak hanya pada masalah Pembangunan keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera saja, namun juga menyangkut masalah pengendalian penduduk. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin mempertegas kewenangan pengendalian penduduk, dimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat, daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota pada huruf N (Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) menegaskan kewenangan dalam pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota.

Selain itu, dalam upaya mensukseskan agenda prioritas pembangunan nasional (Nawacita) terutama Nawacita 3 (tiga), 5 (lima) dan 8 (delapan). Salah satu dari tiga agenda prioritas ini adalah Nawacita Ketiga yaitu membangun masyarakat dari wilayah pinggiran dengan program pembentukan Kampung KB pada tingkatan paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di Desa, yang di canangkan pertama kali pada tingkat nasional pada Bulan Februari Tahun 2016 oleh Presiden RI (Ir. Joko Widodo).

Sejak tahun 2016 sampai dengan 2020, Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Kebumen, kini telah mencanangkan 69 Kampung KB dan 1 Kampung KB percontohan (*Centre of Excellent*) yang tersebar di 26 kecamatan. Penetapan Kampung KB salah satunya bertujuan untuk pengentasan kemiskinan. Kampung KB merupakan satuan wilayah setingkat desa atau yang setara dengan kriteria tertentu yang diharapkan melaksanakan program KKBPK yang dilakukan secara sistemik dan sistematis. Pencanaan kampung KB secara lengkap dapat dilihat pada Tabel. Adapun rincian lokasi Kampung KB selengkapnya disajikan pada Tabel.

Tabel III.3.

Pencanangan Kampung KB Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kampung KB	7	26	35	69	77	77	77

Sumber: Dinsos PPKB Kabupaten Kebumen, 2022

Tabel III.4

Rincian Lokasi Kampung KB Kabupaten Kebumen

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Tanggal Dicanangkan
1	Ayah	Argosari	10 Mei 2017

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Tanggal Dicanangkan
		Kalipoh	9 Mei 2018
2	Buayan	Jatiroto	17 Mei 2017
		Sikayu	9 Mei 2018
		Rangkah	18 Juli 2018
3	Puring	Sidobunder	13 Juli 2017
		Sidoharjo	8 Agustus 2018
4	Petanahan	Kebonsari	20 Oktober 2016
		Ampelsari	19 Juli 2017
		Tegalretno	28 Agustus 2018
5	Klirong	Tanggulangin	10 Mei 2017
		Pandanlor	18 Juli 2018
		jeruk agung	13 Juli 2020
		gadungrejo	13 Juli 2020
6	Buluspesantren	Tanjungrejo	10 Agustus 2016
		Jogopaten	16 Mei 2017
		Rantewringin	19 Juli 2018
		Indrosari	11 Juli 2018
		ampih	14 Juli 2020
7	Mirit	Winong	24 Mei 2017

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Tanggal Dicanangkan
		Tlogopragoto	12 Juli 2018
		Wergonayan	19 Juli 2018
		singoyudan	13 Juli 2020
		karanggede	13 Juli 2020
8	Ambal	Benerkulon	29 Desember 2016
		Kaibon	23 Mei 2017
		Kaibon Petangkuran	19 Juli 2018
		Plempukan kembaran	8 Mei 2018
9	Prembun	Kabuaran	23-Nov-16
		Sidogede	18 Mei 2017
		Tunggalroso	30 Juni 2018
10	Kutowinangun	Pejagatan	23 Mei 2017
		Ungaran	30-Apr-18
11	Alian	Kalijaya	13 Juli 2017
		Kemangguan	4 Juli 2018
12	Kebumen	Depokrejo	13 Agustus 2016
		Bandung	20 Mei 2017
		Roworejo	8 Mei 2018

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Tanggal Dicanangkan
13	Pejagoan	Kuwayuhan	24 Mei 2017
		Karangpoh	10 Juli 2018
		Kebagoran	4 Juli 2018
14	Sruweng	Klepusanggar	13 Juli 2017
		Sidoagung	26 Juli 2018
		pengempon	13 Juli 2020
		Condongcampur	13 Juli 2020
15	Adimulyo	Sidomukti	23 Mei 2017
		Sugihwaras	3 Juli 2018
		Temanggal	5 Juli 2018
16	Kuwarasan	Harjodowo	8 Agustus 2017
		Sidomukti	8 Agustus 2018
17	Rowokele	Wonoharjo	18 Mei 2017
		Giyanti	14 Mei 2018
18	Sempor	Sidoharum	23 Mei 2017
		Semali	31 Juli 2018
		Donorojo	26 Juli 2018
19	Gombong	Kedungpuji	26 Juli 2016
		Kalitengah	23 Mei 2017

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Tanggal Dicanangkan
		Klopogodo	14 Mei 2018
20	Karanganyar	Sidomulyo	12 Juli 2017
		Candi	4 Juli 2018
21	Karanggayam	Logandu	24 Februari 2016
		Wonotirto	28-Sep-16
		Karanggayam	24 Mei 2017
		Pagebangan	8 Mei 2018
		Kalibening	14 Mei 2018
22	Sadang	Wonosari	4 Oktober 2017
		Pucangan	12 Desember 2018
23	Bonorowo	Balorejo	24 Mei 2017
		Patukrejo	5 Juli 2017
		Bonorowo	27 Agustus 2018
		bonjok kidul	14 Juli 2020
24	Padureso	Rahayu	22 Mei 2017
		Kalijering	26-Apr-18
25	Poncowarno	Jatipurus	24 Mei 2017
		Tegalrejo	12 Juli 2018
26	Karagsambung	Kaligending	18 Mei 2017

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Tanggal Dicanangkan
		Tlepok	12 Juli 2018

Sumber: Dinsos PPKB Kabupaten Kebumen, 2020

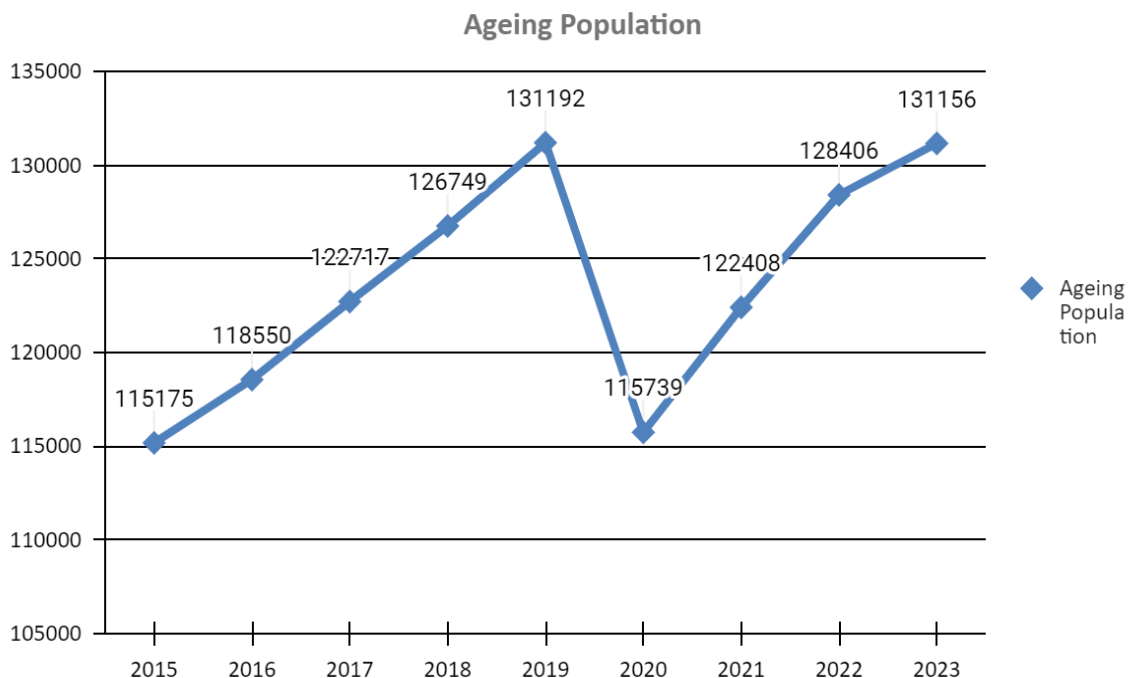
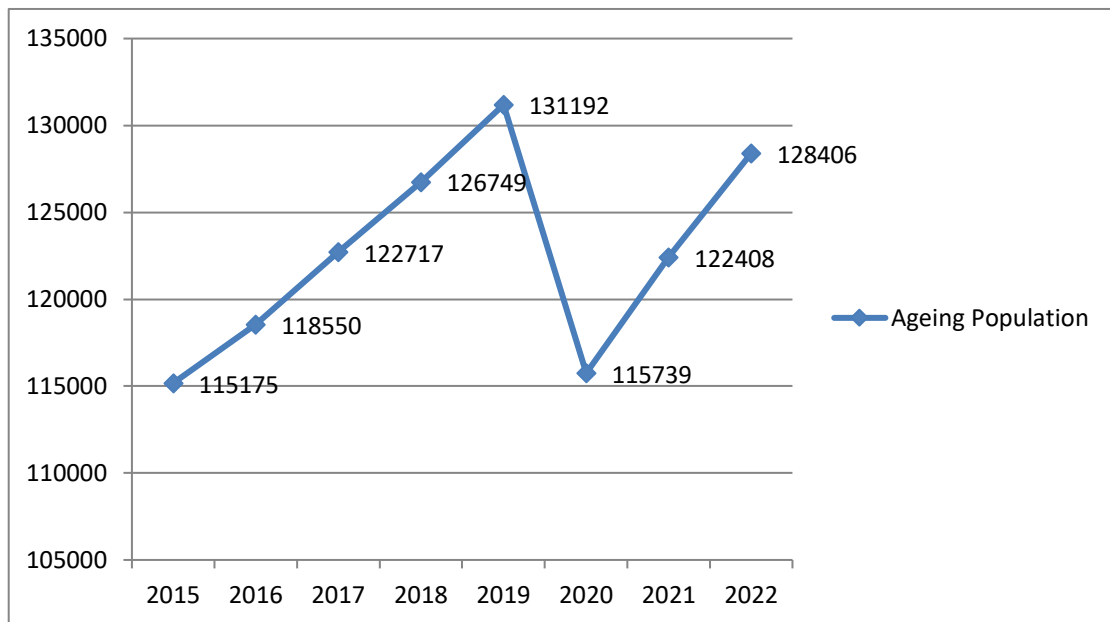
Selain itu, di setiap Kampung KB yang dicanangkan memiliki Rumah Data Kependudukan yang dibentuk untuk meningkatkan tata kelola pembangunan tingkat desa berbasis data yang terintegrasi dengan sumber data lain, baik data demografi maupun data sektoral yang digunakan untuk melakukan intervensi program-program pembangunan di Kampung KB melalui pelibatan lintas sektor guna pengentasan kemiskinan dan pencapaian program KKBPK. Sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam pengendalian penduduk, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan Riset Unggulan Daerah tentang Kajian Grand Design Pembangunan Kependudukan pada tahun 2020 sebagai dasar penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2021 – 2026.

3.2.2. Penduduk lanjut usia dan angka harapan hidup

Data kependudukan juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia tidak produktif atau *ageing population* menunjukkan trend meningkat. Situasi ini menyamai kecenderungan ageing population selama 2015-2019, populasi usia tidak produktif mengalami peningkatan namun pada 2020 justru mengalami penurunan sebesar 11,78 persen. Namun demikian, pada tahun 2022 jumlah ageing population mengalami peningkatan sebesar 4,67 persen dibandingkan tahun 2021. Sementara itu, populasi usia produktif mengalami sedikit peningkatan sebesar 2,96 persen.

Gambar III.13.

Kecenderungan Ageing Population (Kebumen dalam Angka 2022)

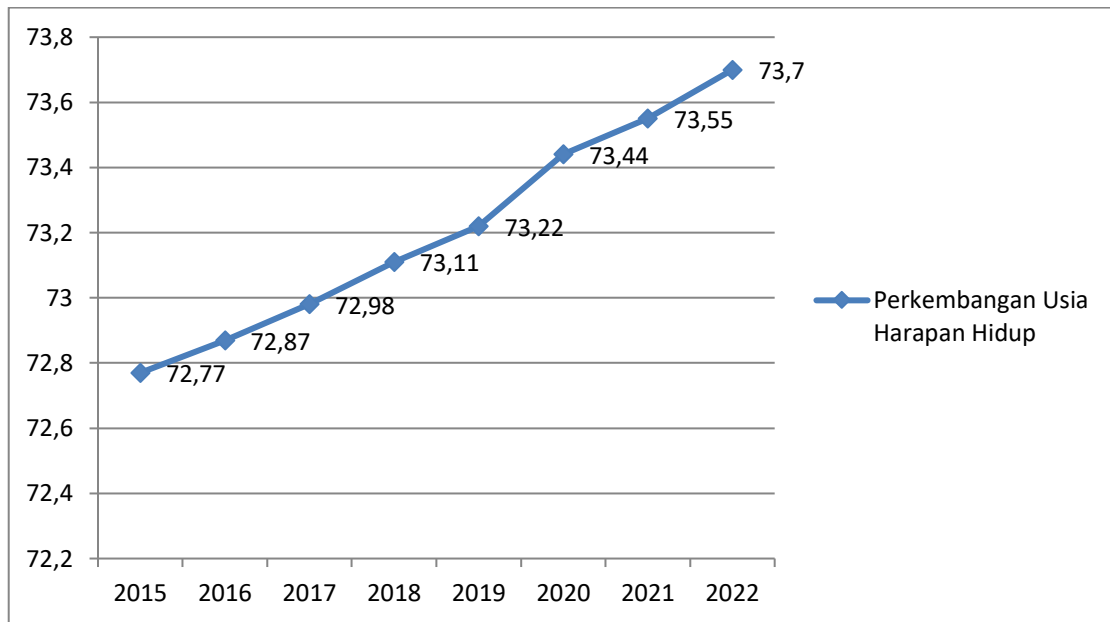


Sumber: Kebumen dalam Angka, 2024

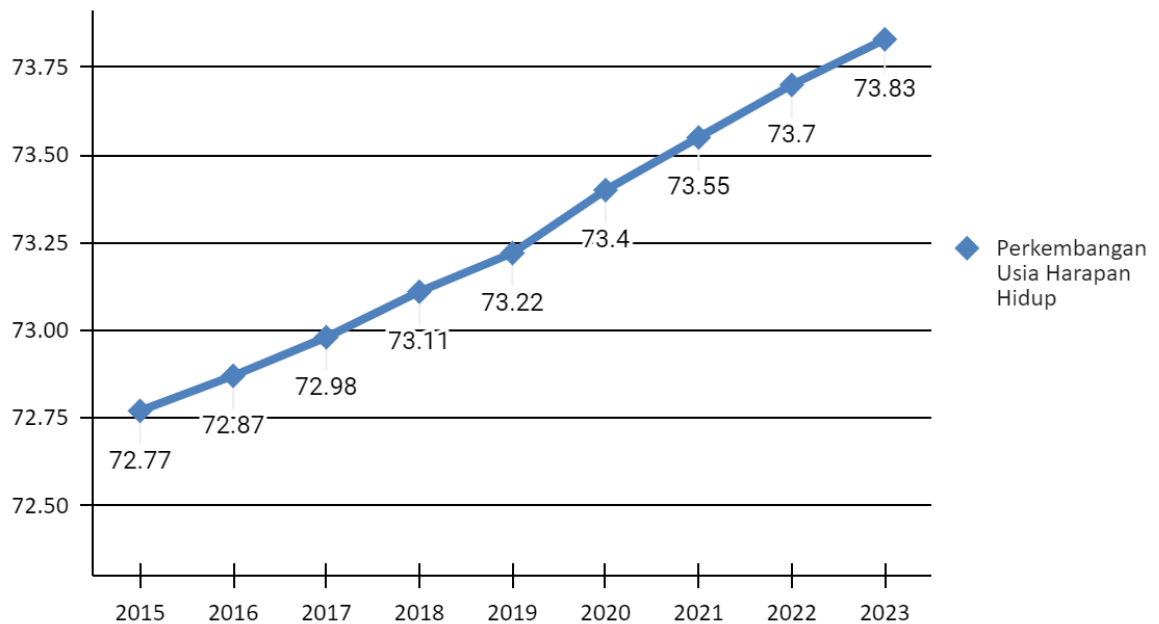
Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang menua, usia harapan hidup penduduk mengalami peningkatan. Rata-rata usia harapan hidup penduduk selama 5 tahun terakhir adalah 73,70 tahun. Perkembangan usia harapan hidup yang terus meningkat menunjukkan adanya perbaikan kualitas kesehatan dan akses masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Gambar III.14.

Perkembangan Usia Harapan Hidup



Perkembangan Usia Harapan Hidup



Sumber: Kebumen dalam Angka, 2024

3.2.3. Kualitas Penduduk

Pendidikan – Harapan sekolah & Lama sekolah

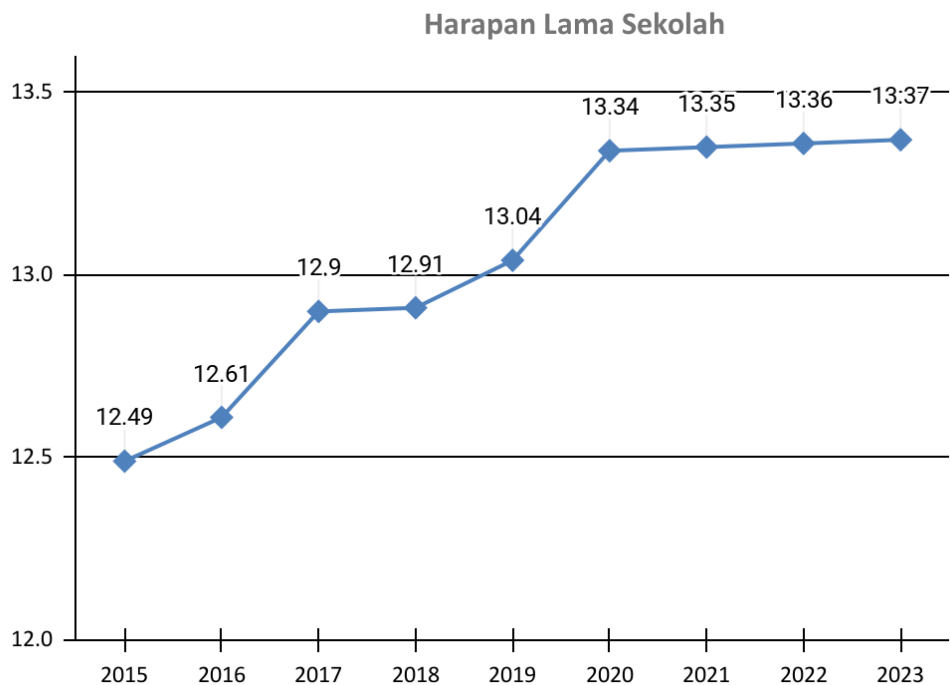
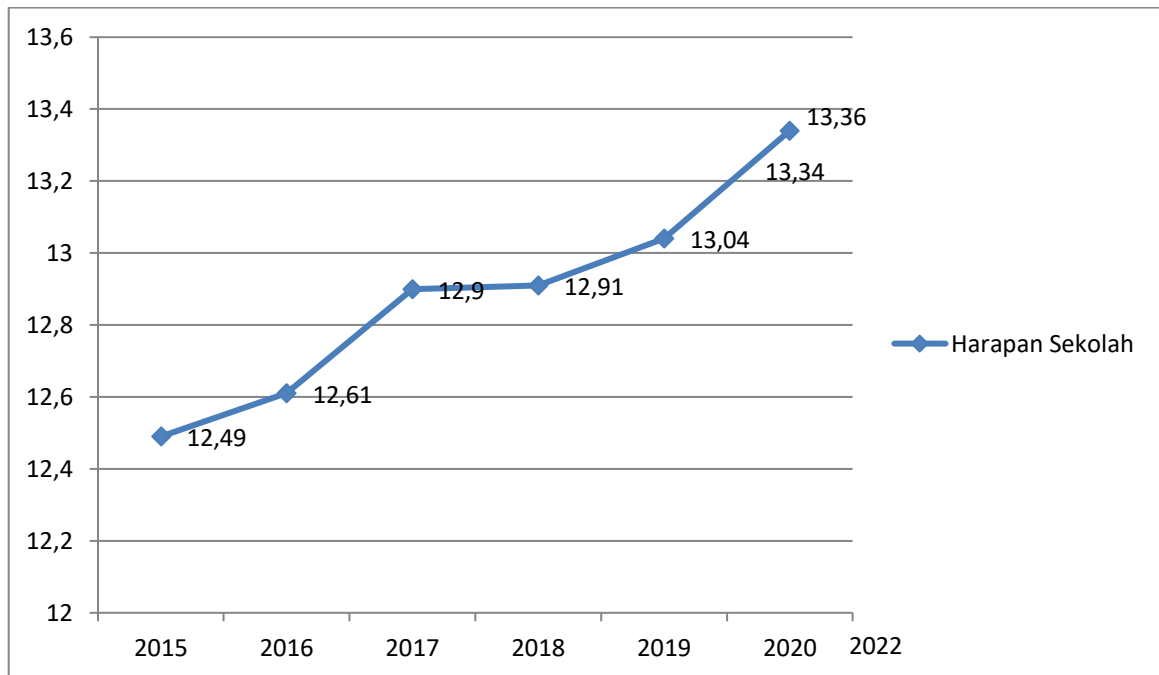
Harapan Sekolah adalah angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yang didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada

umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan anak-anak yang pada 2021 yang berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,36 tahun (hingga Diploma I). Harapan sekolah pada 2022 menunjukkan perbaikan dibandingkan pada tahun 2015 yang hanya memiliki harapan menikmati pendidikan selama 12,49 tahun atau hanya mengenyam pendidikan hingga jenjang SLTA.

Gambar III.15.
Perkembangan Harapan Sekolah

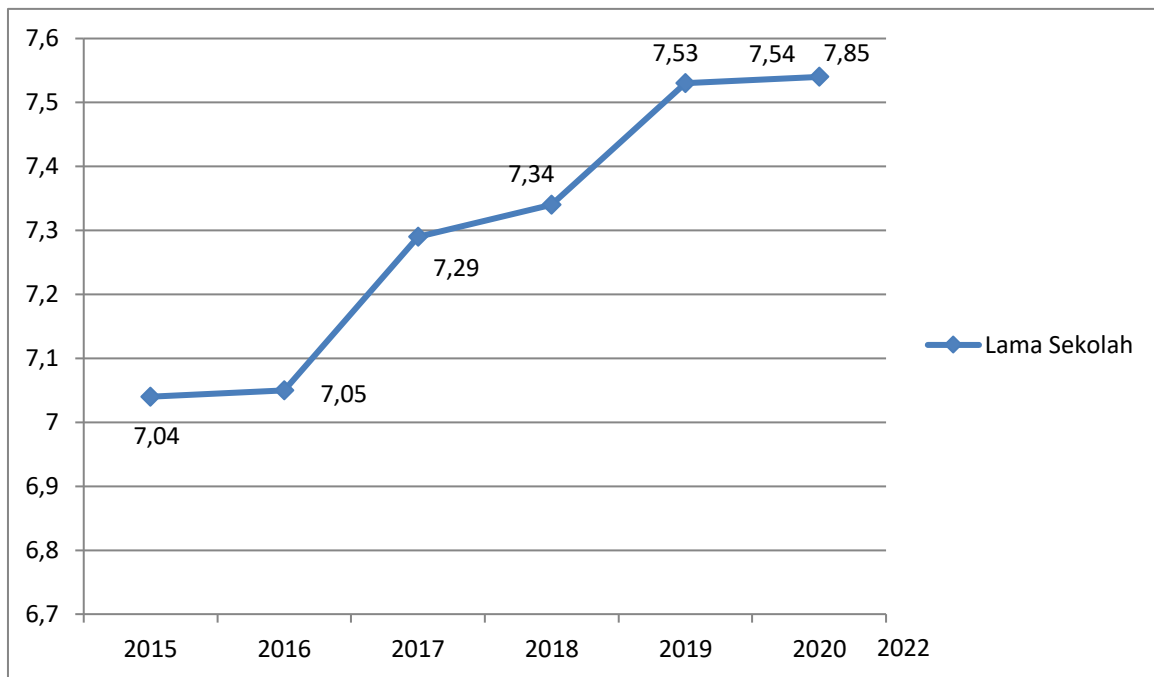


Sumber: Kebumen dalam Angka, 2024

Angka harapan sekolah yang meningkat memberikan kontribusi yang positif terhadap angka lama sekolah. Data 2022 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk mencapai 7,85 tahun. Dengan kata lain, tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk sebagian besar tidak tamat SLTP. Meskipun sejak tahun 2015 angka lama

sekolah terus meningkat, namun peningkatannya tidak besar. Artinya, akses penduduk untuk mendapatkan pendidikan yang memadai masih belum sesuai dengan program wajib belajar 9 tahun. Kondisi ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kebumen masih sangat rendah.

Gambar III.16.
Perkembangan Lama Sekolah



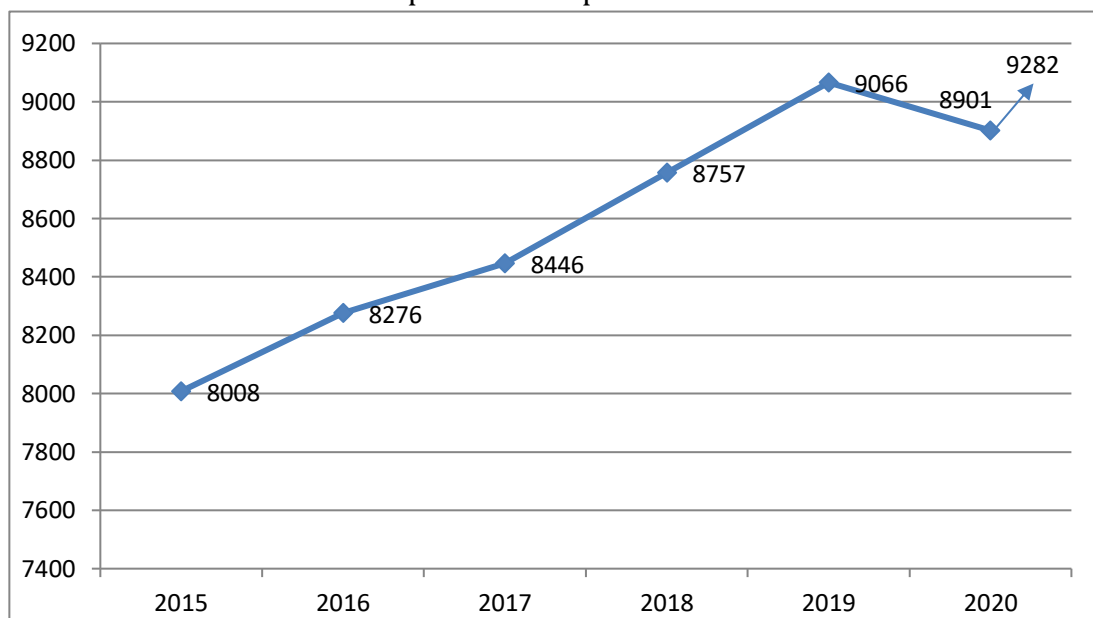


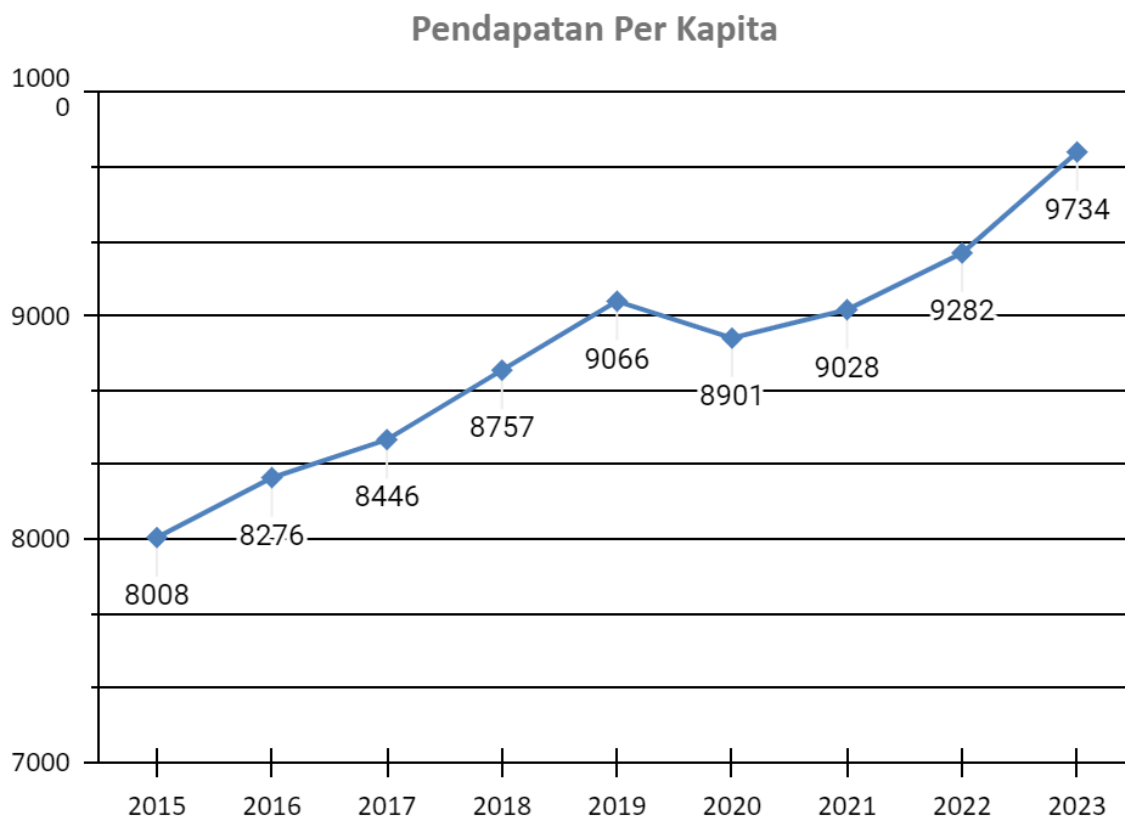
Sumber: Kebumen dalam Angka, 2024

Ekonomi – Pendapatan perkapita

Sebelum pandemi Covid-19, pendapatan per kapita per tahun mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak 2015. Rata-rata pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Kebumen sebesar Rp 8,5 juta per tahun. Namun demikian pendapatan per kapita di masa pandemi mengalami sedikit penurunan dibandingkan pada tahun 2019, yaitu sebesar 1,85 persen. Penurunan ini terjadi akibat dampak pandemi terhadap sektor ekonomi terutama pengurangan tenaga kerja, dan lemahnya daya beli masyarakat.

Gambar III.17.
Pendapatan Per Kapita Per Tahun





Sumber: Kebumen dalam Angka, 2024

Menurunnya pendapatan per kapita berkorelasi negatif secara signifikan pada level 0,10 dengan angka ketergantungan. Besaran korelasinya adalah -0,729 dan tergolong korelasi yang kuat. Dengan demikian, semakin besar angka ketergantungan berhubungan dengan semakin rendahnya pendapatan per kapita. Ini berarti beban ekonomi yang terlalu besar ditanggung oleh kelompok penduduk produktif menurunkan kapasitas ekonomi penduduk. Demikian pula dari sisi pemerintah, berbagai fasilitas sosial yang disediakan tidak cukup melayani semua penduduk karena pendapatan pemerintah dari sektor pajak dan investasi publik mengalami penurunan. Sementara di pihak penduduk, pendapatan dihabiskan untuk kegiatan konsumsi dasar.

Tabel III.5.

Korelasi Angka Ketergantungan dan pendapatan per kapita

	pendpt_perkapi ta	Angka Ketergantungan
--	----------------------	----------------------

pendpt_perkapita	Pearson Correlation	1	-,729
	Sig. (2-tailed)		,093
	N	6	6
Angka Ketergantungan	Pearson Correlation	-,729	1
	Sig. (2-tailed)	,093	
	N	6	6

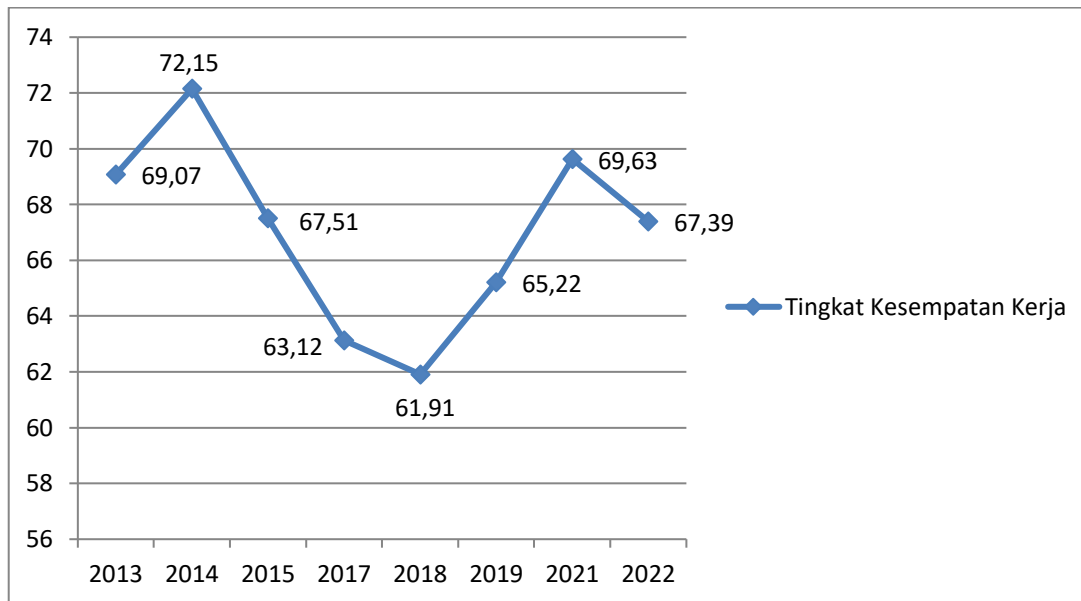
Catatan: Correlation is significant at the 0.10 level (2-tailed).

Kesempatan kerja – tingkat kesempatan kerja

Tingkat kesempatan kerja (TKK) adalah persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja terhadap angkatan kerja. TKK mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang bekerja. Semakin tinggi TKK, kesempatan kerja semakin tinggi.

Data mengenai TKK di Kabupaten Kebumen menunjukkan trend yang fluktuatif. TKK pernah mencapai tingkat yang tertinggi sebesar 72,15 persen pada tahun 2014. Setelah itu, TKK terus menurun menjadi 61,91 pada tahun 2018. Pada tahun 2019, TKK kembali naik sebesar 3,31 persen menjadi 65,22 persen. Pada tahun 2020 belum ditemukan data TKK. Namun demikian, TKK di tahun 2021 meningkat menjadi 69,63 persen karena banyaknya usaha yang mulai pulih dan terserapnya tenaga kerja ke berbagai sektor usaha. Sayangnya, TKK di tahun 2022 ditemukan mengalami penurunan sebanyak 1,74 persen sehingga TKK menjadi 67,89 persen.

Gambar III.18
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)



Dampak kependudukan terhadap tingkat kesempatan kerja dapat dilihat dari perkembangan usia produktif. Hasil pengujian korelasi menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia produktif berkorelasi dengan tingkat kesempatan kerja sebesar -0,183. Namun demikian, korelasi antara jumlah penduduk usia produktif dan tingkat kesempatan kerja tidak signifikan. Artinya, bertambahnya jumlah penduduk usia produktif akan mengurangi tingkat kesempatan kerja. Kondisi ini menandakan bahwa kompetisi kerja semakin besar ketika jumlah penduduk usia produktif meningkat. Sementara itu, lapangan pekerjaan yang tidak begitu besar memberikan peluang kerja menyebabkan tingkat kesempatan kerja menjadi semakin berkurang.

Meskipun TKK di tahun 2019 sempat meningkat dibandingkan TKK tahun 2018, namun demikian di masa pandemi pengangguran di Kebumen meningkat. Pengangguran di Kabupaten Kebumen mengalami kenaikan selama pandemi Covid-19. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disnakerkukm) Kabupaten Kebumen mencatat selama tujuh bulan pandemi sebanyak 11.003 pengangguran lahir di Kebumen. Disamping banyak PHK, faktor perusahaan yang menutup diri (tidak membuka lowongan pekerjaan) dan lulusan yang belum terserap, menjadikan angka pengangguran naik (Mrapat.id, 2020).

Sebelum masa pandemi pun sebenarnya angka pengangguran di Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 angka pengangguran mencapai

sebesar 3,25 %, kemudian meningkat menjadi 5,2 % di tahun 2019 atau lebih tinggi dibanding Jawa Tengah (4,43 %) dan Nasional (4 %).

Tabel III.6.
Korelasi Usia Produktif dan Tingkat Kesempatan Kerja

Correlations			
		TingkatKesempatanKerja	UsiaProduktif
TingkatKesempatanKerja	Pearson Correlation	1	.093
	Sig. (2-tailed)		.826
	N	8	8
UsiaProduktif	Pearson Correlation	.093	1
	Sig. (2-tailed)	.826	
	N	8	8

Catatan: Correlation is not significant at the 0.01 level (2-tailed).

3.3. Kemiskinan

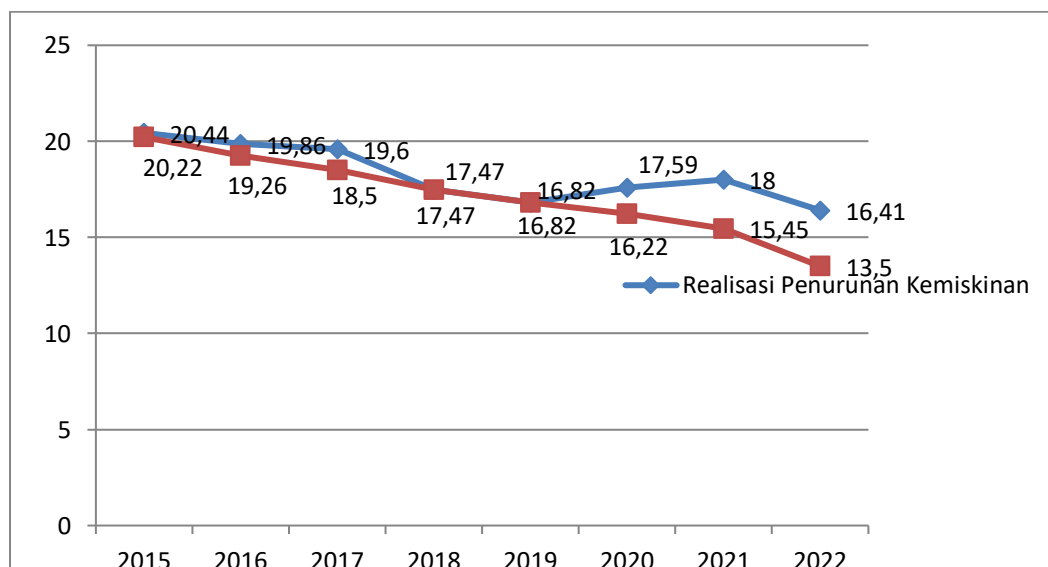
Kinerja angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2015-2019 menunjukkan tren yang menurun sampai dengan tahun 2019. Bahkan capaian penurunan kemiskinan pada tahun 2018 dan 2019 telah melampaui target kinerja pada dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2016 – 2021. Selama kurun waktu 2015 – 2020 angka kemiskinan turun 2,85% atau sekitar 0,47% per tahunnya. Jika dilihat dari penduduk miskin selama kurun waktu 2015 – 2020 jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 30.810 jiwa atau berhasil mengurangi rata-rata 5.135 jiwa per tahun. Kinerja penurunan kemiskinan ini akan terus didorong sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen. Namun demikian, pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin menurun menjadi 196.160 jiwa atau turun 7,91 persen. Selama kurun waktu 2015-2022 kinerja penurunan prosentase penduduk miskin paling tinggi ada pada tahun 2018 yaitu turun sebesar 2,13% atau sebesar 24.800 jiwa.

Peningkatan Jumlah Penduduk Miskin merupakan salah satu dampak Pandemi covid 19 yang mengakibatkan perubahan status masyarakat dari rentan miskin menjadi miskin. Pandemi covid 19 berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat karena pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Menurunnya pendapatan masyarakat terjadi terutama pada masyarakat yang bekerja pada sektor non formal yang

diakibatkan penurunan daya beli maupun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Selain itu Covid-19 mengakibatkan terjadinya peningkatan pengangguran, penurunan tingkat produktivitas individu maupun perusahaan, dan mendorong munculnya orang miskin baru yang secara agregat meningkatkan jumlah penduduk miskin. Secara rinci perkembangan persentase penduduk miskin Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada Grafik berikut:

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, kinerja penurunan persentase penduduk miskin Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2016-2022 sebesar 2,27% masih perlu ditingkatkan. Namun demikian, Persentase penurunan kemiskinan Kabupaten Kebumen tersebut masih lebih tinggi dari pada Provinsi Jawa Tengah sebesar 3,18. Sementara itu jika dibandingkan dengan Kabupaten tetangga, persentase penurunan kemiskinan Kabupaten Kebumen berada dibawah Kabupaten Cilacap, Banyumas dan Wonosobo. Persoalan kemiskinan ini masih akan menjadi pekerjaan rumah karena persentasenya yang masih cukup tinggi. Perlu upaya-upaya yang komprehensif untuk meningkatkan akselerasi penurunan penduduk miskin.

Gambar III.19
Target dan Realisasi Penurunan Penduduk Miskin



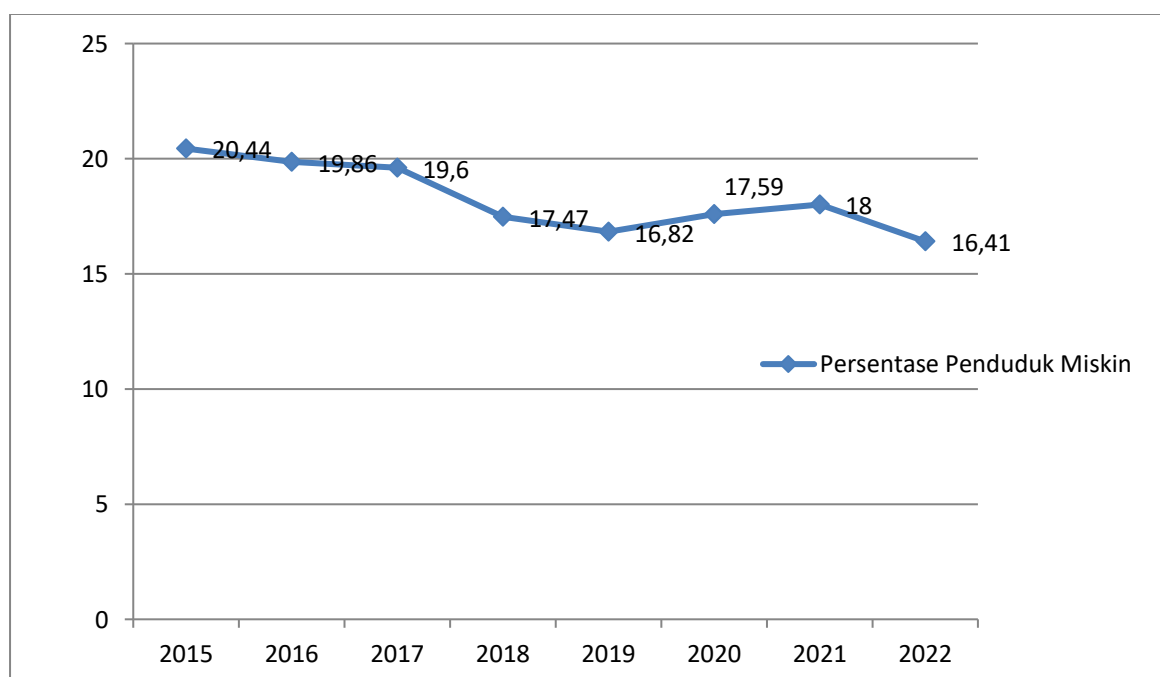
Sumber : BPS, 2021

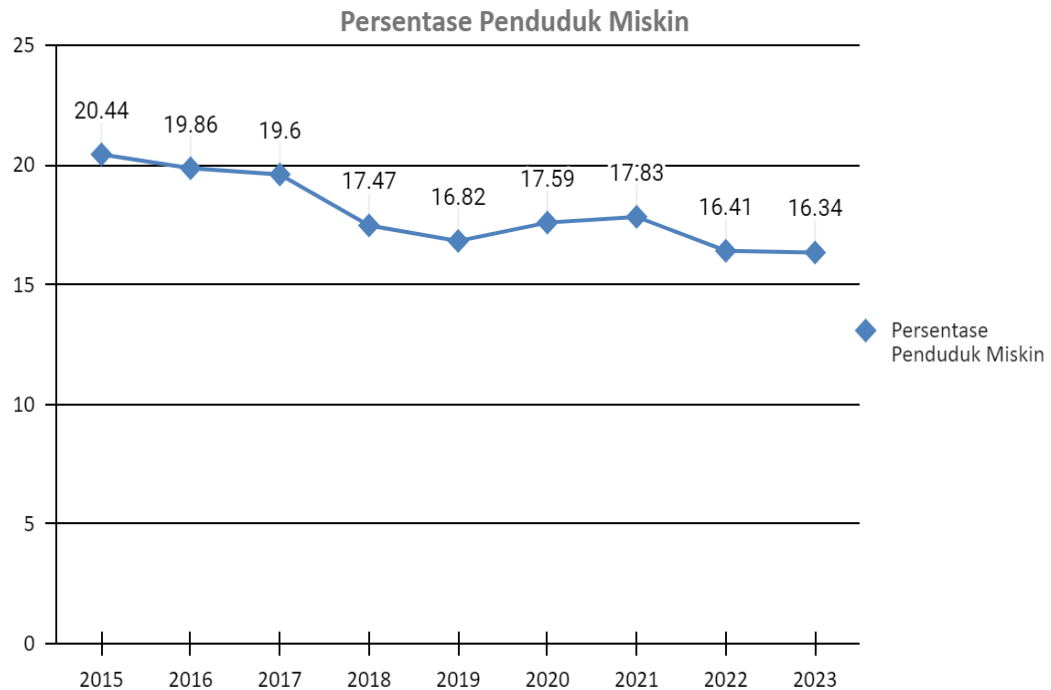
Namun demikian, kondisi tersebut berbeda pada tahun 2020. Salah satu penyebab kemiskinan adalah wabah virus corona yang lebih dikenal dengan pandemi Covid-19 telah mengguncang dunia sejak akhir tahun 2019. Pandemi ini menyebar secara global meliputi area geografis yang luas. Pada awal maret 2020, Covid-19 masuk ke Indonesia dengan jumlah terinfeksi yang terus meningkat dan wilayah sebaran yang semakin meluas, sehingga dinyatakan sebagai bencana nasional non alam.

Pemberlakuan berbagai kebijakan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 mengakibatkan banyak kegiatan ekonomi yang mengalami kontraksi bahkan terhenti bereproduksi. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan pengangguran, penurunan tingkat produktivitas individu maupun perusahaan, dan mendorong munculnya orang miskin baru yang secara agregat meningkatkan jumlah penduduk miskin. Sehubungan dengan itu, pemerintah perlu mengupayakan penanggulangan kemiskinan, baik yang sifatnya jangka pendek, menengah maupun jangka Panjang. Hal tersebut menjadikan angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen meningkat 0,008 % dari tahun sebelumnya menjadi 18 % dengan jumlah penduduk sebanyak 213.000 jiwa. Namun seiring dengan berakhirnya pandemi Covid-19, jumlah penduduk miskin menurun menjadi 16,41 pada tahun 2022.

Gambar III.22.

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kebumen





Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Tabel III.7.

Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2021

Tahun	Jumlah Pend. Miskin	Persentase Pend. Miskin (%)	Jumlah penurunan	Persentase penurunan
2015	241.900	20,44	35.380	0,146
2016	235.900	19,86	6.000	0,025
2017	233.500	19,60	2.400	0,010
2018	208.700	17,47	24.800	0,119
2019	201.340	16,82	7.360	0,037
2020	211.090	17,59	-9.750	-0,046
2021	213.000	18,00	-1.910	-0,008

Tahun	Jumlah Pend. Miskin	Persentase Pend. Miskin (%)	Jumlah penurunan	Persentase penurunan
2022	196.160	16,41	-16.840	-1,54
2023	195.450	16,34	-16.840	-1,54

Sumber : BPS Kabupaten Kebumen, 2022

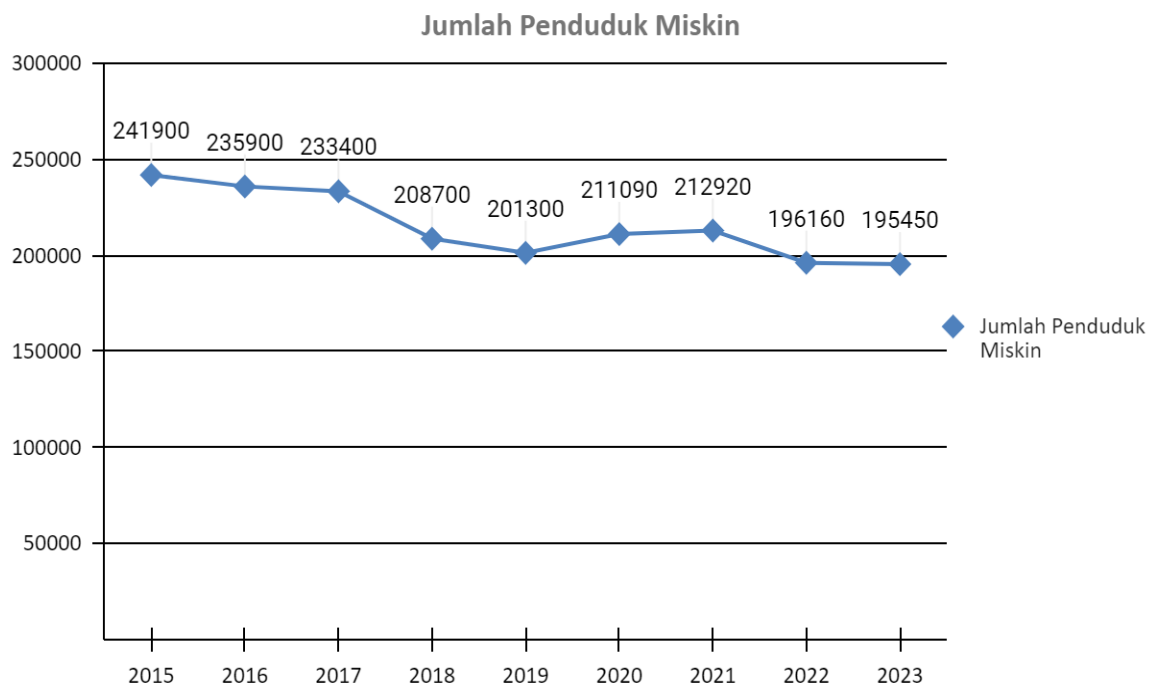
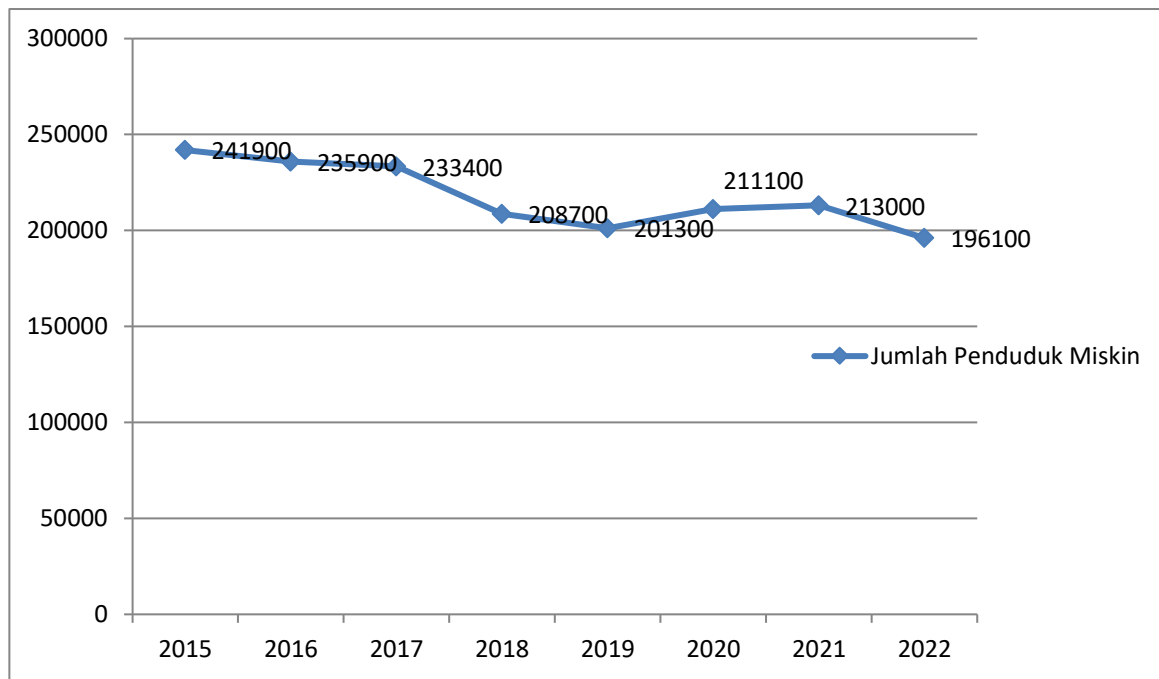
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2023

Tahun	Jumlah Pend. Miskin	Persentase Pend. Miskin (%)	Jumlah penurunan	Persentase penurunan
2015	241.900	20,44	35.380	0,146
2016	235.900	19,86	6.000	0,025
2017	233.500	19,60	2.400	0,010
2018	208.700	17,47	24.800	0,119
2019	201.340	16,82	7.360	0,037
2020	211.090	17,59	-9.750	-0,046
2021	213.000	17,83	-1.910	-0,008
2022	196.160	16,41	16.840	-1,54
2023	195.450	16,34	710	-1,54

Sumber : BPS Kabupaten Kebumen, 2023

Gambar III.21

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin



Sumber : BPS Kabupaten Kebumen, 2023

Meningkatnya angka kemiskinan ini tidak lepas dari bertambahnya angka ketergantungan. Meskipun pada tahun 2017 angka ketergantungan mengalami penurunan, namun kembali meningkat pada tahun 2019 dan 2021. Kondisi ini tentu saja meningkatkan angka kemiskinan.

Semakin tinggi rasio ketergantungan maka artinya makin tinggi beban yang ditanggung oleh penduduk yang tidak produktif, sementara itu bila rasio ketergantungan makin rendah, maka makin rendah beban yang ditanggung usia produktif untuk menopang biaya penduduk yang memiliki usia tidak produktif (Utami, 2020).

Angka beban ketergantungan ini bisa mempengaruhi ketimpangan pendapatan di suatu wilayah. Hal ini dikarenakan ketidakstabilan antara pendapatan yang diperoleh dengan biaya pengeluaran untuk menanggung biaya hidup usia produktif dan tidak produktif guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Teori ini diperkuat dengan hasil pengujian yang menemukan bahwa angka ketergantungan berkorelasi positif dengan angka kemiskinan dengan koefisien korelasi sebesar 0,639. Meskipun hanya signifikan di level 0,15 atau 85 persen, pengujian ini membuktikan bahwa peningkatan angka ketergantungan akan diikuti dengan peningkatan jumlah penduduk miskin.

Tabel III.8
Korelasi Angka Ketergantungan dan Kemiskinan

Correlations			
		AngkaKetergantungan	PendudukMiskin
AngkaKetergantungan	Pearson Correlation	1	.639
	Sig. (2-tailed)		.088
	N	8	8
PendudukMiskin	Pearson Correlation	.639	1
	Sig. (2-tailed)	.088	
	N	8	8

Catatan: Correlation is significant at the 0.15 level (2-tailed).

Disamping itu, pengujian data juga menunjukkan bahwa usia produktif berkorelasi negatif dengan angka kemiskinan. Tabel 5 menunjukkan kekuatan korelasi antara usia produktif dengan jumlah penduduk miskin sebesar -0,267. Korelasi ini termasuk lemah serta secara statistik tidak didukung dengan data yang memadai. Namun demikian, data ini menandakan bahwa semakin besar usia produktif maka akan diikuti dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin. Penduduk dengan usia produktif ini tentu saja dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Dengan meningkatnya penduduk usia produktif maka akan dapat menekan angka kemiskinan. Namun demikian, tentu saja kondisi ini sangat tergantung pada peluang atau kesempatan kerja yang tersedia. Jika lapangan kerja

dapat mengakomodasi penduduk produktif, maka akan dapat memberikan efek positif terhadap upaya pengurangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen.

Tabel III.9
Korelasi Usia Produktif dan Kemiskinan

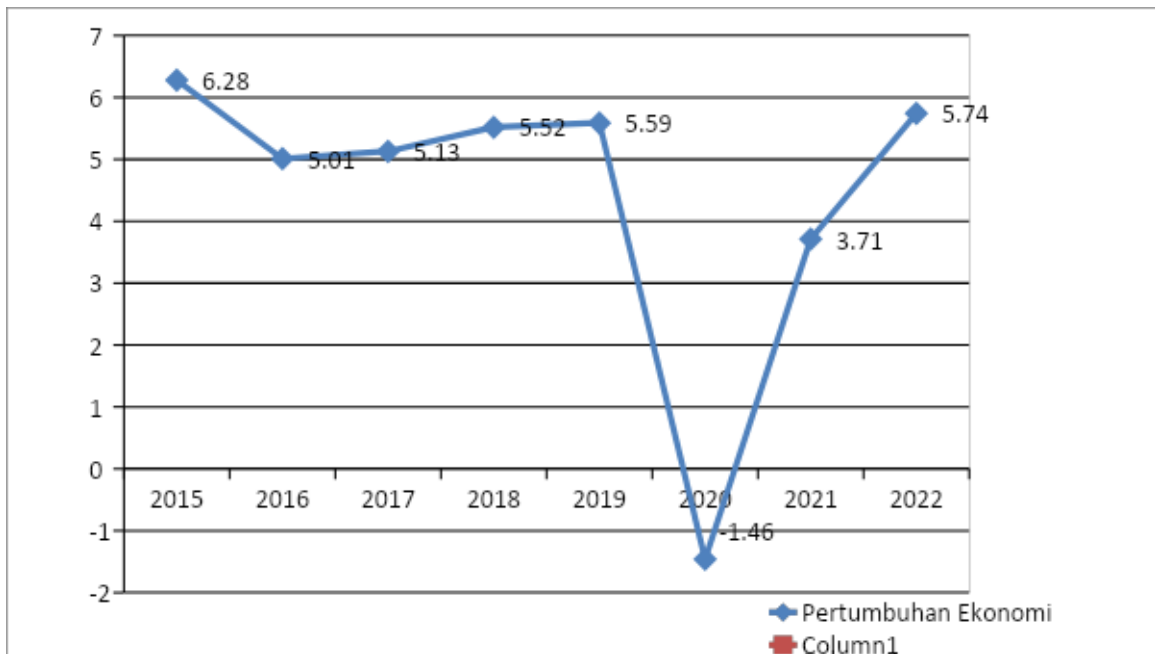
		kemiskina n	Usia_Produkti f
kemiskina n	Pearson Correlation	1	-,267
	Sig. (2-tailed)		,507
	N	6	6
Usia_Produkti	Pearson Correlation	-,267	1
	Sig. (2-tailed)	,507	
	N	6	6

Catatan: Korelasi tidak signifikan pada level 0,15 (2-tailed).

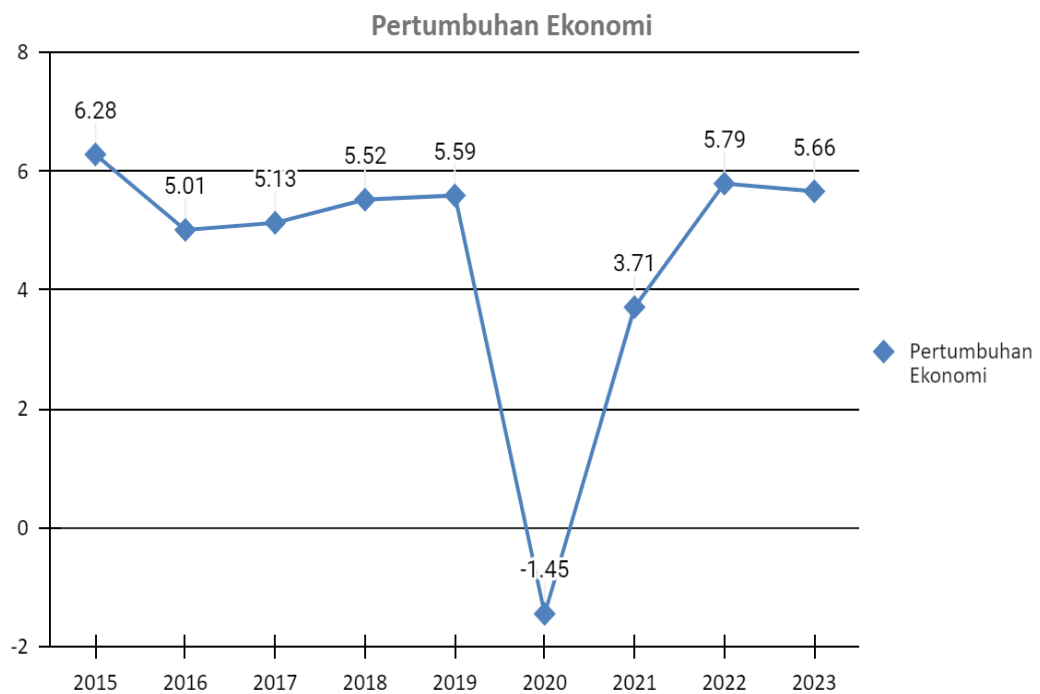
3.4. Pertumbuhan ekonomi

Sejak 2015 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Baru pada 2018 pertumbuhan ekonomi mengalami sedikit kenaikan dan kemudian mencapai 5,59 persen pada 2019. Namun demikian, dampak pandemi memberikan efek negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada 2020, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kebumen menurun tajam hingga kisaran minus 1,46 persen. Seiring dengan menurunnya dampak pandemi Covid-19, upaya pemulihan ekonomi membuahkan hasil positif dalam bentuk pertumbuhan ekonomi sebesar 3,71 persen pada 2021.

Gambar III.22
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: BPS (2021)



Sumber: Kebumen dalam Angka, 2024

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kebumen di tahun pertama masa pandemi sebenarnya jauh lebih baik daripada rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Menurut BPS Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Triwulan II-2020 (*y-on-y*) yang tercatat minus 1,46 persen. Upaya pemulihan di tahun 2021 meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tercatat positif 3,71 persen.

Tabel III.10
Peranan PDRB Kabupaten Kebumen Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2016-2021 (%)

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	23,25	22,63	21,29	21,79	21,88	20,38	20,03
B	Pertambangan dan Penggalian	5,08	4,99	4,87	5,09	4,92	4,60	4,29
C	Industri Pengolahan	20,06	20,30	20,70	21,27	21,31	21,78	22,24
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi	7,17	7,20	7,25	7,05	7,38	7,77	7,93
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,88	15,01	15,33	14,84	15,18	15,18	14,67
H	Transportasi dan Pergudangan	4,04	4,07	4,15	3,30	3,35	5,19	3,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,08	2,10	2,17	2,04	2,08	2,55	2,73
J	Informasi dan Komunikasi	1,89	2,05	2,23	2,55	2,56	2,38	2,38
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,99	2,90	2,82	2,88	2,89	2,88	2,72
L	Real Estat	1,25	1,21	1,22	1,22	1,18	1,16	1,13

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
M, N	Jasa Perusahaan	0,35	0,36	0,38	0,36	0,35	0,35	0,35
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,43	3,29	3,23	3,23	3,08	2,90	2,83
P	Jasa Pendidikan	9,81	10,08	10,40	10,42	10,02	9,30	9,06
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,14	1,17	1,22	1,38	1,33	9,30	1,23
R,S, T,U	Jasa Lainnya	2,47	2,53	2,63	2,47	2,37	2,67	2,00

Sumber : PDRB dan data diolah, 2020

Pada tahun 2021, sektor yang memberi kontribusi terbesar masih berada pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 21,88 %. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,09 %. Sedangkan sektor pemberi kontribusi terbesar kedua adalah sektor industri pengolahan sebesar 21,31 %. Kontribusi sektor industri pengolahan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 0,04%. Sektor yang memberikan kontribusi terbesar ketiga adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,18%. Sektor tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,34%.

Tabel III.11.

Korelasi Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi

Correlations		PertumbuhanEkonomi	JumlahPenduduk
PertumbuhanEkonomi	Pearson Correlation	1	-.363
	Sig. (2-tailed)		.377
	N	8	8
JumlahPenduduk	Pearson Correlation	-.363	1
	Sig. (2-tailed)	.377	
	N	8	8

****. Correlation is significant at the 0.15 level (2-tailed).

Perekonomian dan penduduk adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena (pertumbuhan) ekonomi adalah hasil dari aktivitas penduduk dan juga merupakan instrumen untuk mengukur kesejahteraan penduduk. Penduduk adalah pelaku pertumbuhan ekonomi. Penduduk menjadi subjek dan objek dari ekonomi. Dalam konteks analisis dampak kependudukan, variabel jumlah penduduk berperan besar terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah.

Perkembangan jumlah penduduk tentu saja memberikan pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan memberikan tekanan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian data menunjukkan bahwa jumlah penduduk berkorelasi negatif dengan pertumbuhan ekonomi (lihat Tabel III.11). Uji korelasi bivariate product moment menghasilkan koefisien korelasi sebesar minus 0,363 namun tidak signifikan. Artinya, meningkatnya jumlah penduduk secara bersamaan diikuti dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, penduduk menjadi isu penting yang patut mendapatkan perhatian pemerintah agar tidak memberikan dampak negatif terhadap perekonomian.

3.5. Indeks Pembangunan Manusia

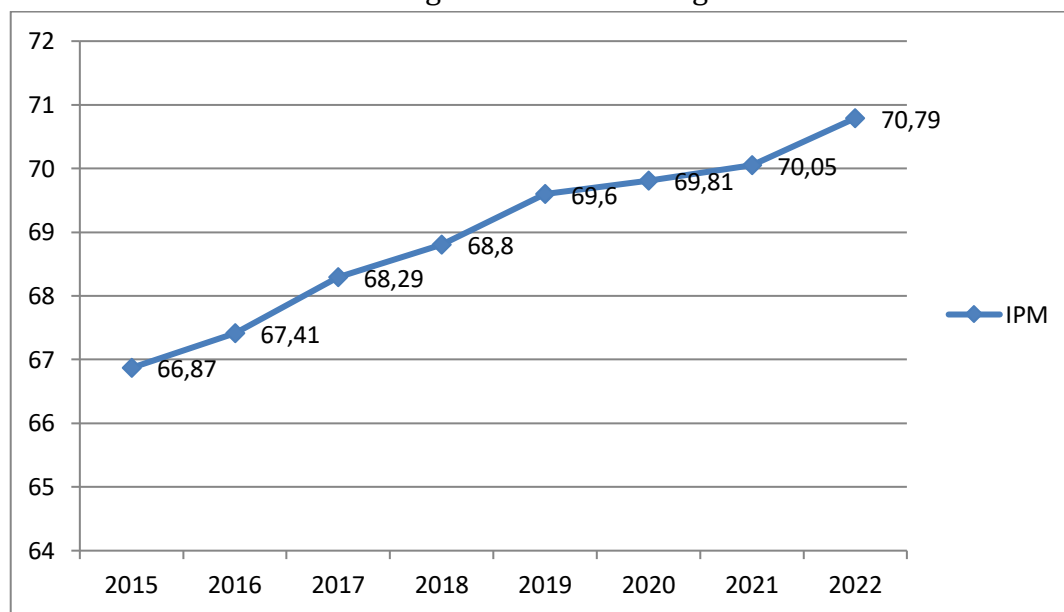
IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu: umur Panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan penghidupan yang layak. IPM terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu: Pendidikan, Kesehatan dan ekonomi (daya beli).

Pembangunan manusia di Kebumen pada tahun 2021 mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kebumen. Meskipun terimbas wabah Covid-19, IPM Kebumen tahun 2021 masih mampu tumbuh positif 0,24 point menjadi 70,05 pada tahun 2021. Setelah pandemic selesai, IPM mengalami kenaikan menjadi 70,79. Menariknya, walaupun peningkatan belum mampu mencapai rata-rata IPM Jawa Tengah (72,16), kondisi ini menunjukkan adanya upaya perbaikan kualitas penduduk oleh pemerintah Kabupaten Kebumen.

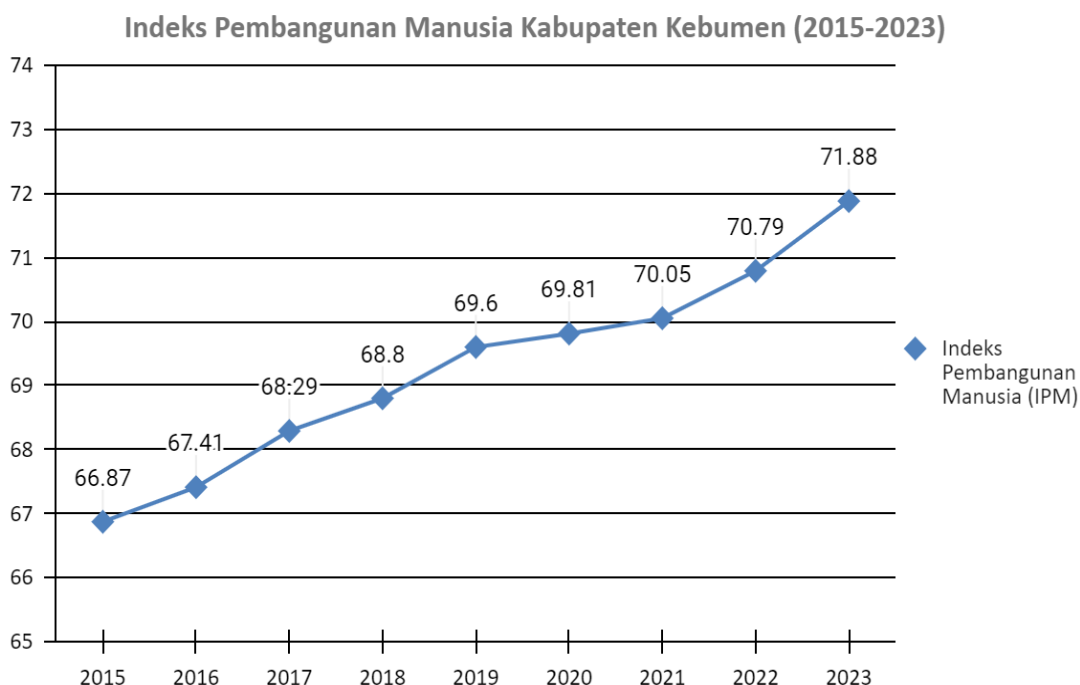
Dampak kependudukan terhadap IPM dapat dilihat pada Tabel 6 yang menunjukkan bahwa bertambahnya angka ketergantungan menyebabkan penurunan

IPM. Hal ini dapat dijelaskan bahwa angka ketergantungan yang meningkat telah menyebabkan beban ekonomi yang ditanggung penduduk produktif terhadap yang tidak produktif semakin bertambah. Tentu saja hal ini menyebabkan beban ekonomi yang besar bagi penduduk yang produktif. Apabila angka ketergantungan ini tidak ditekan, maka IPM akan semakin merosot. IPM sendiri mengukur aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Penurunan angka IPM mencerminkan penurunan dalam kualitas kesehatan, pendidikan dan daya beli ekonomi masyarakat

Gambar III.23
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia



Sumber : BPS,2022



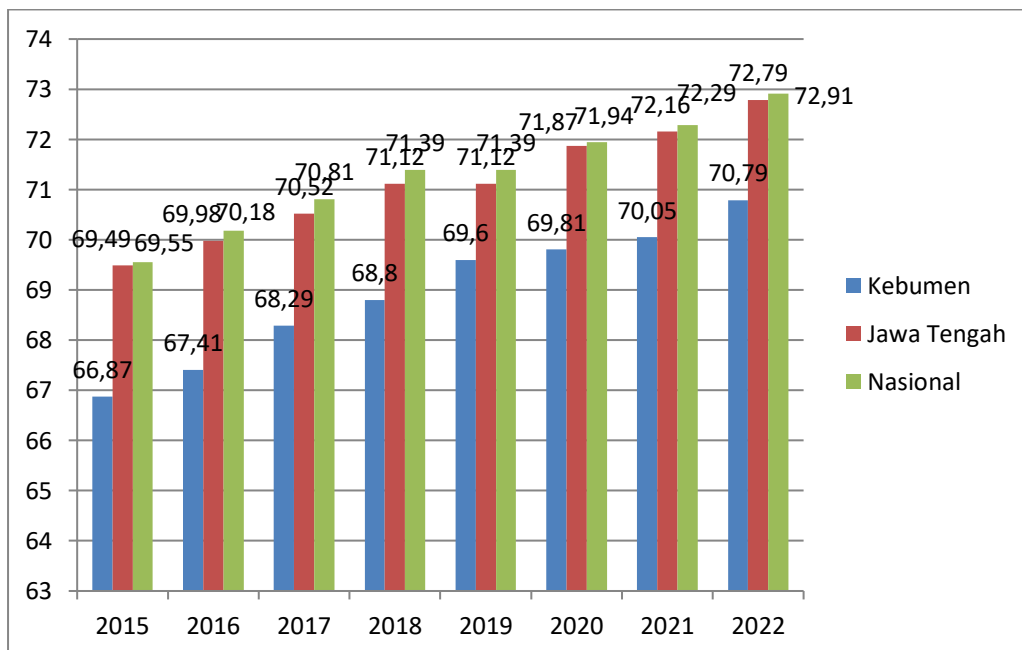
Sumber : BPS, 2024

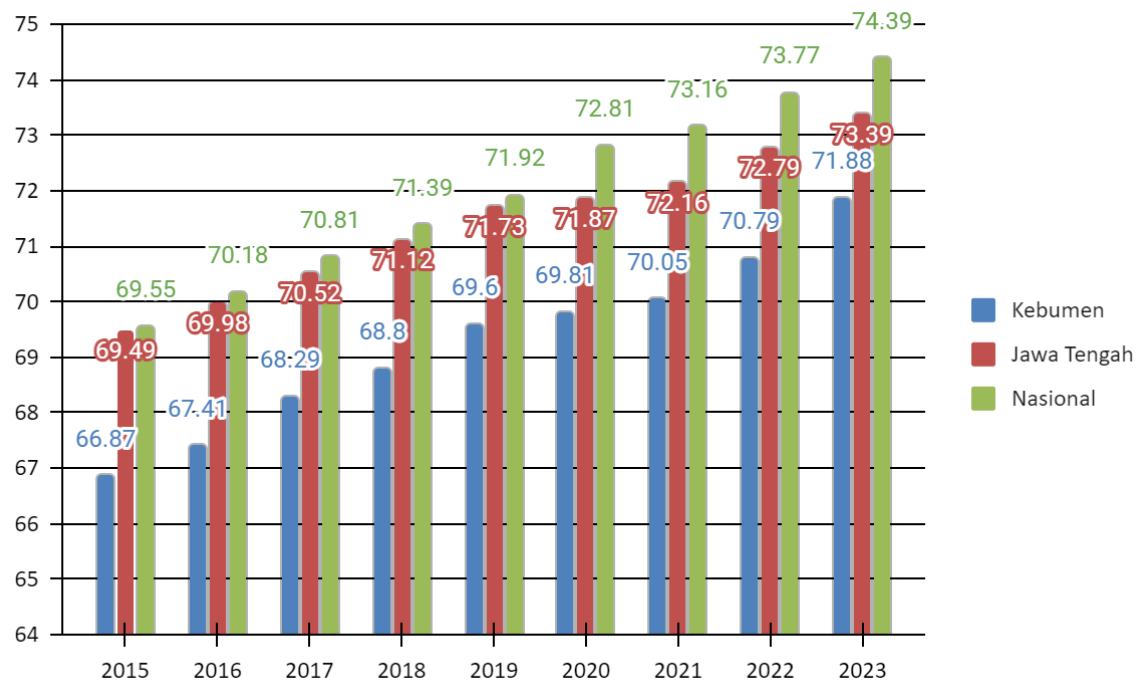
Keberhasilan pembangunan manusia tidak saja diukur dari tingginya capaian angka IPM, tetapi juga kecepatan dalam peningkatan IPM. Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran reduksi shortfall per tahun. Semakin rendah kecepatan peningkatan IPM, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai IPM yang ideal yaitu 100. Kecepatan Kabupaten Kebumen untuk mencapai IPM ideal per tahun berfluktuasi. Kecepatan Kabupaten Kebumen tahun 2015-2021 berkisar pada angka 0,21 sampai 1,83 persen, dengan pertumbuhan tercepat pada tahun 2015 yaitu sebesar 1,83 persen.

Pembangunan manusia di Kebumen pada tahun 2022 mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kebumen. Meskipun terimbas wabah Covid-19, IPM Kebumen tahun 2022 masih mampu tumbuh positif 0,74 point menjadi 70,79 dibandingkan tahun 2021. Status pembangunan manusia di Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 bertaraf SEDANG. Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) 73,70 tahun. Rata-Rata lama sekolah (RLS 25 th+) adalah 7,85 dan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah 13,36 tahun. Sementara itu, pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan sebesar 9.282 Ribu Rp/orang/Tahun. Sementara itu, jika dibandingkan Jawa Tengah, IPM Kabupaten Kebumen masih di bawah IPM Jawa Tengah (72,79). Tren IPM Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen 2015 – 2022 sebagai berikut:

Gambar III.24

Perbandingan IPM Kebumen dengan Jawa Tengah dan Nasional





Sumber: BPS, 2024

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Aspek umur panjang dan hidup sehat diukur melalui indikator Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH), Aspek pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Aspek standar hidup layak diukur melalui indikator Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan.

Tabel III.12
Kinerja IPM Kabupaten Kebumen

No.	Indikator Kinerja	Capaian						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Pembangunan Manusia	67,41	68,29	68,8	69,6	69,81	70,05	70,79
	Laki-Laki	<i>n/a</i>	72,00	72,49	73,15	73,39	73,63	-
	Perempuan	<i>n/a</i>	66,73	67,48	68,28	68,29	68,52	-
2	Harapan Lama Sekolah	12,61	12,90	12,91	13,04	13,34	13,35	13,36
	Laki-Laki	<i>n/a</i>	12,87	12,88	13,01	13,33	13,34	-
	Perempuan	<i>n/a</i>	12,94	13,35	13,48	13,53	13,54	-
3	Rata-Rata Lama Sekolah	7,05	7,29	7,34	7,53	7,54	7,55	7,85
	Laki-Laki	<i>n/a</i>	7,90	7,94	7,97	7,98	7,99	-
	Perempuan	<i>n/a</i>	6,82	6,87	7,09	7,10	7,11	-
4	Angka Harapan Hidup	72,87	72,98	73,11	73,22	73,40	73,55	73,70
	Laki-Laki	<i>n/a</i>	71,02	71,15	71,26	71,50	71,65	-
	Perempuan	<i>n/a</i>	74,83	74,96	75,06	75,24	75,41	-
5	Pengeluaran Perkapita	8,276	8,446	8,757	9,066	8,901	9,02	9,282

Laki-Laki	<i>n/a</i>	10,988	11,396	11,904	11 636	11 811	-
Perempuan	<i>n/a</i>	7,895	8,037	8,305	8 205	8 304	-

Sumber : BPS Jateng, 2022

Kesejahteraan penduduk yang diukur dengan IPM berhubungan erat dengan dampak kependudukan. Salah satu variabel kependudukan yang penting adalah rasio ketergantungan. Dari hasil uji korelasi ditemukan bahwa angka ketergantungan berkorelasi negatif dengan Indeks Pembangunan Manusia sebesar -0,406 namun tidak signifikan. Artinya, semakin besar angka ketergantungan maka akan diikuti dengan semakin kecilnya IPM. Oleh karena itu, perkembangan jumlah penduduk usia produktif harus didukung dengan peningkatan keterampilan atau keahlian sehingga memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan ataupun membuka lapangan usaha.

Tabel III.13
Korelasi Angka Ketergantungan dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten
Kebumen

Correlations			
		IPM	AngkaKetergantungan
IPM	Pearson Correlation	1	-.406
	Sig. (2-tailed)		.366
	N	7	7
AngkaKetergantungan	Pearson Correlation	-.406	1
	Sig. (2-tailed)	.366	
	N	7	7

** . Correlation is significant at the 0.10 level (2-tailed).

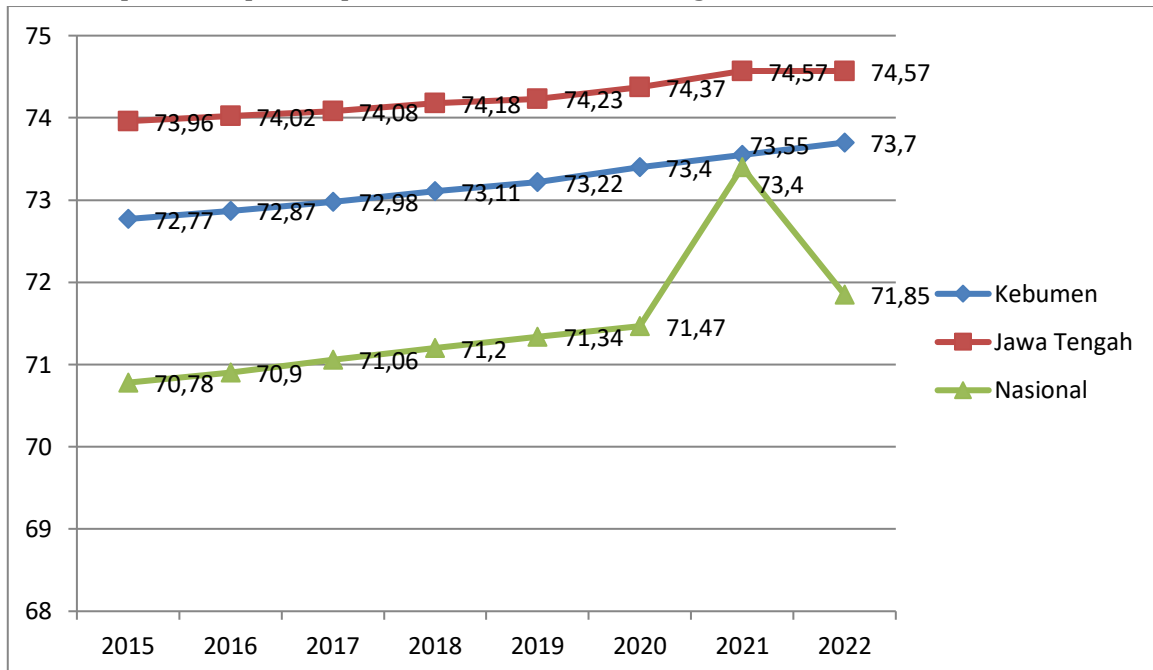
Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup saat lahir merupakan indikator yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam penghitungan IPM. Umur Harapan Hidup saat lahir merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, maupun kualitas kesehatan. Secara tidak langsung, peningkatan Umur Harapan Hidup menunjukkan derajat kesehatan

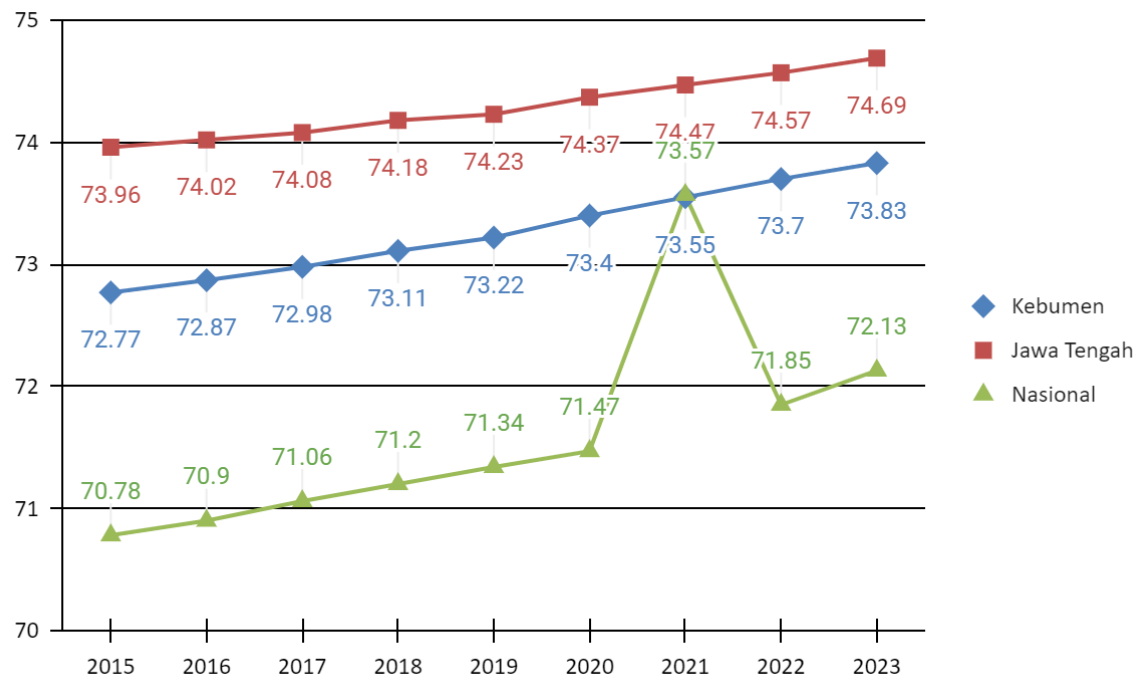
masyarakat yang semakin baik dalam semua aspek kesehatan. Status pembangunan manusia di Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 bertaraf SEDANG. Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 adalah 73,70 tahun, rata-rata pertumbuhannya sebesar 0,93 persen per tahun. Hal ini mengindikasikan jika kualitas hidup masyarakat dari sisi derajat kesehatan semakin baik, meskipun jika dibandingkan dengan Jawa Tengah, UHH Kabupaten Kebumen masih lebih rendah, dimana UHH Jawa Tengah adalah sebesar 74,57. Sedangkan jika disandingkan dengan nasional, UHH Kabupaten Kebumen lebih tinggi, dimana UHH Nasional hanya sebesar 71,85 tahun.

Gambar III.14

Usia Harapan Hidup Kabupaten kebumen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2022



Sumber : BPS, 2021



Sumber: BPS, 2024

Komposisi penduduk tua bertambah di Kabupaten Kebumen bertambah, hal ini disebabkan oleh penurunan angka fertilitas dan mortalitas, serta peningkatan angka harapan hidup, yang mengubah struktur penduduk serta secara keseluruhan. Proses terjadinya penuaan penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya peningkatan gizi, sanitasi, pelayanan Kesehatan, hingga kemajuan tingkat Pendidikan dan sosial ekonomi yang semakin baik.

Secara global populasi lansia diprediksi terus mengalami peningkatan. Peningkatan baik secara global, Asia dan Indonesia dari tahun 2015 sudah memasuki era penduduk menua (*ageing population*) karena jumlah penduduk yang berusia 60 tahun ke atas melebihi angka 7 persen (Kemenkes RI, 2017).

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang mengalami *ageing population* pada 2022. Dengan jumlah lansia sebanyak 128.406 atau 9,11 persen 13,37 persen dari total penduduk Kabupaten Kebumen yaitu 1.409.951 jiwa. Dengan kata lain, penduduk usia tua justru mengalami penurunan sebanyak 4,26 persen pada tahun 2022.

Dalam perencanaan pembangunan di suatu wilayah, pemahaman mengenai kondisi penduduk memegang peranan sangat penting. Ketersediaan data kependudukan yang terpercaya akan memudahkan para perumus pembangunan menentukan rencana-

rencana strategis mereka, misalnya perencanaan dalam penyediaan fasilitas Kesehatan, Pendidikan, permukiman, dan lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakatnya. Pemahaman yang baik mengenai kependudukan, seperti struktur, laju pertumbuhan penduduk, dan rasio jenis kelamin, dapat digunakan untuk sebagai dasar perencanaan pembangunan di suatu wilayah ke depannya.

Untuk mendapatkan penduduk usia lanjut yang produktif, diperlukan program-program pembangunan yang berbasis kependudukan dan program itu bersifat jangka Panjang. Manfaat dari program pembangunan ini tidak langsung dapat dirasakan, misalnya dengan pembangunan yang mengutamakan peningkatan sumber daya. Pembangunan yang memfokuskan pada kualitas sumber daya manusia akan memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan di sebuah wilayah. Hal ini karena besarnya jumlah penduduk yang berkualitas akan menjadi modal pembangunan dan sebaliknya, banyaknya jumlah penduduk dapat menjadi beban dari suatu pemerintahan jika kualitas penduduknya rendah.

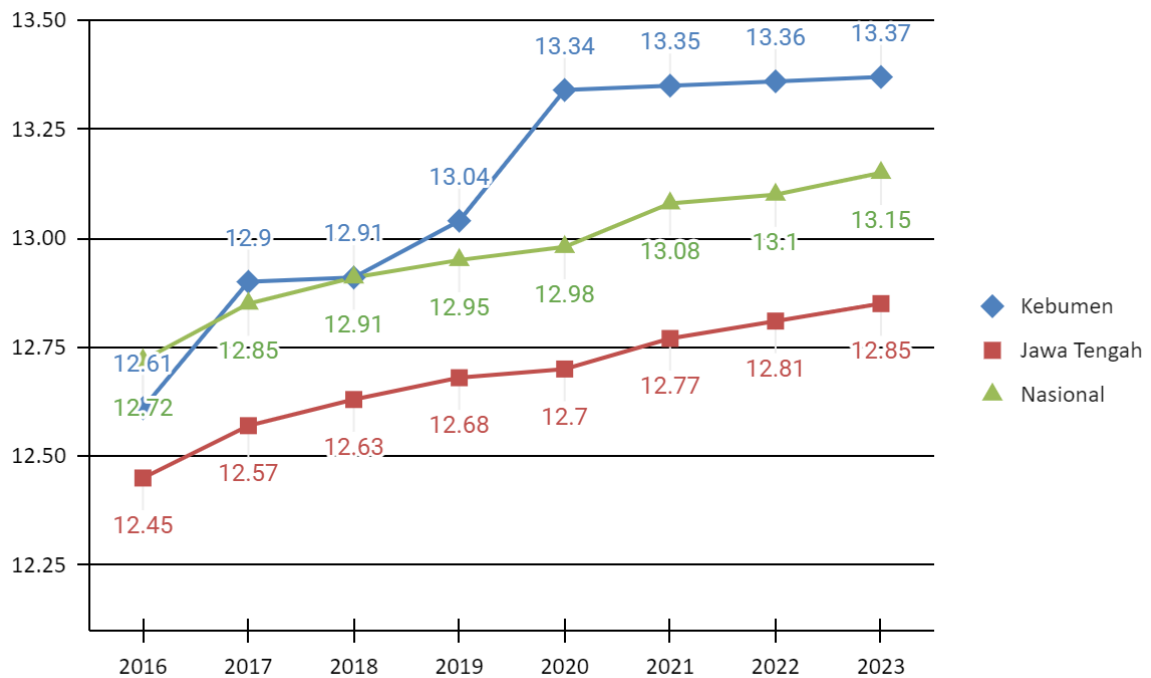
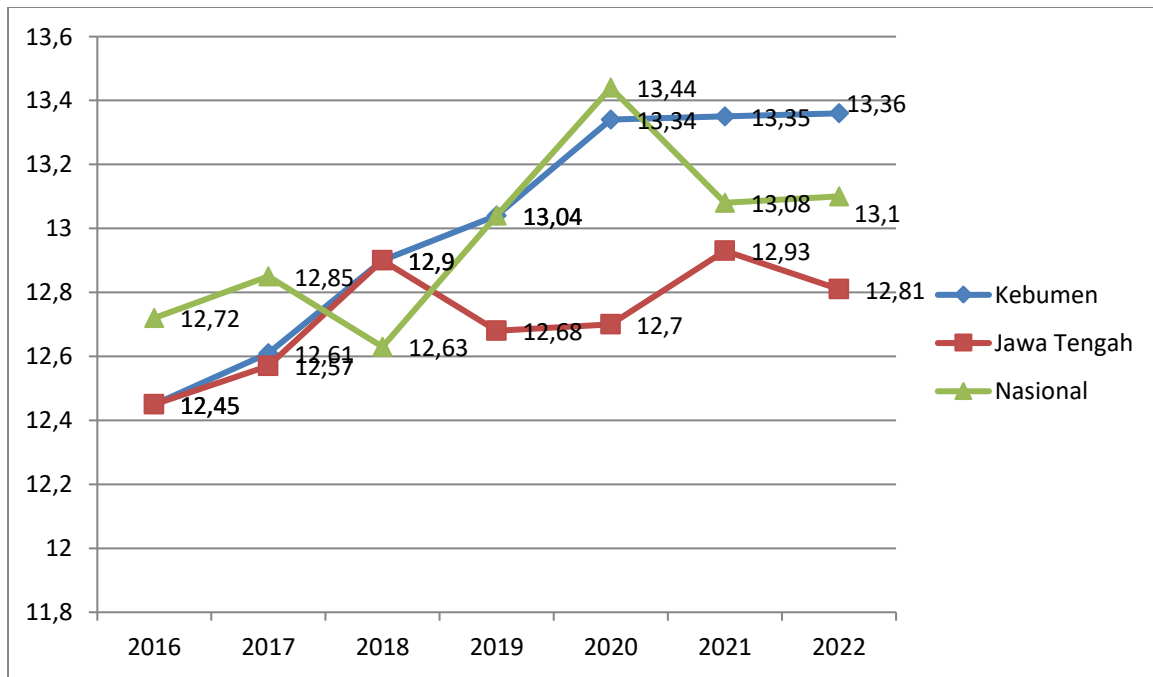
Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. HLS Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 sebesar 13,36 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,36 tahun atau setara dengan Diploma 1.

HLS Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 adalah sebesar 13,36 tahun. Angka tersebut lebih tinggi dari HLS di Jawa Tengah maupun HLS Nasional. Kinerja peningkatan HLS di Kabupaten Kebumen sudah baik karena pada tahun 2016 dan 2017 HLS Kabupaten Kebumen cenderung di atas HLS Provinsi dan Nasional

Gambar III.15

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 - 2022



Sumber: BPS, 2024

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

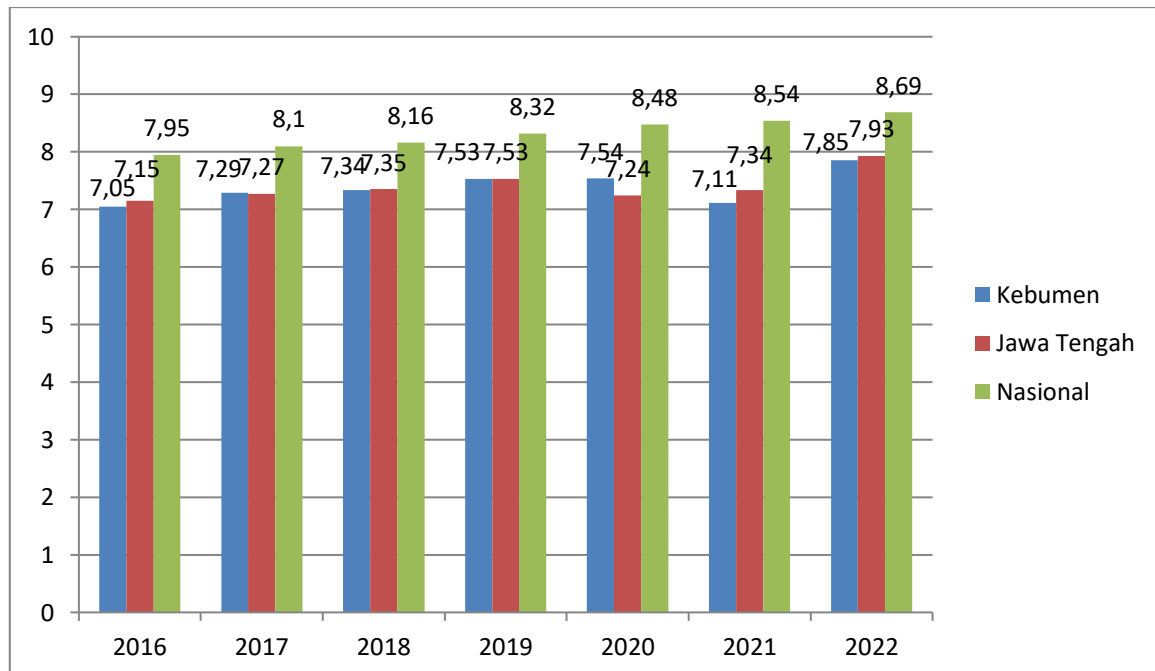
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak

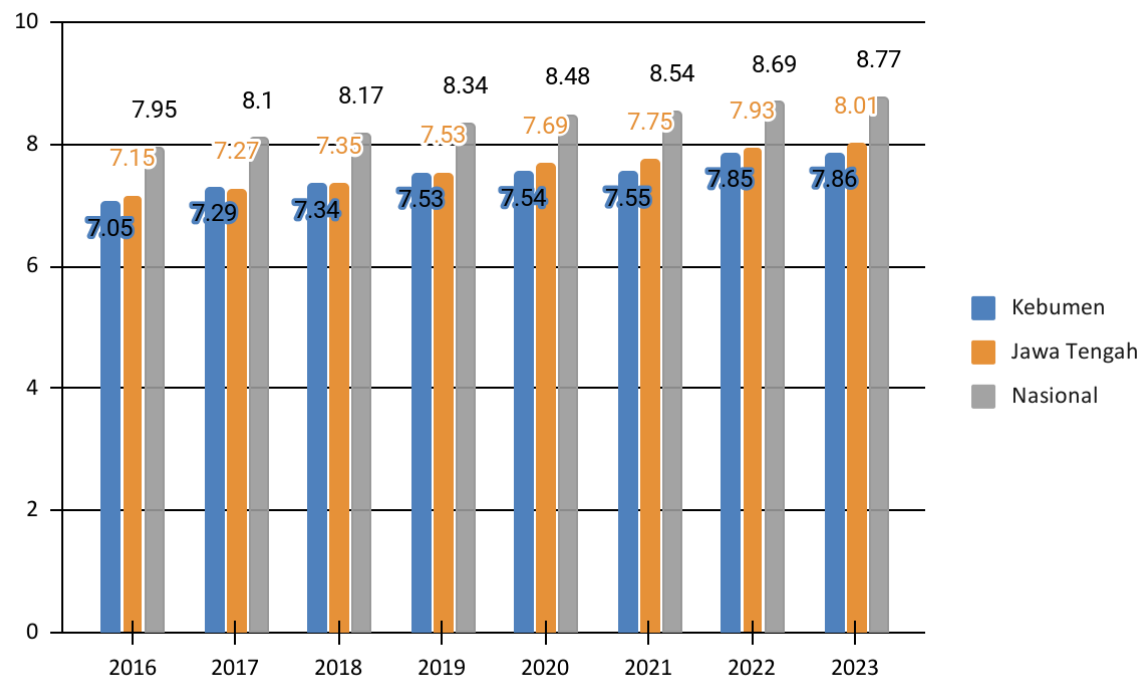
RLS dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. RLS Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 sebesar 7,85 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Indonesia yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,85 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII.

Sementara itu, RLS Kabupaten Kebumen tahun 2022 adalah sebesar 7,85 tahun. Namun jika dibandingkan dengan RLS nasional, angka tersebut masih cukup rendah karena RLS nasional telah mencapai angka 8,69 tahun.

Gambar III.16
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – 2021



Sumber : BPS Jateng, 2021



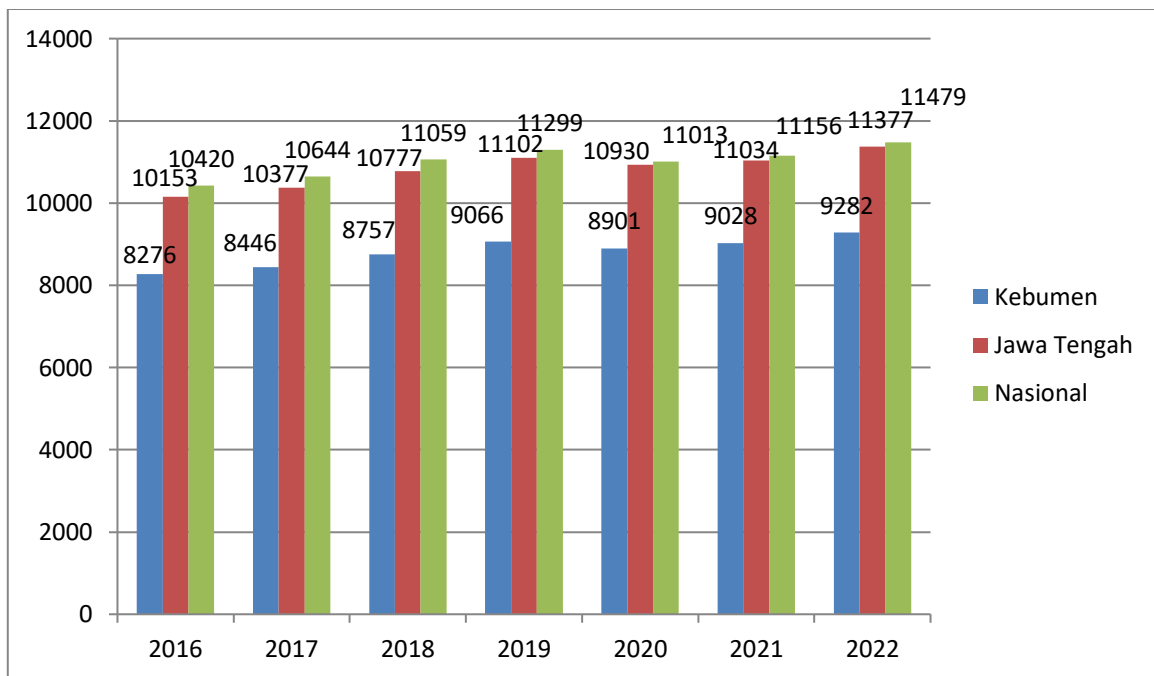
Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

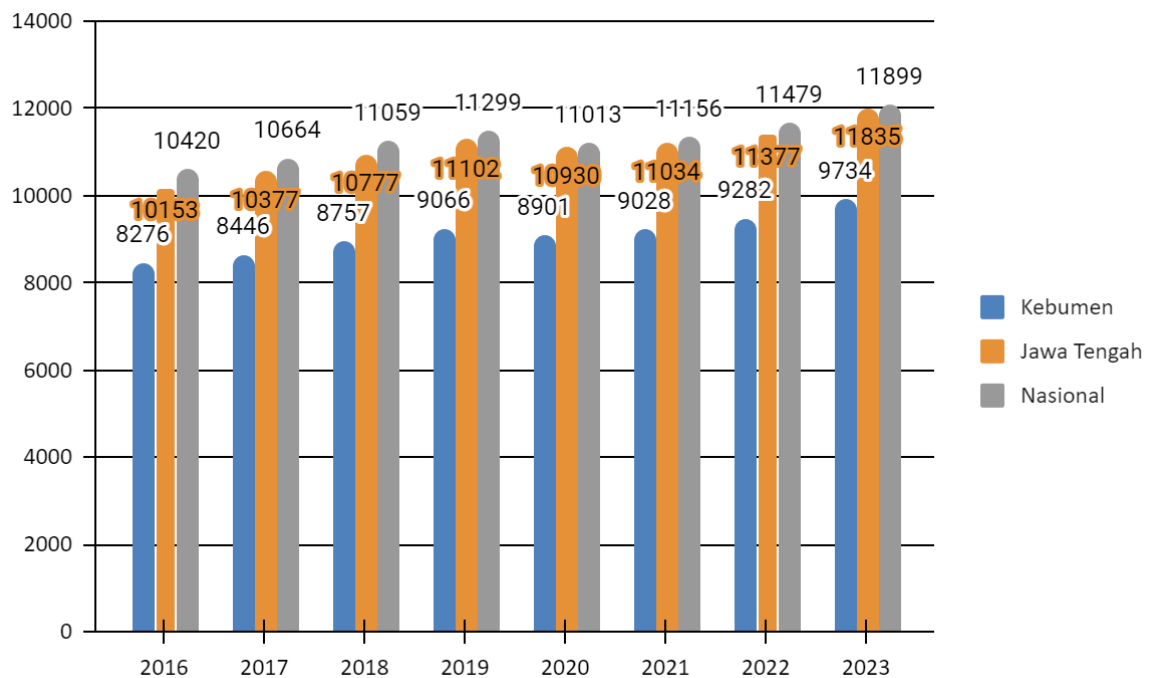
Dilihat dari 4 (empat) komponen/indikator pembentuk IPM di atas, Kabupaten Kebumen masih memerlukan usaha yang keras untuk meningkatkan IPM agar dapat setara dengan daerah-daerah lain di Jawa Tengah maupun nasional, terutama dalam meningkatkan pengeluaran per kapitanya.

Gambar III.17

Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional



Sumber : BPS, 2022



Sumber : BPS, 2023

Dimensi standar hidup layak merupakan representasi dari kesejahteraan yang diwakili oleh indikator pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Pada aspek standar hidup layak, pengeluaran perkapita yang disesuaikan Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 adalah Rp 9.282.000,- atau naik sebesar Rp 254.000,- dibandingkan dengan tahun 2021. Jika dibandingkan dengan pengeluaran perkapita Jawa Tengah dan Nasional, angka

tersebut masih sangat rendah karena pengeluaran perkapita Jawa Tengah telah mencapai angka Rp 11.377.000,- dan Nasional sebesar Rp 11.479.000,-.

1. Urusan Pendidikan

Pembangunan Kabupaten Kebumen urusan pendidikan tahun 2020 dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja program, di antaranya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan dasar.

Pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, APK PAUD Kabupaten Kebumen sejak lima tahun cukup fluktuatif dari terakhir mengalami trend yang positif dari 2016 sebesar 47,06 sampai dengan tahun 2021 sebesar 44,86. Perubahan capaian APK PAUD terjadi karena perubahan rentang anak usia dini yang sebelumnya dihitung berdasarkan usia 0-6 tahun menjadi 3-6 tahun. Perhitungan ini berlaku nasional dari tahun 2018.

Tabel III.18

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020*	2021
APK PAUD	47,06	47,01	50,98	37,20	44,86	44,86

*Sumber: Disdik Kabupaten Kebumen, 2020**

**) Data sementara*

Rasio Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah lembaga PAUD di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 (data sementara) diasumsikan sama dengan tahun 2019 yaitu 1.240 unit. Dengan jumlah penduduk usia 0-6 tahun pada tahun 2020 (data sementara) sebanyak 134.000 anak, menyebabkan rasio lembaga PAUD pada tahun 2020 (data sementara) di angka 1:108. Rasio Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun 2016-2020 secara lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III.19

Rasio Jumlah Lembaga PAUD per Siswa Jenjang PAUD Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020*	2021
Σ Lembaga PAUD	1.132	1.145	1.128	1.240	1.240	1.144
Σ Penduduk Usia 0-6 Tahun	137.288	135.290	133.550	134.132	134.132	142.230
Rasio	1 : 119	1 : 116	1 : 118	1 : 108	1 : 108	1:124

Sumber: Disdik Kabupaten Kebumen 2021

Indikator Kinerja Pendidikan Dasar di Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari aksesibilitas masyarakat atas pelayanan pendidikan baik dari sarana, prasarana maupun mutu pendidikan. Gambaran umum kondisi pendidikan di Kabupaten Kebumen dapat dilihat di antaranya Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Putus Sekolah (APTS), Rasio Guru/Murid, Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata, Rasio Sekolah dengan penduduk usia sekolah, Persentase Ruang Kelas yang Berkondisi Baik, Persentase Kelulusan sekolah dan Persentase Kualifikasi Guru Berpendidikan Minimal S1 untuk setiap jenjang pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Selama tahun 2016-2020, APK ditunjukkan pada jenjang SD/ sederajat memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020 APK meningkat menjadi 100,46 dibanding tahun sebelumnya dengan angka 98,33. Sementara itu, APK SMP/ Sederajat juga mengalami kenaikan berada di angka 97,27 pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan murid yang berada di jenjang sekolah sesuai dengan usianya atau anak usia sekolah mendapatkan pelayanan pendidikan sudah cukup baik. Sementara itu, pada jenjang pendidikan dasar perkembangan APK dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel III.20

Perkembangan APK Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2021

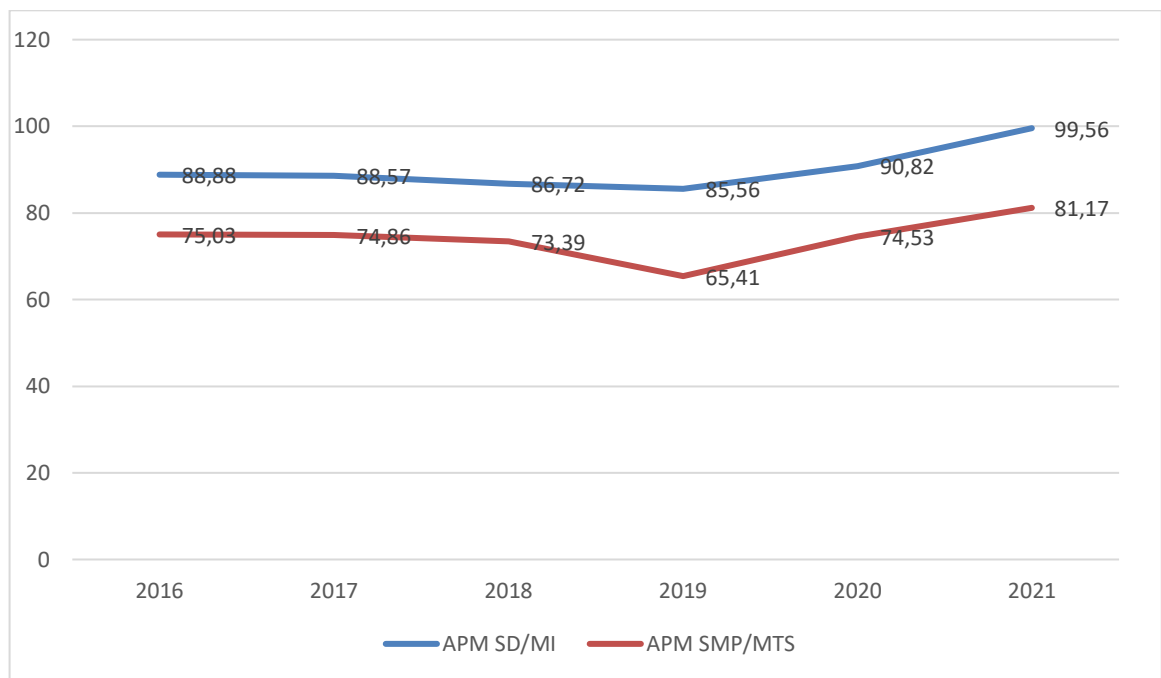
TINGKAT	APK	2016	2017	2018	2019	2020	2021
SD/MI	Kebumen	101,28	99,97	96,81	98,33	100,46	107,92
	Jawa Tengah	104,62	104,39	101,28	101,28	101,28	106,40
	Nasional	106,04	105,89	103,54	103,54	103,54	106,20
SMP/MTs	Kebumen	98,92	98,06	96,88	88,92	97,27	92,67
	Jawa Tengah	99,30	99,84	99,09	99,09	99,09	94,00
	Nasional	101,05	102,08	100,86	100,86	100,86	92,11

*Sumber : Disdik Kabupaten Kebumen, 2020**

Jika dibandingkan dengan APK Jawa Tengah dan Nasional, APK SD/ sederajat dan SMP/ sederajat Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 masih berada di bawahnya, di mana APK SD dan SMP Jawa Tengah berturut-turut di angka 106,40 dan 94,00. Namun demikian, APK Kebumen lebih tinggi daripada Nasional yang berada di angka 106,20 dan 92,11

Sama hal dengan APK, APM pada jenjang pendidikan dasar selama kurun 2016-2021 APM mengalami kenaikan yang berarti bahwa penduduk usia sekolah 7-12 tahun, maupun 13-15 tahun di Kabupaten Kebumen yang bersekolah pada jenjang SD/ Sederajat dan SMP/ Sederajat ada kenaikan. Tren penurunan APM tersebut juga terjadi di Jawa Tengah dan Nasional.

Gambar III.21
Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kab. Kebumen, 2022

Tabel III.22
Perkembangan APM Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2021

TINGKAT	APM	2016	2017	2018	2019	2020*	2021
SD/MI	Kabupaten Kebumen	88,88	88,57	86,72	85,56	90,82	99,56
	Jawa Tengah	92,16	91,68	90,38	90,38	90,38	98,22
	Nasional	93,73	93,02	91,94	91,94	91,94	97,80
SMP/MTs	Kabupaten Kebumen	75,03	74,86	73,39	65,41	74,53	81,17
	Jawa Tengah	75,2	75,5	74,47	74,47	74,47	80,99
	Nasional	76,29	76,99	75,57	75,57	75,57	80,59

Sumber : Disdik Kabupaten Kebumen, 2021*

Sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Kebumen terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dalam rangka

mengelola potensi yang ada pada anak usia sekolah melalui pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. Selain itu, penduduk non usia sekolah juga mendapatkan pelayanan pendidikan melalui pendidikan non formal. Gambaran secara umum kondisi pendidikan di Kabupaten Kebumen dapat dilihat diantaranya Angka Partisipasi Sekolah (APS), Persentase Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Angka Putus Sekolah (APTS), Rasio Guru/Murid, Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata, Rasio Sekolah dengan penduduk usia sekolah, Persentase Ruang Kelas yang ber kondisi baik, Persentase Kelulusan sekolah dan Persentase kualifikasi Guru berpendidikan minimal S1 untuk setiap jenjang pendidikan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Kinerja APS tahun 2020 seperti pada Tabel di bawah, menunjukkan kenaikan dibanding tahun sebelumnya cukup untuk semua jenjang usia dan berada di bawah angka APS Jawa Tengah dan Nasional. Capaian angka partisipasi sekolah selama tahun 2016-2020 secara lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel III.23
Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2016-2020

Usia	Angka Partisipasi Sekolah	2016	2017	2018	2019	2020*	2021
7 - 12 Tahun	Kebumen	100,14	100,18	98,25	95,83	95,88	99,56
	Jawa Tengah	99,58	99,62	99,62	99,76	99,76	99,66
	Nasional	99,09	99,14	99,14	99,22	99,22	99,19
13 - 15 Tahun	Kebumen	98,52	98,56	95,91	88,90	90,12	99,33
	Jawa Tengah	95,41	95,48	95,48	95,76	95,76	96,84
	Nasional	94,88	95,08	95,08	95,35	95,35	95,99
16 - 18 Tahun	Kebumen	69,60	69,64	81,09	68,78	70,76	79,91
	Jawa Tengah	67,95	68,48	68,48	69,02	69,02	70,79
	Nasional	70,83	71,42	71,42	71,99	71,99	73,09

*Sumber: Disdik Kabupaten Kebumen dan SIPD, 2021**

Berdasarkan capaian APS, dapat diketahui bahwa masih cukup banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Pola pelayanan sekolah dan kesadaran masyarakat akan

pentingnya pendidikan menyebabkan anak termasuk anak yang berkebutuhan khusus, anak terlantar, anak jalanan tidak mengenyam pendidikan sesuai dengan usianya. Di sisi lain, keengganan untuk kembali bersekolah bagi mereka yang putus sekolah maupun untuk menempuh pendidikan kesetaraan merupakan tugas berat dari Pemerintah Daerah. Kecenderungan orangtua menyekolahkan anak mereka pada sekolah madrasah dan sekolah non-formal di luar Kebumen menjadi penyumbang angka partisipasi sekolah cenderung menurun. Perlu peningkatan upaya lintas sektor dalam meminimalkan faktor ekonomi, sosial dan budaya dalam memastikan seluruh anak usia sekolah mendapatkan layanan pendidikan dengan baik.

Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah mengalami penurunan selama tahun 2016-2020 di jenjang SD/MI. Sementara pada jenjang SMP/MTs juga mengalami penurunan dari tahun 2019. Namun demikian, pada 2021 mengalami peningkatan. Capaian angka putus sekolah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.24
Angka Putus Sekolah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020*	2021
SD/MI						
Σ Siswa Putus Sekolah	82	93	112	112	73	110
Σ Seluruh Siswa	131.337	130.002	130.002	129.091	125,585	123.087
% Anak Putus Sekolah	0,06%	0,07%	0,09%	0,09%	0,06%	0,09%
SMP/MTs						
Σ Siswa Putus Sekolah	220	164	183	183	99	188
Σ Seluruh Siswa	63.192	62.293	62.293	61.061	61.109	61.976
% Anak Putus Sekolah	0,35%	0,26%	0,29%	0,29%	0,16%	0,30%

Sumber: Disdik Kabupaten Kebumen dan SIPD 2020 & Satudata.kebumen

Tingginya Angka Putus Sekolah pada jenjang SD/MI maupun SMP/MTs menunjukkan adanya ketimpangan akses pendidikan dasar di Kabupaten Kebumen.

Faktor ekonomi dan non-ekonomi diindikasikan memengaruhi tingginya Angka Putus Sekolah di Kabupaten Kebumen.

Rasio Guru/Murid

Rasio Guru-Murid pada jenjang SD/MI tahun 2021 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu menjadi 1:18. Sedangkan rasio Guru-Murid pada jenjang SMP/MTs tahun 2021 juga mengalami tidak mengalami peningkatan, tetap 1:15. Rasio ini menggambarkan ketersediaan tenaga pengajar dan mengetahui rasio ideal murid untuk satu guru dalam rangka pencapaian mutu pendidikan. Kondisi rasio guru terhadap murid Kabupaten Kebumen pada tiap jenjang pendidikan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.25

Rasio Guru Per Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020*	2021
SD/MI						
Jumlah Guru	8.975	8.957	8.957	7.997	6.855	7.280
Jumlah Murid	131.337	130.002	130.002	129.091	125.585	123.087
Rasio Guru/Murid	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 17	1:18	1:16,91
SMP/MTs						
Jumlah Guru	4.536	4.263	4.263	4.147	4.147	4.100
Jumlah Murid	63.192	62.293	62.293	61.061	61.109	61.976
Rasio Guru/Murid	1 : 14	1 : 15	1 : 15	1 : 16	1:15	1:15

Sumber: Disdik Kabupaten Kebumen 2020 dan SIPD semester 1 tahun 2020*

Rasio ideal guru per murid adalah satu guru untuk 32 siswa. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio guru dibandingkan dengan murid di Kabupaten Kebumen untuk tiap jenjang pendidikan dasar ada pada rasio ideal yaitu rata-rata satu guru untuk 14-15 siswa. Akan tetapi rasio tersebut tidak memilah berdasarkan status kepegawaian guru, mengingat kondisi di Kabupaten Kebumen sebagian besar tenaga pendidik adalah tenaga non PNS.

Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-Rata

Rasio Kelas-Guru pada jenjang SD/MI tahun 2021 adalah 1:1,24, sedangkan pada jenjang SMP/MTs tahun 2020 adalah 1:1,47. Rasio Kelas-Murid pada jenjang SD/MI tahun 2019 adalah 1:26,95, jika dibandingkan dengan rasio ideal Kelas-Murid yaitu 32 siswa per kelas, maka jumlah ruang kelas SD/MI telah mencukupi. Adapun rasio Kelas-Murid pada jenjang SMP/MTs tahun 2021 adalah 1:15, jika dibandingkan dengan rasio ideal Kelas-Murid yaitu 36 siswa per kelas, maka jumlah ruang kelas SMP/MTs telah mencukupi. Kondisi rasio guru dan murid terhadap kelas di Kabupaten Kebumen pada tiap jenjang pendidikan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.26

Rasio Guru per Kelas rata-rata Terhadap Jumlah Murid Kabupaten Kebumen Tahun
2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020*	2021
SD/MI						
Jumlah Guru	8.975	8.957	8.957	7.997	6,855	7.280
Jumlah kelas	5.997	5.932	5.932	5.867	4,659	5.855
Rasio Kelas/ Guru	1 : 1,49	1 : 1,50	1 : 1,51	1 : 1,51	1:1,47	1:1,24
Jumlah Murid	131.337	130.002	130.002	129.091	125,585	123.087
Rasio Kelas/Murid	1 : 22	1 : 22	1 : 22	1 : 22	1:26,95	1:21
SMP/MTs						
Jumlah Guru	4.536	4.263	4.263	4.174	4,174	4.100
Jumlah Kelas	2.192	2.227	2.227	2.259	2.259	2.282
Rasio Kelas/ Guru	1 : 2,06	1 : 1,91	1 : 1,91	1 : 1,85	1:1,85	1:1,79
Jumlah Murid	63.192	62.293	62.293	61.061	61,109	61.976
Rasio Kelas/Murid	1 : 29	1 : 28	1 : 28	1 : 27	1:27	1:15

Sumber: Disdik Kabupaten Kebumen, dan SIPD semester 1 tahun 2021

Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI terus mengalami perbaikan sejak tahun 2016 dari 1:140 menjadi 1:151 di tahun 2021. Namun demikian pada jenjang SMP/MTs rasio ketersediaan sekolah mengalami penurunan. Dalam kurun waktu 2016-2018 Rasio Ketersediaan Sekolah mengalami penurunan. Pada tahun 2016 sebesar 1:319 dan mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 1:317 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2018 menjadi 1:311. Rasio Ketersediaan Sekolah mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021 yaitu 1:300. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah merupakan perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk usia sekolah tersebut dalam setiap 10.000 penduduk. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah di Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel III.27

Rasio ketersediaan sekolah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021
SD/MI						
Jumlah Sekolah	912	911	916	885	885	876
Jumlah Penduduk Usia 7-12 tahun	126.782	127.980	127.980	127.980	127.980	132.036
Rasio ketersediaan sekolah	1:140	1:139	1:140	1:145	1:145	1:151
SMP/MTs						
Jumlah Sekolah	200	202	202	204	204	213
Jumlah Penduduk Usia 13-15 tahun	63.793	64.115	64.115	64.115	64.115	63.950
Rasio ketersediaan sekolah	1:319	1:317	1:311	1:314	1:314	1:300

Sumber: Disdik Kabupaten Kebumen dan SIPD, 2020

Berdasarkan data ketersediaan sekolah, diperoleh gambaran jika rasio ketersediaan sekolah dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah di Kabupaten Kebumen secara rata-rata maupun per kecamatan didapatkan rasio yang masih memadai

atau cukup ideal. Hal ini menunjukkan bahwa secara kuantitas fasilitas pelayanan pendidikan dasar pada setiap kecamatan telah memadai.

Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik

Persentase ruang kelas kondisi baik untuk SD/MI terus mengalami peningkatan sejak tahun 2016 dari 70,08% menjadi 87,87% di tahun 2020. Sedangkan pada jenjang SMP/MTs juga mengalami kenaikan dari 81,98 pada tahun 2016 menjadi 90,67% pada tahun 2020. Persentase ruang kelas dalam kondisi baik di Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel III.28

Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI					
Jumlah ruang kelas kondisi baik	4.109	4.379	4.379	4.266	4,111
Jumlah seluruh ruang kelas	5.863	6.026	6.026	5.867	4,678
Presentase	70,08%	72,67%	72,67%	72,71%	87,87%
SMP/MTS					
Jumah ruag kelas kondisi baik	1.870	1.907	1.907	1.853	1,371
Jumlah seluruh ruang kelas	2.281	2.296	2.296	2.259	1,512
Presentase	81,98%	83,06%	83,06%	83,03%	90,67

Sumber: Disdik Kabupaten Kebumen dan SIPD, 2020*

Persentase Kelulusan Siswa Per Jenjang Pendidikan Dasar

Persentase kelulusan dalam kurun waktu 2015-2020 terus meningkat dan menunjukkan angka yang cukup bagus karena di semua jenjang pendidikan mencapai

angka kelulusan 100%. Pada tahun 2020 angka kelulusan di tingkat SD/MI sebesar 100% dan tingkat SMP/MTs sebesar 100%. Hal ini dapat diartikan kualitas pembelajaran di Kabupaten Kebumen untuk semua jenjang dalam kondisi bagus. Persentase kelulusan siswa jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel III.29
Persentase Kelulusan Siswa Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020*
SD/MI					
Jumlah Siswa Lulus Sekolah	21.279	20.640	20.640	21.250	21,285
Jumlah Seluruh Siswa Kelas VI	21.589	20.979	20.979	21.257	21,285
Presentase Kelulusan Siswa	98,56%	98,38%	98,38%	99,97%	100%
Tahun	2016	2017	2018	2019	2020*
SMP/MTs					
Jumlah Siswa Lulus Sekolah	20.718	20.328	20.328	20.366	19,753
Jumlah Seluruh Siswa Kelas IX	21.638	20.976	20.976	20.373	19,753
Presentase Kelulusan Siswa	95,75%	96,91%	96,91%	99,97%	100%

Sumber: SSDumber: Disdik Kabupaten Kebumen dan SIPD, 2020*

Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4

Persentase guru dengan kualitas S1/D4 pada jenjang pendidikan PAUD, SD dan SMP/MTs terus mengalami peningkatan. Hingga tahun 2020 persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1 pada jenjang pendidikan dasar sudah cukup baik karena sudah melampaui di atas 90%, yaitu 93,78 pada jenjang SD dan 94,30% pada jenjang SMP/MTs. Walaupun terus mengalami peningkatan, namun demikian untuk jenjang PAUD masih cukup rendah yaitu baru mencapai 62,93% pada tahun 2020. Persentase guru dengan kualitas S1/D4 di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel III.30

Persentase Guru dengan Kualifikasi S1/D4 Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020*
SMP/MTS	84,94%	88,58%	88,58%	94,26%	94,30%
SD	89,14%	91,37%	91,37%	93,70%	93,78%
PAUD	46,72%	46,72%	51,20%	58,30%	62,93%

Sumber: Disdik Kabupaten Kebumen dan SIPD, 2020*

2. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu aspek pembangunan yang sangat vital. Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan. Secara umum, derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari jumlah kasus balita gizi buruk (BGB), balita kurang gizi (BKG), Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB). Kecenderungan harapan penduduk berumur panjang dan sehat diukur dengan Usia Harapan Hidup (UHH) waktu lahir. Oleh karena itu, UHH (eo) memiliki korelasi yang sangat erat dengan angka kematian bayi atau *infant mortality rate* (AKB/IMR). Kemudian angka kematian bayi dipengaruhi pula oleh pemeriksaan dan

perawatan kehamilan, pertolongan persalinan, perawatan neonatus dan status gizi bayi (0-11 bulan).

Tabel III.31

Capaian Indikator Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	% Balita Gizi Kurang	0,31%	0,28 %	0,29%	0,42%	0,50%	
2	% Balita Gizi Buruk	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,03%	
3	Ibu hamil KEK	0,63%	0,63%	0,67%	8,97%	8,26%	
4	AKI (per 100.000 kelahiran hidup)	80,01	61,38	50,52	45,85	76,75	201,6
5	AKB (per 1.000 kelahiran hidup)	8,95	7,21	6,76	6,92	6,95	9,23
6	UHH	72,81	72,81	72,81	73,11	73,11	73,55
7	Angka Kesakitan Penyakit DBD (per 100.000)	40,6	17,79	2,86	19,18	0,012%	
8	Cakupan Ibu hamil K1	100%	100%	98%	100%	93%	
9	Cakupan Ibu hamil K4	94,19%	95,50%	91,70%	99,91%	99,9%	
10	Cakupan persalinan Oleh Nakes	99,70%	99,80%	92,80%	99,90%	91,5%	
11	Imunisasi DT Anak Sekolah	99,50%	99,50%	99,12%	99,40%	98,42%	
12	Imunisasi TD Anak Sekolah	99,54%	99,64%	99,54%	99,49%	98,65%	
13	Imunisasi Campak Anak Sekolah	99,51%	99,20%	99,20%	99,49%	98,93%	

NO	URAIAN	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
14	Jumlah Penderita stunting	-	-	5019 anak	14.057 anak	10.484	8.572
15	Jumlah Desa ODF	36	67	109	422	460	0

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen, 2020**

Selama periode tahun 2016-2020 capaian kinerja urusan kesehatan, persentase balita dengan gizi kurang pada tahun 2020 sebanyak 0,50%. Persentase ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 0,42%. Prevalensi Kebumen risiko KEK pada ibu hamil tahun 2020 sebesar 8,26% persen dengan variasi yang cukup lebar dengan prevalensi terendah ditahun 2016 dilevel 0,63% persen.

Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu

Di Indonesia, angka kematian ibu dari data tahun 2015 dari susenas masih cukup tinggi dengan 305 per 100.000 penduduk dan angka kematian bayi pada tahun 2017 sebesar 24 per 1.000 kelahiran hidup. kesehatan ibu dan anak sangat penting dan termasuk ke dalam salah satu faktor yang mempengaruhi Sustainable Development Goals (SDGs).

Pada tahun 2030, dunia mendorong target penurunan angka kematian ibu harus di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan angka kematian bayi dan balita proporsinya ditargetkan turun hingga 12 per 1000 kelahiran hidup. Pemerintah Indonesia pun merespon itu dengan berupaya melakukan perbaikan gizi yang difokuskan pada pencegahan stunting. "Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi terutama dalam 1.000 hari kehidupan pertama yaitu mulai dari janin hingga balita atau baduta. berdasarkan hasil survei status gizi balita Indonesia tahun 2019, angkatan stunting di Tanah Ari masih cukup tinggi yakni sebesar 27,6 persen. Artinya, dari 10 orang balita, tiga di antaranya stunting.

Sementara itu, AKI di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 adalah 65,71 per 100.000 kelahiran hidup. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terdapat penurunan

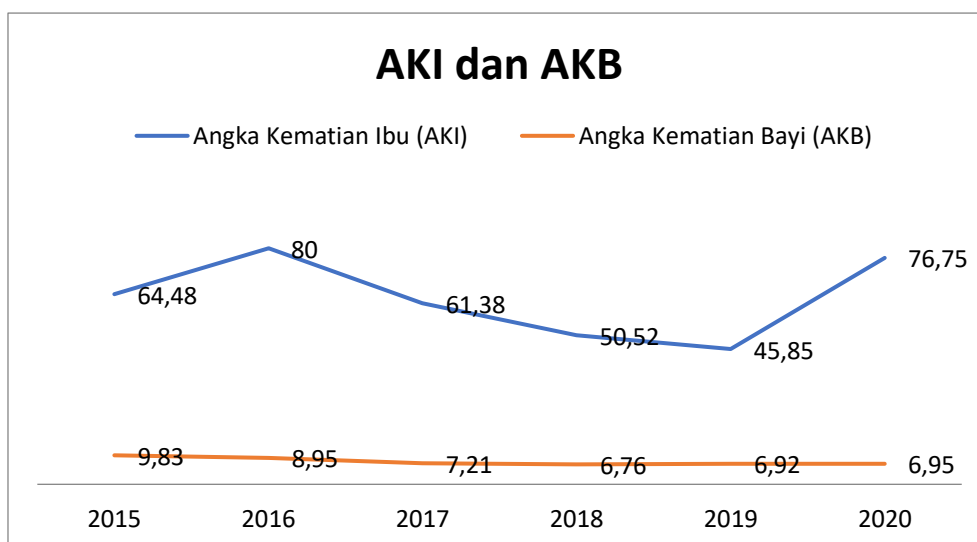
jumlah kasus kematian ibu yang signifikan. AKB pada tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. AKB pada tahun 2020 sebesar 6,95 per 1.000 dari 6,9 pada tahun 2019. Capaian tersebut telah mampu melampaui target RPJMD Tahun 2016-2021 yaitu 10,90 per 1.000 kelahiran hidup.

Isu stunting adalah isu strategis pada bidang kesehatan yang juga harus menjadi perhatian bersama seluruh pihak karena akan berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di masa depan. Stunting disebabkan oleh rendahnya asupan gizi, lingkungan sosial yang terkait dengan pengasuhan, akses terhadap pelayanan kesehatan, serta kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi. Pada tahun 2020 berdasarkan data EPPGBM terdapat 10.484 orang anak dalam kriteria stunting di Kabupaten Kebumen. Penanganan stunting telah melibatkan seluruh stakeholder terkait mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan intervensi gizi spesifik maupun sensitif. Besarnya prevalensi stunting di Kabupaten Kebumen menjadikan Kabupaten Kebumen menjadi salah satu kabupaten prioritas nasional dalam penanganan stunting.

Pencapaian desa ODF (*Open Defecation Free*) atau bebas buang air besar sembarangan Kabupaten Kebumen cukup bagus. Program ini telah dimulai sejak tahun 2015 dan masuk dalam gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Jumlah desa ODF di Kabupaten Kebumen pada tahun 2015 adalah 11 desa dan untuk tahun 2019 adalah 422 desa (91,73%). Angka ODF yang sudah tinggi di Kabupaten Kebumen baru menggambarkan akses sanitasi. Meskipun demikian, Kabupaten Kebumen masih perlu meningkatkan promosi perilaku hidup bersih dan sehat. AKB pada tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. AKB pada tahun 2020 sebesar 6,95 per 1.000 dari 6,9 pada tahun 2019. Capaian tersebut telah mampu melampaui target RPJMD Tahun 2016-2021 yaitu 10,90 per 1.000 kelahiran hidup.

Gambar III.32.

Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Kabupaten Kebumen Tahun 2015 – 2020



Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan

Komplikasi dan kematian ibu maternal serta bayi baru lahir dapat terjadi pada saat proses persalinan. Persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dapat meminimalisir jumlah komplikasi/kematian ibu dan bayi. Pada tahun 2019 ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan mencapai 99,90% mengalami penurunan menjadi 99,96% di tahun 2020. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel III.27

Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020*
--------	------	------	------	------	-------

Jumlah Ibu Bersalin yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan	19.236	19.538	18.508	19.610	18.227
Jumlah total Ibu Bersalin	20.020	19.583	18.535	19.626	18.234
Presentase	96,08	99,77	99,85	99,90	99,96

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen, 2020*

Rasio Dokter dan Penduduk

Rasio dokter dan penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 rasionya dapat menurun dari 1:3387 di tahun 2019 menjadi 1:3306. Meskipun demikian, nilai rasio pada tahun 2020 tersebut masih jauh dari kondisi ideal rasio dokter dan penduduk yaitu 1:2500. Rasio dokter dan penduduk di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel III.28

Rasio Dokter dan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen 2020 (Data Diolah)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020*
Jumlah Dokter	277	222	211	409	419
Jumlah Penduduk	1.358.448	1.364.905	1.370.157	1.385.577	1.385.577
Rasio Dokter/Penduduk	1 : 4.904	1 : 6148	1 : 6493	1 : 3387	1: 3306

Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat. Fungsi posyandu adalah untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan dasar sehingga turut berkontribusi kepada mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Berikut ini merupakan data rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020:

Tabel III.29

Rasio Posyandu dan Balita Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

TAHUN	2016	2017	2018	2019	2020*
Jumlah Posyandu	2.114	2.119	2112	2.123	2.116
Jumlah Balita	87.636	85.612	85.239	84.924	83.924
Rasio Posyandu per 1000 balita	1 : 24	1 : 25	1 : 25	1 : 25	1:25

Sumber : SIPD dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen, 2020

Rasio Puskesmas, Klinik, dan Pustu per Satuan Penduduk

Rasio Puskesmas per satuan penduduk di Kabupaten Kebumen cenderung meningkat pada kurun waktu 2015-2019. Rasio Puskesmas per satuan penduduk pada tahun 2015 sebesar 1:38.466 meningkat menjadi 1:39.587 di tahun 2019. Nilai rasio tersebut masih belum dalam kondisi ideal rasio Puskesmas per satuan penduduk, yaitu 1:30.000. Meskipun demikian, keberadaan Puskesmas Pembantu dan Poliklinik yang tersebar secara merata dapat membantu masyarakat untuk mengakses fasilitas kesehatan. Akreditasi Puskesmas dilaksanakan mulai tahun 2020. Rasio Puskesmas dan Klinik Per Satuan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel III.30

Rasio Puskesmas dan Klinik Per Satuan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Puskesmas	35	35	35	35	35
2	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	0	0	0	0	35
3	Jumlah Puskesmas Keliling	91	35	35	35	35
4	Jumlah Poliklinik/PKD/Polindes	347	385	385	385	387
5	Jumlah Puskesmas Pembantu	76	76	76	76	77
6	Jumlah 1-4	549	531	531	531	534
7	Jumlah Penduduk	1.358.448	1.364.905	1.375.221	1.385.577	1.385.477
8	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	1:38.813	1:38.997	1:39.292	1:39.587	1:39.6
9	Rasio Puskesmas Pembantu per satuan penduduk	17.874,32	17.959,28	18.028,38	18.231,27	17.994,51
10	Rasio Poliklinik per satuan penduduk	3.914,84	3.545,21	3.558,85	3.598,90	3.580,30

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen dan SIPD 2020*

Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Kebumen stabil selama kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu sebesar 0,01. Meskipun demikian jumlah rumah sakit berkurang dari 13 unit pada tahun 2016 menjadi 11 unit di tahun 2020. Semakin banyak rumah sakit yang tersedia, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, sehingga rumah sakit memiliki peranan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel III.31

Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2016- 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020*
Jumlah RSUD	2	2	2	2	2
Jumlah RS Swasta	11	9	9	9	9
Jumlah RS AD/AU/AL/POLRI	0	0	0	0	0
Jumlah Seluruh RS	13	11	11	11	11
Jumlah Penduduk	1.358.448	1.364.905	1.375.221	1.385.577	1.385.577

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen dan SIPD 2020*

Sementara itu, capaian pelayanan RSUD dr. Soedirman pada tahun 2020 secara umum telah baik. Empat indikator sudah berada pada kondisi ideal yaitu tingkat pemanfaatan tempat tidur (Bed Occupancy Rate), kondisi terisi (Turn Over Interval), rata-rata lama perawatan pasien (Length of Stay) dan angka kematian kasar (Gross Death Rate). Hanya angka kematian bersih (Net Death Rate) yang belum pada kondisi ideal yaitu sebesar 28 ‰. Sementara itu, capaian pelayanan RSUD Prembun pada tahun 2020 masih perlu perbaikan. Hal ini karena nilai tingkat pemanfaatan tempat tidur (Bed Occupancy Rate) dan kondisi terisi (Turn Over Interval) berturut-turut sebesar 36,81% dan 5,70 hari yang belum pada kondisi ideal. Meskipun demikian, indikator rata-rata lama perawatan pasien (Length of Stay) dan angka kematian kasar (Gross Death Rate) dan angka kematian bersih (Net Death Rate) sudah dalam kondisi ideal. Capaian pelayanan RSUD di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 secara lengkap tersaji pada Tabel berikut

Tabel III.32
Capaian Pelayanan RSUD Kabupaten Kebumen Tahun 2020

No	Indikator	Capaian 2020*		Standar
		RSUD dr. Soedirman	RSUD Prembun	
1	Bed Occupancy Rate (BOR)	71%	36,81%	70%-85%
2	Bed Turn Over	77,5 kali/th	40,49 kali/th	-
3	Turn Over Interval	1,4 hari	5,70 hari	1,4 hari
4	Length of Stay	3,3 hari	3,19 hari	3 – 6 hari
5	Net Death Rate	28 ‰	6,99 ‰	<25 ‰

No	Indikator	Capaian 2020*		Standar
		RSUD dr. Soedirman	RSUD Prembun	
6	Gross Death Rate	44,7 ‰	18,87 ‰	<45 ‰

Sumber: diolah dari berbagai sumber 2020

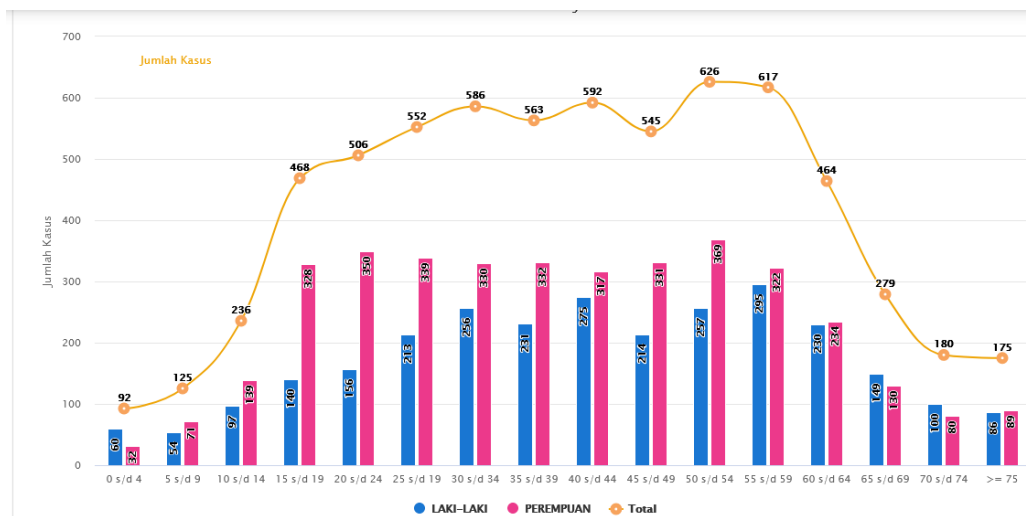
Corona Virus Disease-2019

Sejak World Health Organization (WHO) menetapkan *Covid-19* sebagai Pandemi pada tanggal 19 Maret 2020, penyebaran *Covid-19* semakin bertambah dalam hal jumlah orang yang terjangkit maupun jumlah negara yang terdampak. Dampak *Covid-19* juga dirasakan Kabupaten Kabupaten yang dimulai pada awal Maret 2020.

Perkembangan kasus Covid-19 s.d 28 Februari 2020 terdapat penambahan kasus terkonfirmasi positif sebanyak 4 orag, terkonfirmasi sembuh sebanyak 16 orang dan terkonfirmasi meninggal sebanyak 0 orang. Kasus suspek tercatat 171 orang. Dari sejumlah kasus suspek tersebut, dirawat 109 dirujuk 4 menjalani isolasi 58 orang. Sementara itu kasus probable sampai dengan saat ini tercatat sebanyak 222 orang. Dari jumlah kasus Probabel tersebut, menjalani perawatan 81, dirujuk 0 menjalani isolasi 2, meninggal dunia 139. Secara keseluruhan hingga saat ini kasus terkonfirmasi Covid-19 di kabupaten Kebumen tercatat 6606. Dari sejumlah kasus terkonfirmasi tersebut dirawat 135, dirujuk 0, isolasi 117, meninggal 256 sembuh 6098.

Perkembangan penderita *Covid-19* sampai tanggal 27 Februari 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar III.31
Perkembangan Penderita Covid-19



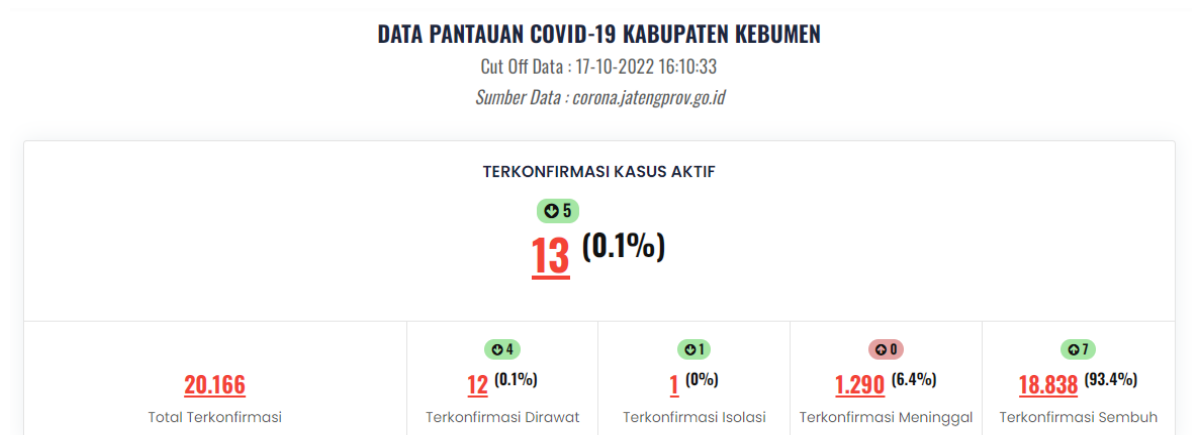
Sumber : Tim Satgas Corona Kabupaten Kebumen, 2021

Dari tabel di atas diketahui bahwa Angka kasus Covid-19 di Kabupaten Kebumen didominasi pada rentang usia 15 – 64 tahun. Penambahan angka kasus Covid-19 bertambah secara signifikan di pada rentang usia 15-19 dengan jumlah kasus sebanyak 486 kasus dan pada rentang usia 20-24 menembus angka 506 orang. Angka tertinggi kasus Covid-19 pada rentang usia 50-54 tahun jumlah kasus sebanyak 626 dengan jumlah laki-laki sebanyak 257 orang dan perempuan sebanyak 369 orang. Kemudian tertinggi ke dua kasus Covid-19 pada rentang usia 55-59 yaitu sebanyak 617 kasus terdiri dari 295 laki-laki dan 322 kasus perempuan. Sedangkan pada posisi ketiga kasus Covid di Kabupaten Kebumen pada rentang usia 40-44 tahun dengan jumlah kasus sebanyak 552 dengan jumlah laki-laki sebanyak 213 orang dan perempuan sebanyak 339 orang.

Sementara itu, untuk melihat perkembangan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 per hari s.d tanggal 28 Februari pukul 17.00 WIB kasus sembuh sebanyak 18 orang, meninggal 0 kasus, di rawat 0 kasus, dan di isolasi 0 kasus. Secara lengkap disajikan pada tabel berikut.

Gambar III.32

Perkembangan Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 Per Oktober 2022



Sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden agar kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro diperpanjang dan lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan, maka Menteri Dalam Negeri pada tanggal 19 Februari 2021 menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

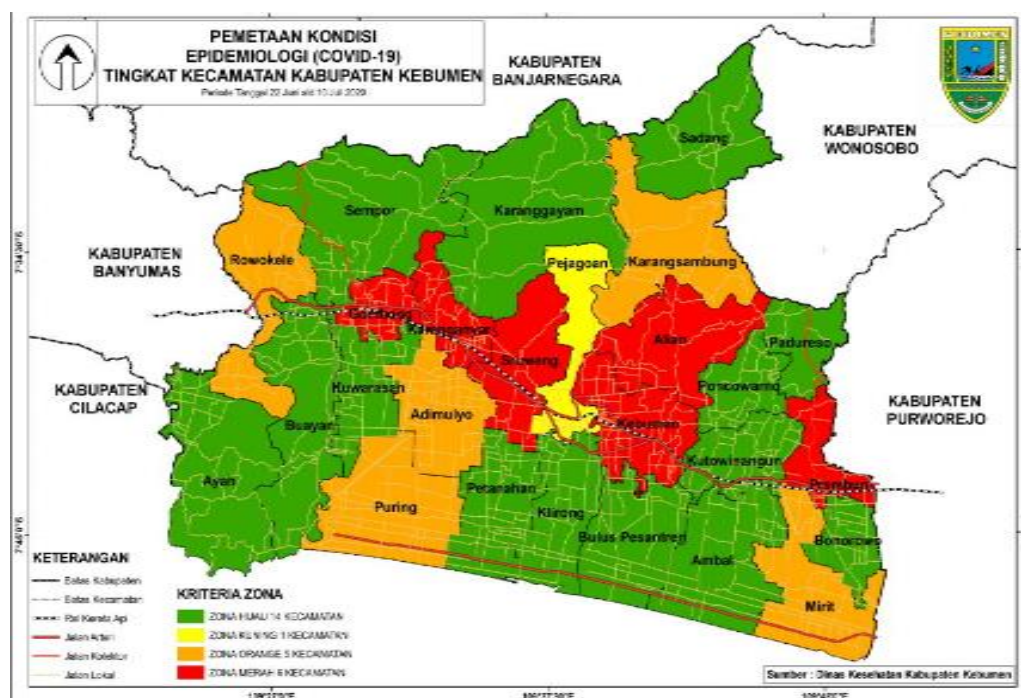
Dalam Inmendagri tersebut ditegaskan untuk mengatur PPKM yang berbasis mikro sampai dengan tingkat RT/RW yang berpotensi menimbulkan penularan covid-19 dan dapat menambahkan prioritas wilayah pembatasan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah dan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan. Pemberlakuan PPKM Mikro diperpanjang sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan 8 Maret 2021.

Gambar III.33
Peta Zonasi Covid-19 Kabupaten Kebumen 2021



Sumber : Tim Satgas Corona Kabupaten Kebumen, 2021

Gambar III.34
Pemetaan Kondisi Epidemiologi (Covid-19) Tingkat Kecamatan Kabupaten Kebumen



Sumber : Tim Satgas Corona Kabupaten Kebumen, 2022

Kecamatan dengan zona orange :

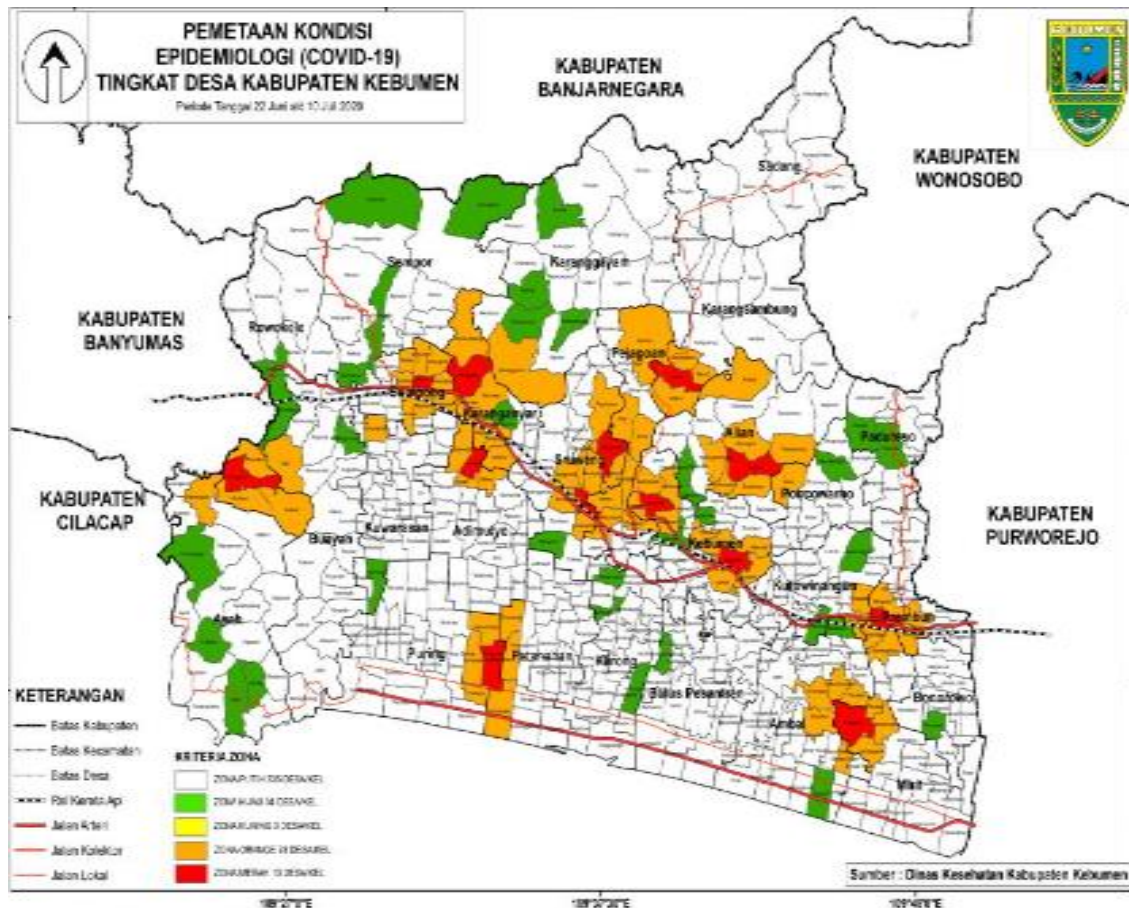
1. Adimulyo
2. Rowokele
3. Karanggayam
4. Kutowinangun
5. Puring
6. Klirong

Kecamatan dengan zona kuning :

1. Pejagoan
2. Sempor
3. Bonorowo
4. Bonorowo
5. Gombong
6. Kebumen
7. Alian
8. Prembun
9. Mirit
10. Ambal
11. Poncowarno
12. Petanahan
13. Sruweng
14. Kuwarasan
15. Karanganyar
16. Sadang

Gambar III.35

Pemetaan Kondisi Epidemiologi (Covid-19) Tingkat Desa Kabupaten Kebumen



Sumber : Tim Satgas Corona Kabupaten Kebumen, 2022

Dari Peta Zonasi Risiko Covid-19 terupdate tanggal 27 Februari 2021, Kabupaten Kebumen saat ini masuk kedalam zona orange dengan 6 desa masuk zona orange dan 20 kecamatan lainnya masuk kedalam zona kuning, zona per kecamatan selengkapnya sebagai berikut:

17. Padureso
18. Karangsembung
19. Buluspesantren
20. Buayan

Desa yang masuk ke dalam zona merah :

1. Winong Kecamatan Mirit
2. Sidomukti Kecamatan Adimulyo

Desa yang masuk dalam zona oranye :

1. Banjarejo Kecamatan Puring
2. Banyuroto Kecamatan Adimulyo
3. Adiluhur Kecamatan Adimulyo
4. Kebumen Kecamatan Kebumen
5. Podoluhur Kecamatan Klirong
6. Adikarto Kecamatan Adimulyo
7. Murtirejo Kecamatan Kebumen
8. Pandansari Kecamatan Sruweng
9. Kuwarisan Kecamatan Kutowinangun
10. Blengorkulon Kecamatan Ambal
11. Prasutan Kecamatan Ambal
12. Purwodeso Kecamatan Sruweng
13. Pucangan Kecamatan Sadang
14. Kaleng Kecamatan Puring
15. Seliling Kecamatan Alian
16. Argopeni Kecamatan Ayah
17. Selotumpeng Kecamatan Mirit
18. Lumbu Kecamatan Kutowinangun
19. Adikarso Kecamatan Kebumen
20. Meles Kecamatan Adimulyo
21. Kedungjati Kecamatan Sempor
22. Jatimulyo Kecamatan Alian
23. Krakal Kecamatan Alian
24. Wonosari Kecamatan Kebumen
25. Kawedusan Kecamatan Kebumen
26. Wonokriyo Kecamatan Gombong
27. Karanganyar Kecamatan Karanganyar
28. Sidayu Kecamatan Gombong
29. Karangpule Kecamatan Sruweng
30. Sadangwetan Kecamatan Sadang
31. Tambakproгатen Kecamatan Klirong
32. Klirong Kecamatan Klirong

33. Tanuharjo Kecamatan Alian
34. Muktisari Kecamatan Kebumen
35. Karang Sari Kecamatan Kebumen
36. Kedungpuji Kecamatan Gombong
37. Kajoran Kecamatan Karanggayam
38. Mekarsari Kecamatan Kutowinangun
39. Kaliwungu Kecamatan Klirong
40. Totogan Kecamatan Karangsambung
41. Sempor Kecamatan Sempor
42. Tanjungsari Kecamatan Kutowinangun
43. Kewayuhan Kecamatan Pejagoan
44. Selokerto Kecamatan Sempor
45. Jatinegara Kecamatan Sempor
46. Wonodadi Kecamatan Buayan
47. Sidoharjo Kecamatan Puring
48. Setrojenar Kecamatan Buluspesantren
49. Ngabean Kecamatan Mirit

Pemeriksaan Rapid Test dan PCR swab tes

Hingga saat ini penduduk yang telah menjalani pemeriksaan menggunakan rapid test massal sebanyak 36.074 orang (3,00 persen) dari jumlah penduduk. Jumlah tersebut sudah cukup memadai, jika dibandingkan di beberapa negara yang melakukan pemeriksaan yang sama, angkanya berkisar 2,5 persen - 3 persen dari jumlah penduduk. Sementara itu penduduk yang dilakukan pemeriksaan menggunakan PCR atau pemeriksaan swab tenggorokan 24641 orang (2,05 persen) dari jumlah penduduk. Jumlah tersebut sudah memenuhi target pemeriksaan, jika dibandingkan dengan 0,1 persen dari jumlah penduduk menurut standar WHO.

Sementara itu sediaan PCR atau pemeriksaan swab tenggorokan yang masih menunggu hasilnya keluar dari laboratorium sebesar 112.

Vaksinasi Covid-19

Laporan pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Kab. Kebumen per Tgl. 31/01/2021 sbb :

Sasaran inklusi = 6.625

Sasaran Teregister = 6.552

Sasaran divaksin = 5.122

Vaksin diterima = 12.800

Vaksin dipakai = 5.122

Vaksin rusak = 2

Sisa (STOK) Vaksin = 7.676

Jumlah kekurangan vaksin = 450

Usulan kekurangan vaksin = 500 dosis (50 cadangan)

Sementara itu jumlah pendatang hingga saat ini di Kabupaten Kebumen tercatat 76.424 orang. **Hal-Hal Yang Harus dilakukan Masyarakat.**

Memperhatikan perkembangan kasus positif covid-19 di Kabupaten Kebumen, Gugus Tugas telah melakukan pengkajian kasus dan analisa data. Dari hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa kasus positif covid-19 di Kabupaten Kebumen masih berpotensi naik.

Namun, di sisi lain kehidupan beragama, pendidikan, sosial-ekonomi harus berjalan. Sehingga diperlukan upaya memasuki fase **adaptasi kebiasaan baru (AKB)** dengan dicirikan penerapan protokol pencegahan penularan covid-19 secara ketat.

Sesuai SE Bupati Kebumen no 443/126 tentang PPKM berbasis Mikrozonasi Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran covid-19 di Kabupaten Kebumen adalah serangkaian upaya pengendalian dengan pertimbangan zonasi wilayah hingga tingkat RT.

- 2 **Zona hijau**, jika dalam seminggu terakhir tidak ada rumah dengan kasus terkonfirmasi positif. Upaya pengendalian melalui surveilans aktif, baik rutin maupun berkala. Tindakan yang dilakukan adalah kasus suspek dilakukan test.
- 3 **Zona kuning**, jika dalam seminggu terakhir ada 1-5 rumah dengan kasus terkonfirmasi positif. Upaya pengendalian melalui penemuan kasus suspek dan pelacakan kontak erat. Tindakan yang dilakukan adalah isolasi mandiri untuk kasus terkonfirmasi positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.
- 4 **Zona orange**, jika dalam seminggu terakhir ada 5-10 rumah dengan kasus terkonfirmasi positif. Upaya pengendalian melalui penemuan kasus suspek dan pelacakan kontak erat dengan pengawasan ketat. Tindakan yang dilakukan adalah menutup rumah ibadah, tempat bermain, tempat-tempat umum, kecuali sektor esensial.

- 5 Zona merah**, jika dalam seminggu terakhir ada lebih dari 10 rumah dengan kasus terkonfirmasi positif. Upaya pengendalian melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tingkat RT. Tindakan yang dilakukan adalah:
- penemuan kasus suspek dan kontak erat.
 - Isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat
 - Menutup rumah ibadah, tempat bermain, tempat-tempat umum, kecuali sektor esensial.
 - Melarang kerumunan lebih dari 3 orang.
 - Membatasi keluar masuk wilayah RT hingga pukul 20.00
 - Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan.

Berdasarkan SE Bupati Kebumen nomor 800/106 tentang Pelaksanaan Gerakan Jateng di Rumah Saja di Kabupaten Kebumen Pada prinsipnya sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19 dengan mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Gerakan ini akan dilaksanakan pada tanggal 6-7 Februari 2021. Melakukan pembatasan kegiatan, antara lain di :

- 1) Perkantoran, Sekolah, pabrik dan perusahaan
- 2) Pusat perbelanjaan
- 3) Hotel/penginapan
- 4) Alun-alun/lapangan dan fasilitas olahraga lainnya
- 5) Obyek wisata
- 6) Kerumunan
- 7) Hajatan dengan tidak mengundang tamu.

SE Bupati Kebumen nomor 440/063 (Pengganti SE 443/016) tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk Pengendalian Penyebaran covid-19, mulai tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan 8 Februari 2021, diminta kepada pihak-pihak terkait untuk melakukan pembatasan Kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Termasuk dalam pembatasan tersebut, adalah:

- 1) Pengaturan kerja dari rumah bagi 50 persen pegawai/karyawan yang diatur secara teknis dengan Instruksi Bupati Kebumen nomor 02/2021.
- 2) Pembelajaran secara daring atau online
- 3) Restoran dan rumah makan hanya menyediakan 25 persen dari kapasitas tempat duduk yang tersedia sampai jam 20.00.
- 4) Pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan, pasar modern, PKL, hiburan dan mainan anak-anak di sekitar alun-alun sampai jam 20.00 WIB.
- 5) Pasar tradisional atau warung yang menyediakan bahan kebutuhan pokok, tetap dapat beroperasi, dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan
- 6) Kegiatan di tempat ibadah dibatasi 50 persen dari kapasitas ruangan dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- 7) Menutup seluruh objek wisata di Kabupaten Kebumen sampai dengan 1 Februari 2021, selanjutnya buka dengan 30 persen kapasitas pengunjung hingga pukul 15.00
- 8) Mengoptimalkan Satgas Jogo tonggo di tingkat Kecamatan dan Desa
- 9) mengintensifkan kembali penerapan penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan melalui Operasi Yustisi oleh Tim Pendispilinan.
- 10) Tempat hiburan ditutup
- 11) Pusat perbelanjaan buka sampai pukul 20.00

Terhitung sejak 24 Agustus 2020, Pemerintah Kabupaten Kebumen mengeluarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2020 tentang pencegahan penularan corona virus disease 2019 (covid-19) di Kabupaten Kebumen. Sebagai pengganti Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2020. Secara garis besar ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Physical Distancing dan Social Distancing;
- b. Maskerisasi;
- c. Pembatasan waktu kegiatan masyarakat;
- d. Pembiasaan cuci tangan dan penggunaan disinfektan;
- e. Perlakuan terhadap pemudik/pendatang;
- f. Pelaksanaan kegiatan di tempat dan fasilitas umum;
- g. Pelaksanaan karantina dan isolasi;

- h. Tim Pendisiplinan
- i. Monitoring dan Evaluasi;
- j. Sanksi Administratif;
- k. Sosialisasi dan Partisipasi; dan
- l. Pendanaan.

Sesuai surat Bupati nomor 451/1879 tanggal 29 Juni 2020 perihal penyelenggaraan kegiatan keagamaan dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman covid 19 di masa pandemi, mengatur penyelenggaraan ibadah inti dan sosial. Bahwa setelah Penyelenggara kegiatan ibadah, mendapat surat keterangan aman covid-19 dari Ketua Gugus Tugas Kecamatan maka pengurus maupun penanggung jawab tempat ibadah serta masyarakat berkewajiban untuk menerapkan protokol pencegahan covid-19 di tempat ibadah.

Sesuai Surat Edaran Bupati Kebumen nomor 426/1900 tanggal 2 Juli 2020 tentang upaya peningkatan gerakan olahraga masyarakat dalam rangka pencegahan gelombang kedua pandemi covid-19 Kabupaten Kebumen, diperintahkan agar masyarakat untuk melakukan gerakan olahraga seperti seperti jalan sehat senam bersepeda dan olah raga dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan

Sesuai SE Bupati Kebumen 421/2062, mulai tanggal 3 Agustus 2020 Pemkab Kebumen memfasilitasi pembelajaran melalui siaran Radio In FM dan Ratih TV Kebumen. Siaran ini ditujukan untuk peserta didik PAUD/RA, SD, SMP/MTs, SMA/MA. Untuk itu dimintakan kepada orangtua untuk memberi perhatian lebih khusus, pada jam-jam siaran dimaksud.

Berbagai upaya yang akan, sedang dan telah dilaksanakan Satuan Tugas penanganan Covid-19 kabupaten kebumen meliputi:

- 1) penerapan kebijakan dan tata laksana penanganan Covid-19 Kabupaten Kebumen hingga tingkat kecamatan dan desa.
 - Pemakaman menggunakan protokol covid-19 di desa wilayah Kecamatan Prembun.
 - sterilisasi di kantor/instansi dan tempat umum
 - pemasangan toren dan wastafel cuci tangan di stadion Candradimuka dan STAINU

- 2) Berbagai pendekatan sosialisasi ke masyarakat termasuk melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, TNI dan Polri dengan menyiarkan iklan layanan masyarakat tentang penanganan Covid-19 dan program vaksinasi, melalui LPPL Ratih TV Kebumen. Acara ini merupakan kerjasama KPCPEN-KEMKOMINFO-ATVLI-LPPL Ratih TV Kebumen.
- 3) Menyusun berbagai kebijakan untuk mengantisipasi dan menangani perkembangan kasus covid-19 di Kabupaten Kebumen.
- 4) Kegiatan RS Darurat Kebumen hari ini, menunggu hasil lab.
- 5) Penerimaan dan penyaluran bantuan logistik dan sembako oleh tim satuan tugas dan organisasi kemasyarakatan dengan pengiriman bantuan logistik untuk kontak erat melalui Puskesmas
- 6) Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam hal penerapan protokol pencegahan Covid-19 dilakukan Operasi Yustisi Penegakan Perbup No. 68 tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Covid-19 di Kabupaten Kebumen. Personil terdiri dari unsur Satpol PP, TNI, Polri, Linmas.

Tenaga Kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kebumen tahun 2019 sebesar 5,52% atau turun sebesar 0,06% dibandingkan tahun 2018. Meskipun menurun, tren TPT selama lima tahun terakhir sebenarnya mengalami peningkatan dimana pada tahun 2014 TPT hanya sebesar 3,25%. Hal ini disebabkan karena selama kurun waktu 2016-2020 terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja namun tidak diimbangi oleh daya serap/lapangan pekerjaan yang memadai. Namun demikian, capaian peningkatan keterserapan tenaga kerja yang pada tahun 2021 meningkat hingga mencapai 42 %.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kebumen tahun 2022 sebesar 5,92 % persen dari total Angkatan kerja atau menurun jika dibandingkan tahun 2021. Jika dibandingkan dengan TPT kabupaten/kota di Jawa Tengah, posisi Kabupaten Kebumen termasuk dalam 10 kabupaten dengan Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi di Jawa Tengah. Belum adanya industri manufaktur yang mampu menyerap tenaga kerja menjadi salah satu penyebab tingginya TPT di Kabupaten Kebumen, artinya

adanya keterbatasan lapangan kerja yang mampu menyerap jumlah angkatan kerja. Selain itu sebagian besar masyarakat Kabupaten Kebumen bekerja pada sektor informal.

Indikator kinerja ketenagakerjaan dapat dilihat juga dari besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Kebumen yang meningkat dari Rp.1.905.400,- pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp.1.911.850,- pada tahun 2022 atau naik Rp.6.450,-. Capaian urusan tenaga kerja di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2022 selengkapny dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel III.33

Capaian Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2016– 2021

NO	INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,58	5,58	5,52	6,07	6,03	5,92
2	Capaian peningkatan keterserapan tenaga kerja (%)	25,60	28,72	25,63	15,76	42 %	-
3	Upah Minimum Kabupaten (Rp)	1.433.900	1.560.000	1.686.000	1.835.000	1.895.000	1.911.850

Sumber : Disnaker KUKM Kabupaten Kebumen Tahun 2022*

Tabel III.34.

Korelasi Jumlah penduduk dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Correlations		TingkatPengangguranTerbuka	JumlahPenduduk
TingkatPengangguranTerbuka	Pearson Correlation	1	.759
	Sig. (2-tailed)		.080
	N	6	6

JumlahPenduduk	Pearson Correlation	.759	1
	Sig. (2-tailed)	.080	
	N	6	6

Tabel III.34 menunjukkan bahwa koefisien korelasi antara jumlah penduduk dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,759 dan signifikan di level 0,10 atau 90 persen. Besaran korelasi ini tergolong cukup kuat. Ini artinya bahwa peningkatan jumlah penduduk akan diikuti dengan bertambahnya tingkat pengangguran terbuka. Kesimpulannya, karakteristik penduduk di Kabupaten Kebumen tidak menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang produktif sehingga meningkatkan problem pengangguran.

Lebih jauh, dampak pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 ini belum sepenuhnya memulihkan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Kebumen. Angka pengangguran di Kabupaten Kebumen masih tetap tinggi dibandingkan periode sebelum pandemi. Angka pengangguran di Kabupaten Kebumen juga meningkat akibat pulangnya penduduk asli Kebumen yang merantau bekerja di kota besar (pekerja migran). Mereka berhenti bekerja karena diterapkannya kebijakan lock down di tempat bekerjanya akibat pandemi Covid-19 dan memilih pulang ke Kebumen untuk mengurangi beban ekonomi kehidupannya. Namun demikian pada tahun 2022, tingkat pengangguran terbuka turun sebesar 0,11 persen. Situasi ini menunjukkan upaya pemulihan berada pada jalur yang tepat.

BAB IV

REKOMENDASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN

Penduduk adalah fenomena penting dalam proses pembangunan sosial ekonomi dan politik apabila jumlahnya didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Namun demikian, jumlah penduduk yang besar namun tidak berkualitas maka penambahan jumlah penduduk akan menjadi beban pembangunan.

Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Kebumen menunjukkan kecenderungan yang meningkat sejak tahun 2017. Jumlah penduduk meningkat pada tahun 2022 atau bertambah sebesar 3,19 persen dalam masa lima tahun terakhir. Peningkatan penduduk ini banyak disumbang dari kelompok umur produktif. Meskipun demikian, ini tidak secara otomatis mengindikasikan kontribusi yang positif terhadap beban kependudukan. Karena dari hasil perhitungan angka ketergantungan justru menunjukkan bahwa kabupaten Kebumen berpotensi tidak dapat menikmati bonus demografi. Hal ini dikarenakan angka ketergantungannya masih cukup tinggi. Dengan demikian, beban tanggungan yang harus dipikul oleh penduduk produktif masih cukup tinggi.

Bahkan perkembangan jumlah penduduk memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin meningkatnya jumlah penduduk ternyata berhubungan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi. Demikian pula ditemukan bahwa angka ketergantungan berkorelasi negatif dengan indeks pembangunan manusia. Artinya, dinamika kependudukan di Kabupaten Kebumen memberikan beban yang tinggi terhadap proses pembangunan.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi sudah menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,79 %. Situasi ini menandakan pertumbuhan ekonomi kembali pulih setelah diterpa pandemi Covid-19. Harapannya, pertumbuhan ekonomi yang kembali positif memberikan dampak positif terhadap pembukaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan hasil kajian dampak kependudukan, beberapa rekomendasi yang dapat diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

(1) Mengembangkan Program Keluarga Berencana yang Lebih Inklusif:

Analisis menunjukkan bahwa partisipasi dalam program KB telah meningkat, tetapi masih ada potensi untuk perluasan. Khususnya, fokus harus diberikan pada pasangan usia subur di perdesaan dan melibatkan peserta KB dari kalangan pria. Oleh karena itu, kebijakan harus memprioritaskan untuk memperluas jangkauan pelayanan KB ke peserta baru dan mempromosikan partisipasi pria dalam perencanaan keluarga.

(2) Manfaatkan Bonus Demografi dengan Kebijakan Tepat:

Untuk mengoptimalkan bonus demografi, penting untuk mengadopsi kebijakan yang mendukung peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, pengembangan keterampilan, dan pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program KB. Ini juga mencakup kebijakan ekonomi yang mendukung lapangan kerja yang padat karya, pasar tenaga kerja yang fleksibel, keterbukaan perdagangan, dan insentif untuk menabung.

(3) Integrasi Kebijakan Kependudukan dalam Rencana Pembangunan Daerah:

Salah satu rekomendasi penting adalah mengintegrasikan kebijakan kependudukan ke dalam rencana pembangunan daerah. Ini akan memastikan bahwa upaya pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas penduduk menjadi bagian integral dari program-program pembangunan.

(4) Penyusunan Indikator Kinerja Utama Terkait dengan Kebijakan Kependudukan:

Untuk memonitor efektivitas kebijakan, disarankan untuk menyusun indikator kinerja utama (IKU) yang berkaitan dengan kebijakan kependudukan dan mengintegrasikannya dalam program pembangunan daerah. Ini akan membantu dalam mengukur dampak dan mengevaluasi efektivitas kebijakan.

(5) Peraturan Bupati tentang Kependudukan:

Sebagai bentuk komitmen kepada daerah, direkomendasikan penyusunan peraturan bupati tentang kependudukan. Ini akan memberikan dasar hukum dan tanggung

jawab yang jelas dalam mengendalikan kelahiran, meningkatkan kesehatan penduduk, dan mengatur perpindahan penduduk.

(6) Evaluasi Teratur Kebijakan Kependudukan:

Disarankan agar kebijakan kependudukan dievaluasi secara reguler saat menyusun rencana pembangunan daerah. Ini akan memastikan bahwa kebijakan dapat disesuaikan sesuai dengan perkembangan dinamika kependudukan dan berkontribusi pada kinerja program-program pembangunan.

Rekomendasi ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan kualitas hidup, dan mendukung perkembangan berkelanjutan di Kabupaten Kebumen. Keberhasilan implementasi rekomendasi ini akan sangat tergantung pada kerjasama antara pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut. Dalam pemantauan dan evaluasi, pastikan untuk melibatkan pemangku kepentingan yang relevan untuk mendapatkan masukan dan memastikan kesesuaian kebijakan dengan kondisi aktual di lapangan.

REFERENSI

- Adioetomo, Sri Moertiningsih. 2011. "Pertumbuhan Penduduk dan Kesejahteraan Ekonomi". *Presentasi dalam Tenteloka BKKBN. Jakarta: 27 April 2011*
- Adioetomo, Sri Moertiningsih. 2018. "Bonus Demografi dan Jendela Peluang Meletakkan Dasar Pembangunan Manusia". Dalam Sri Moertiningsih Adioetomo dan Elda Luciana Pardede. *Memetik Bonus Demografi, Membangun Manusia Sejak Dini*. Depok : Rajawali Pers, hal : 23-36.
- BPS. 2020. Kebumen dalam Angka. Diunduh dari <https://ipm.bps.go.id/data/kabkot/metode/baru/3305>, diakses 20 April 2020.
- Jayani, Dwi Hadya. 2021. Pandemi Ganjal Indonesia Menikmati Bonus Demografi. Diunduh dari <https://katadata.co.id/arsip/analisisdata/6017a06a601a3/pandemi-ganjal-indonesia-menikmati-bonus-demografi>
- Kebumenekspres. 2016. Wow, Laju Pertumbuhan Penduduk Kebumen Tinggi. Diambil dari <http://www.kebumenekspres.com/2016/10/wow-laju-pertumbuhan-penduduk-kebumen.html>
- Lee, Ronald D. and David S. Reher. 2011. *Demographic Transition and Its Consequences*. New York : Population Council.
- Mason, Andrew. 2005. *Demographic Transition and Demographic Dividends in Developed and Developing Countries*. United Nations Expert Group Meeting on Economic and Social Implications of Changing Population Age Structure (Mexico City).
- Mrapat.id. 2020. Tujuh Bulan Pandemi, 11.003 Pengangguran Lahir di Kebumen. <https://mrapat.id/2020/09/10/tujuh-bulan-pandemi-11-003-pengangguran-lahir-di-kebumen/>
- Sumini & Sukamdi. 2019. Analisis Dampak Kependudukan dan Bonus Demografi di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Kependudukan : Jurnal Analisis Dampak Kependudukan*, 1(1).
- Utami, R.B. 2020. Analisis Pengaruh Angka Beban Ketergantungan, Kepadatan Penduduk, Garis Kemiskinan Terhadap Indeks Gini Di Indonesia. *Medical Technology and Public Health Journal (MTPH Journal)*, Volume 4, No. 2, September 2020.